



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

### Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Grobogan untuk periode I (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2022 dan berakhir pada 31 Desember 2022

### Pasal 2

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam :

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan

### Pasal 3

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; DAN
- g. BAB VII : PENUTUP.

### Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



Pasal 5

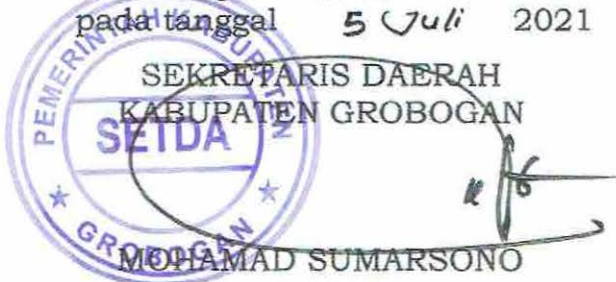
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 2 Juli 2021



Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 5 Juli 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 30



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Hubungan Antar Dokumen.....	I-9
1.5 Maksud dan Tujuan.....	I-11
1.6 Sistematika Dokumen RKPD .....	I-11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Kondisi Umum .....	II-1
2.1.1 Kondisi Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-12
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-38
2.3 Permasalahan.....	II-112
<b>BAB III KAJIAN LITERATUR DAN METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional .....	III-1
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah .....	III-3
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan .....	III-6
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-8
3.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	III-8





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	III-10
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 .....	IV-7
4.3 Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Daerah .....	IV-23
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Program Pendukung Pencapaian Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan .....	V-1
5.2 Program Pendukung Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	V-11
5.3 Program Pendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's).....	V-14
5.4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	V-18
<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>VII-1</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2022 disusun menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja, pendekatan berorientasi pada substansi, dan pendekatan berorientasi proses, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022



Gambar 1.1 Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Penjelasan atas pendekatan perencanaan RKPD yang berorientasi pada substansi diuraikan sebagai berikut.

1. **Pendekatan holistik-tematik** dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Tema dan prioritas pembangunan tahun 2022 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2021–2026 yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021–2026. Visi jangka menengah Kabupaten Grobogan 2021–2026 yang ingin diwujudkan yaitu *“Terwujudnya Grobogan Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman Dan Berbudaya”*. Berdasarkan pentahapan arah kebijakan tahunan RPJMD pada tahun 2022, maka RKPD Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 mengambil tema: *“Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Didukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*, dengan prioritas pada: (1) Pengembangan potensi unggulan daerah untuk menunjang pertumbuhan



ekonomi; (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengentasan kemiskinan, dan Penanaman nilai-nilai keimanan dan budaya; (3) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup; dan (4) Penerapan reformasi birokrasi, perbaikan kualitas pelayanan publik dan penciptaan kondusifitas wilayah.

2. **Pendekatan spasial** dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RKPD memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah.

Dari sisi proses, pendekatan perencanaan pembangunan yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2022 meliputi sebagai berikut:

- 1) **Pendekatan Teknokratik**

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, mendasarkan pada data dan informasi sesuai dengan kondisi daerah.

- 2) **Pendekatan Politik**

Perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan mengarahkan prioritas pembangunan daerah berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah, dan menyerap pokok-pokok pikiran DPRD kedalam dokumen RKPD.

- 3) **Pendekatan Partisipatif**

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk menyerap aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

- 4) **Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down) dan Bawah-Atas (Bottom-Up)**

Sedangkan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, di mana perencanaan disusun dengan menyelaraskannya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara bertingkat dari mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten.





Penyusunan RKPD disusun melalui enam tahapan, meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan Musrenbang; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan. Penjelasan singkat masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

1. **Persiapan RKPD**, meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; orientasi mengenai RKPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. **Penyusunan rancangan awal RKPD**, meliputi: analisis gambaran umum kondisi Daerah; analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah; analisis kapasitas riil keuangan Daerah; penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; perumusan permasalahan pembangunan Daerah; penelaahan terhadap sasaran RPJMD; penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional; penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan perumusan rencana kerja program dan pendanaan. Rancangan awal RKPD selanjutnya dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Setelah dilakukan penyempurnaan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah.
3. **Penyusunan rancangan RKPD**, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan: rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional, serta RKPD Provinsi Jawa Tengah.
4. **Pelaksanaan Musrenbang RKPD**, dilaksanakan dalam rangka: menyepakati permasalahan pembangunan Daerah; menyepakati prioritas pembangunan Daerah; menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas



pembangunan provinsi; dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.



**Gambar 1.3 Tahapan Musrenbang RKPD Kabupaten Grobogan**

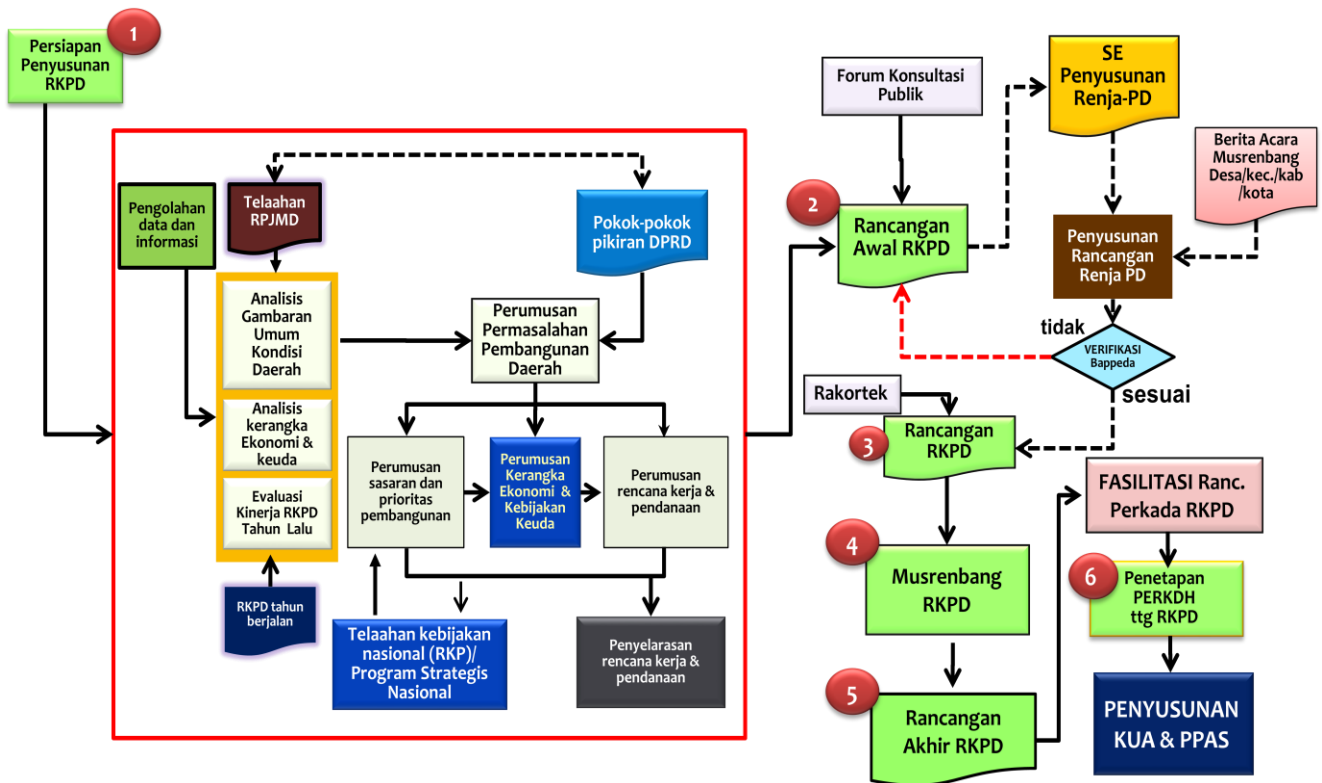
5. Perumusan rancangan akhir RKPD, merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.
6. Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi Bappeda Provinsi disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.

Secara lengkap proses penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022 terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini.





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022



Gambar 1.2 Diagram Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022

RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2022 memiliki kedudukan yang sangat penting karena akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022. RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022 juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
  12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

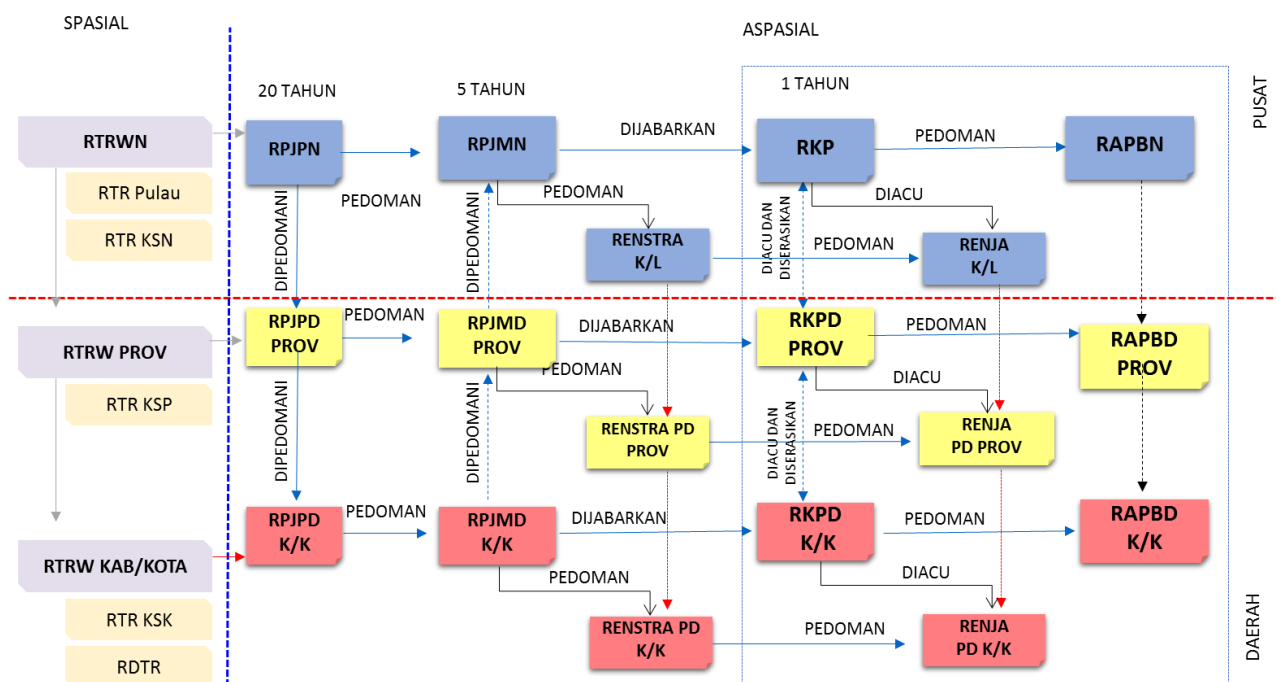


## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6).

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan, seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, RPJMD Kabupaten Grobogan, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).







**Gambar 1.3 Diagram Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen  
Perencanaan Dan Penganggaran**

Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 tahun. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/kota tahun 2022.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RKPD Tahun 2022 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021–2026.
3. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Renja Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. RKPD akan



menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022.

5. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022, dan APBD Tahun 2022.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2022 adalah menyediakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang akan menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026.
2. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan RAPBD.

#### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**



Dokumen RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen RKPD.
- Bab II Gambaran Umum Daerah, berisi tentang kondisi umum daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, dan Permasalahan Pembangunan Daerah.
- Bab III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah, berisi tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, berisi tentang Tujuan dan Sasaran, serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.
- Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berisi tentang Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Bab VII Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan RKPD tahun 2022.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH**

#### **2.1 Kondisi Umum**

##### **2.1.1 Kondisi Geografi dan Demografi**

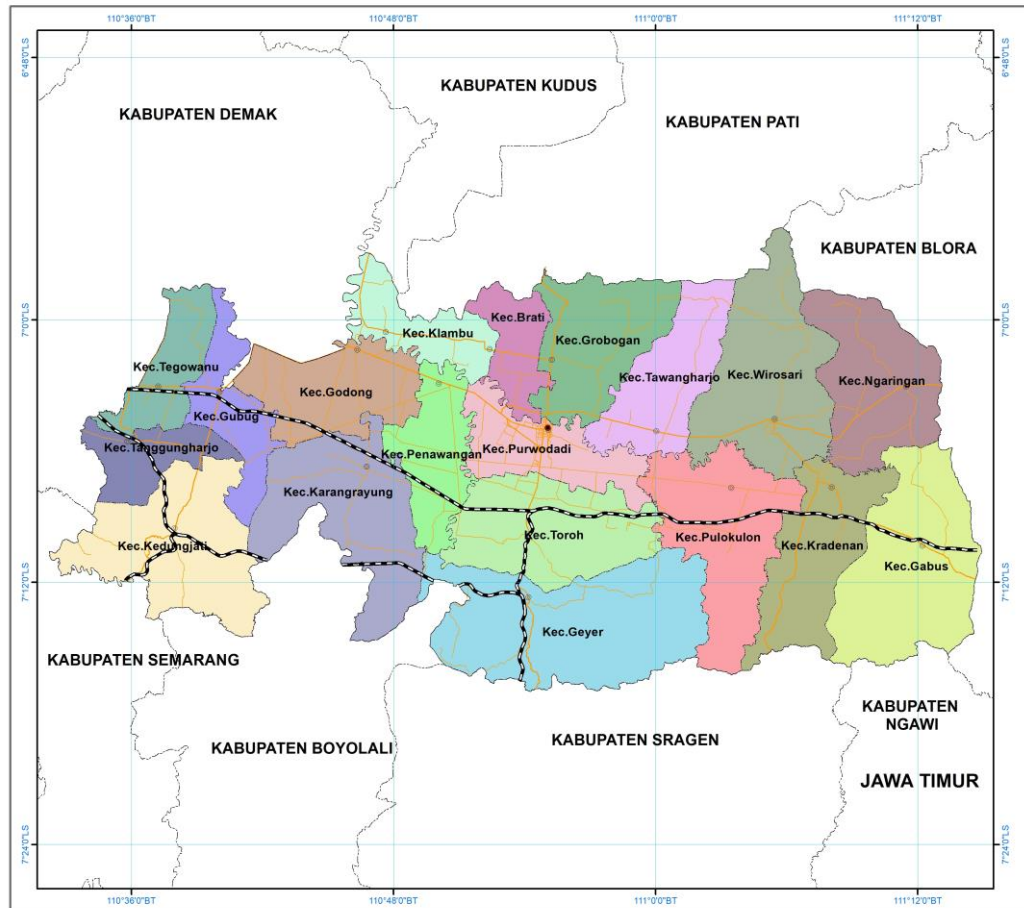
###### **1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Grobogan terletak di antara 110°15' BT – 110°25' BT dan di antara 7°LS– 7°30' LS. Dilihat dari tata ruang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur. Adapun batas – batas wilayah Kabupaten Grobogan adalah :

- Batas Utara : Kabupaten Kudus, Pati, Blora, dan Demak
- Batas Timur : Kabupaten Blora, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- Batas Barat : Kabupaten Semarang, dan Demak
- Batas Selatan : Kabupaten Sragen, dan Boyolali



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**



**Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Grobogan**

Luas wilayah Kabupaten Grobogan tercatat 1.975,86 Km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kabupaten Grobogan terbagi menjadi 19 Kecamatan, 7 kelurahan, 273 desa, 1.451 Dusun, 1.756 Rukun Warga (RW) dan 9.096 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 2.1**

**Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Desa	Dusun	RT	RW	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1	Kedungjati	0	12	76	322	82	130,34
2	Karangrayung	0	19	100	593	107	140,59
3	Penawangan	0	20	71	460	85	74,18





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Desa	Dusun	RT	RW	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
4	Toroh	0	16	118	884	153	119,31
5	Geyer	0	13	102	507	101	196,19
6	Pulokulon	0	13	112	672	126	133,65
7	Kradenan	0	14	79	549	96	107,74
8	Gabus	0	14	87	544	99	165,37
9	Ngaringan	0	12	78	396	92	116,72
10	Wirosari	2	12	86	509	94	154,3
11	Tawangharjo	0	10	58	348	73	83,6
12	Grobogan	1	11	52	448	80	104,56
13	Purwodadi	4	13	104	915	157	77,65
14	Brati	0	9	51	279	57	54,9
15	Klambu	0	9	44	185	47	46,56
16	Godong	0	28	86	511	103	86,79
17	Gubug	0	21	62	463	105	71,11
18	Tegowanu	0	18	54	244	56	51,67
19	Tanggunharjo	0	9	31	267	43	60,63
<b>Kabupaten Grobogan</b>		<b>7</b>	<b>273</b>	<b>1.451</b>	<b>9.096</b>	<b>1.756</b>	<b>1.975,86</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021*

## **2. Letak dan Kondisi Topografi**

Kondisi topografi rata-rata adalah datar, terutama di bagian tengah seluas 43.903,7 Ha (22,22%) merupakan lahan landai dan agak curam, sedangkan yang berada di sebelah utara dan selatan berupa pegunungan kapur dan perbukitan yang membujur dari barat ke timur (Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan). Secara topografi Kabupaten Grobogan terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Daerah dataran rendah, berada pada ketinggian maksimal 50 mdpl dengan kelerengan antara 0° – 8° yaitu : Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong,



- Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Wirosari bagian selatan, dengan luas keseluruhan 22,22% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan .
- b. Daerah perbukitan, berada pada ketinggian antara 50 – 100 mdpl dengan kelerengan 8° – 15° yaitu Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara dan Wirosari sebelah utara dengan luas 61,72% dari luas wilayah keseluruhan.
- c. Daerah dataran tinggi, pada ketinggian 100 – 500 mdpl dengan kelerengan lebih dari 15° yang meliputi wilayah Kabupaten Grobogan, dengan luas sebesar 16,06%.

### 3. Klimatologi

Rata-rata hari hujan per bulan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 adalah sebesar 8 hari, sedangkan rata-rata curah hujan per bulan Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 141 mm. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Rata-Rata Hari Hujan per Bulan dan Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan**  
**Tahun 2016–2020**

Tahun	Rata-Rata Hari Hujan Per Bulan (hari)	Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan (mm)
2016	8,91	164,05
2017	10,5	178,8
2018	10,6	170,1
2019	8,8	136,3
2020	8,2	141,9

*Sumber :BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021*

### 4. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Grobogan sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dengan luas mencapai 83.826,77 ha, sedangkan sisanya untuk Lahan Bukan Pertanian sebesar 28.802,81 ha dan lahan pertanian bukan sawah seluas 89.593,78 ha. Secara lebih rinci luas penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat sebagai berikut.



**Tabel 2.3**  
**Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Grobogan Tahun 2020**

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
1. Penggunaan Lahan Pertanian Sawah		
1.1 Irigasi	34.479	24,55
1.2 Tadah Hujan	49.347	35,13
2. Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah		
2.1 Tegal/Kebun	22.868	16,28
2.2 Ladang/Huma	754	0,54
2.3 Perkebunan	–	–
2.4 Hutan Rakyat	3.876	2,76
2.5 Padang Rumput	–	–
2.6 Sementara Tidak Diusahakan	–	–
2.7 Lainnya	331	0,24
3. Penggunaan Lahan Bukan Pertanian	28.803	20,51
Total Lahan 1+2+3	202.811,34	100,00

Sumber :BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

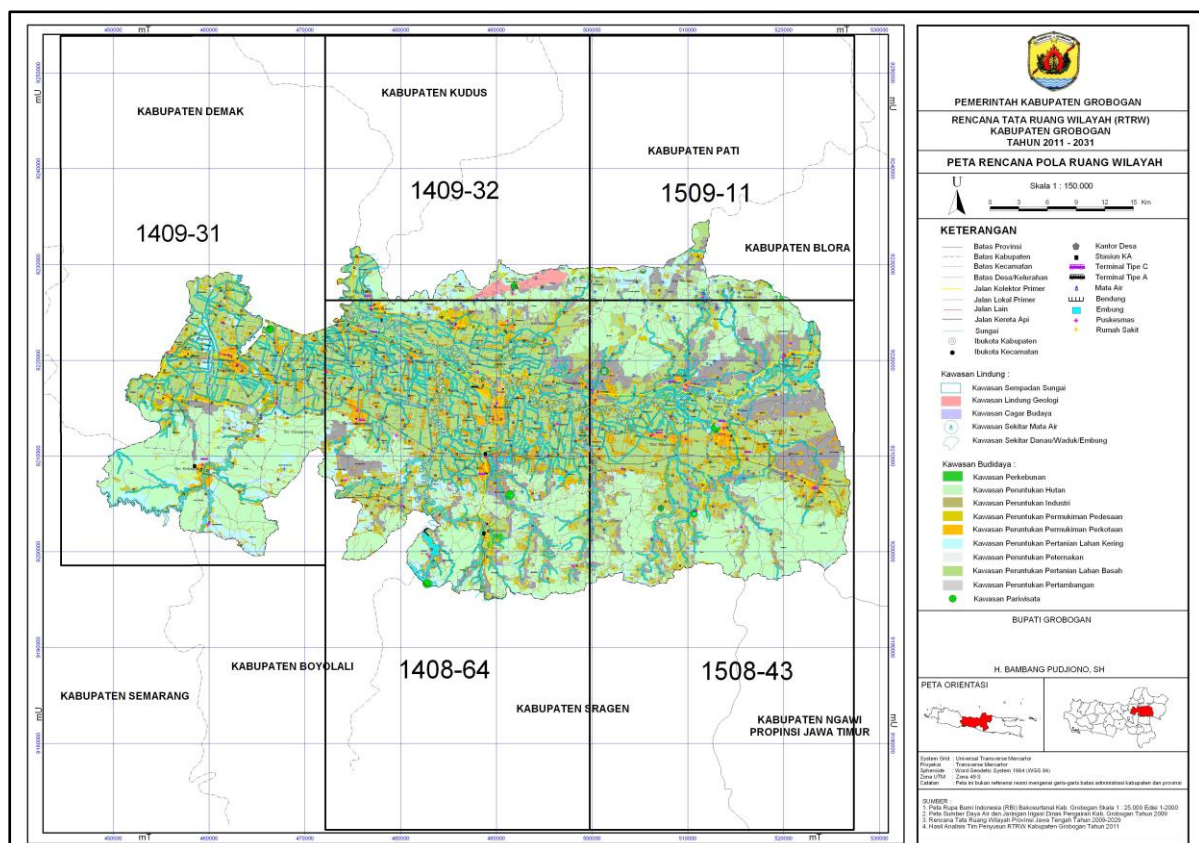
## **5. Kondisi Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membina interaksi sosial, yang dapat berupa pemerataan dan pemenuhan dasar pembangunan, distribusi barang dan jasa serta mobilitas sumber daya. Pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui upaya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana skala kabupaten; pembagian wilayah kabupaten menjadi subwilayah berdasarkan pertimbangan tertentu; serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011–2031, peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung, dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung terdiri dari Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya ; Kawasan Perlindungan Setempat; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan; dan Kawasan Rawan Bencana Alam. Sedangkan, kawasan budidaya meliputi Hutan Produksi; Hutan Rakyat; Kawasan Pertanian; Kawasan Peternakan; Kawasan Pertambangan; Kawasan Peruntukan Industri; Kawasan Pariwisata; dan Kawasan Permukiman. Luas kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten Grobogan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031, dapat dijelaskan ke dalam Gambar 2.2. dan Tabel 2.4. di bawah ini.



Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2011–2031

Gambar 2.2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Grobogan



**Tabel 2.4**

**Rencana Luas Kawasan Lindung dan Budidaya di Kabupaten Grobogan**

No	Jenis Kawasan	Luas (ha)	Persentase
<b>A</b>	<b>Kawasan Lindung</b>	<b>20.023</b>	<b>6,27%</b>
<b>1</b>	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>	<b>8.796</b>	<b>4,45%</b>
	a. Sempadan Sungai	7.265	3,67%
	b. Sempadan Danau/Waduk	149	0,08%
	c. Sekitar Mata Air	1.382	0,70%
<b>2</b>	<b>Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan</b>	<b>500</b>	<b>0,25%</b>
<b>3</b>	<b>Kawasan Rawan Bencana Alam</b>	<b>4.000</b>	<b>2,02%</b>
<b>B</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>	<b>177.858</b>	<b>93,28%</b>
	a. Hutan Produksi	67.478	34,10%
	b. Pertanian Lahan Basah	62.000	32,85%
	c. Pertanian Lahan Kering	13.000	8,45%
	d. Tanaman Tahunan/Perkebunan	1.000	0,51%
	e. Peternakan	3.609	1,82%
	f. Pertambangan	2.000	1,01%
	g. Peruntukan Industri	1.665	0,84%
	h. Pariwisata	606	0,31%
	i. Permukiman	20.000	10,11%
	j. Prasarana Kawasan (jalan, sungai, dll)	6.500	3,28%
<b>Jumlah</b>		<b>197.586</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2011–2031

Kondisi dan karakteristik wilayah di Kabupaten Grobogan cukup kompleks dari aspek geografis, geologis, hidrologis, maupun meteorologis yang dapat menghasilkan potensi kekayaan alam cukup melimpah tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) BNPB Tahun 2013 yang dihitung menggunakan total skor dan total penduduk terpapar, Kabupaten Grobogan memiliki Skor IRB 162 dengan





kategori kelas Risiko Tinggi, dengan perincian Indeks Risiko Bencana berdasarkan jenis ancaman, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5.

**Tabel 2.5**

**Indeks Risikp Bencana di Kabupaten Grobogan**

No	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Banjir	36	Tinggi
2	Gempa bumi	22	Tinggi
3	Tanah Longsor	12	Tinggi
4	Kebakaran Hutan	36	Tinggi
5	Cuaca Ekstrem	20	Tinggi
6	Kekeringan	36	Tinggi

*Sumber : IRBI BNPB, 2013*

Sedangkan berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Grobogan di tahun 2019 yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Grobogan, didapatkan adanya tingkat risiko bencana yang diperoleh dengan melihat tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas. Hasil tingkat risiko untuk seluruh bencana di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6**

**Tingkat Risiko Bencana Kabupaten Grobogan**

No	Jenis Bencana	Tingkat Ancaman	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Gempa bumi	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

3	Tanah Longsor	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
4	Kebakaran Hutan & Lahan	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
5	Angin Puting Beliung	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
6	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

*Sumber : BPBD Kab. Grobogan, Tahun 2019*

Tingkat risiko masing-masing bencana di Kabupaten Grobogan berdasarkan tabel 2.6, menunjukkan bahwa keseluruhan bencana di Kabupaten Grobogan memiliki tingkat risiko sedang dan tinggi. Tingkat risiko sedang untuk bencana angin puting beliung, gempa bumi, dan longsor. Tingkat risiko tinggi untuk bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan.

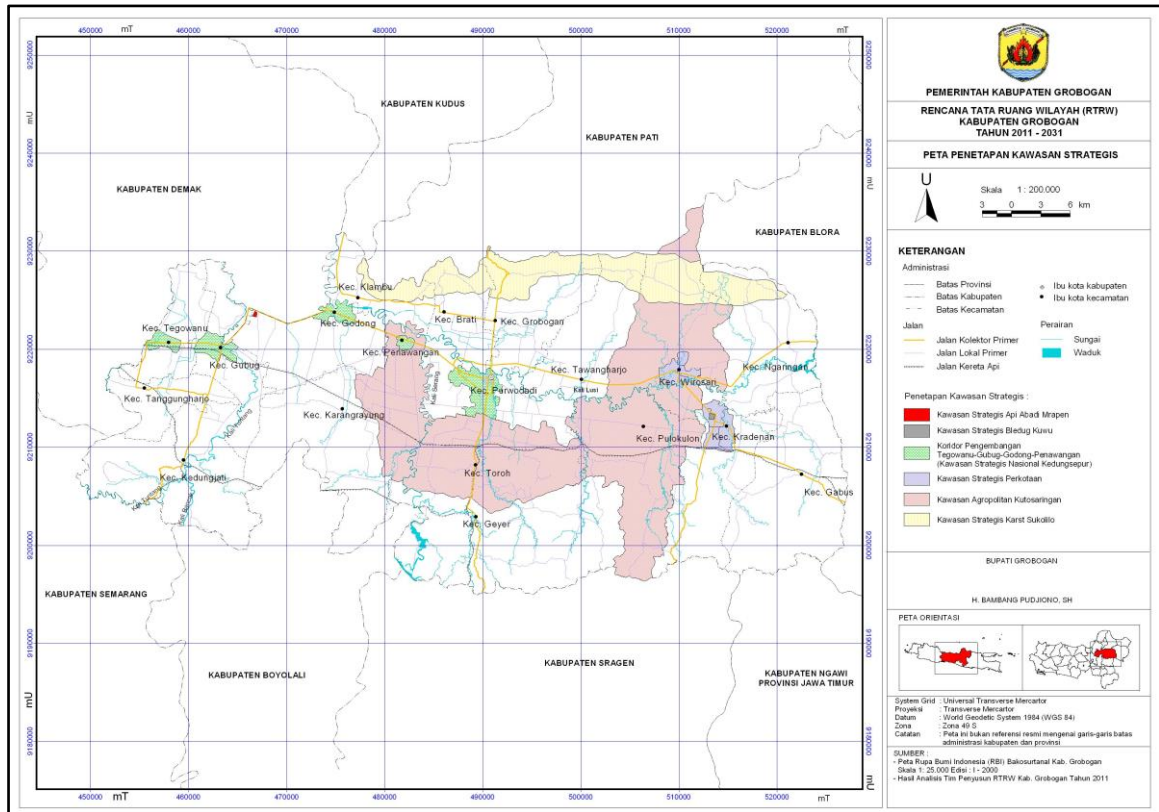
Kabupaten Grobogan masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kedungsepur. Dalam upaya pengembangan wilayah, ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi
  - Koridor pengembangan Tegowanu – Gubug – Godong – Penawangan – Purwodadi sebagai bagian dari KSN Kedungsepur;
  - Kawasan agropolitan Kutosaringan, meliputi: Kecamatan Pulokulon dengan produksi jagung dan kedelai; Kecamatan Toroh dengan produksi jagung; Kecamatan Wirosari dengan produksi sapi potong dan jagung; dan Kecamatan Penawangan dengan produksi melon, semangka dan kacang hijau.
  - Kawasan strategis perkotaan, meliputi: perkotaan Wirosari di Kecamatan Wirosari; dan perkotaan Kradenan di Kecamatan Kradenan.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berupa kawasan bentang alam karst Sukolilo seluas 112,20 km<sup>2</sup> yang terdapat di Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, dan Kecamatan Ngaringan.



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial dan budaya., meliputi Kawasan Mrapen di kecamatan Godong dan kawasan Bledug Kuwu di Kecamatan Kradenan.



Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2011–2031

**Gambar 2.3 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan**

## 6. Kondisi Demografi

### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2020 tercatat sebesar 1.453.526 jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk 1,02% atau berkurang 19.905 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2019. Data jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**

**Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan	Pertumbuhan
	Laki – Laki	Perempuan			



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

2016	727.127	717.075	1.444.202	12.667	0,89%
2017	729.738	720.053	1.449.791	5.589	0,39%
2018	732.653	727.127	1.459.780	9.989	0,69%
2019	739.322	734.109	1.473.431	13.651	0,94%
2020	729.829	723.697	1.453.526	-19.905	-1,02%

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

### **b. Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Sex Rasio**

Dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 739.322 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 734.109 jiwa, maka sex rasio penduduk mencapai 101%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.8**

**Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		L	P	Total	
1	Kedungjati	22.433	22.514	44.947	100,2
2	Karangrayung	50.966	50.279	101.245	101,5
3	Penawangan	32.872	32.954	65.826	100,1
4	Toroh	59.305	59.468	118.773	99,7
5	Geyer	33.967	33.630	67.597	100,6
6	Pulokulon	55.844	54.788	110.632	101,9
7	Kradenan	41.930	41.550	83.480	101,0
8	Gabus	37.542	37.189	74.731	100,9
9	Ngaringan	35.742	34.586	70.328	103,5
10	Wirosari	47.171	46.744	93.915	101,3
11	Tawangharjo	29.877	29.243	59.120	102,1
12	Grobogan	39.572	39.052	78.624	102,1
13	Purwodadi	70.019	70.677	140.696	99,1
14	Brati	25.656	25.231	50.887	101,3



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		L	P	Total	
15	Klambu	19.679	19.266	38.945	102,1
16	Godong	43.990	44.240	88.230	99,9
17	Gubug	42.776	42.790	85.566	100,5
18	Tegowanu	28.745	28.581	57.326	100,4
19	Tanggungharjo	21.236	21.327	42.563	99,9
	<b>Jumlah</b>	<b>739.322</b>	<b>734.109</b>	<b>1.473.431</b>	<b>100,85</b>

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

### **c. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan**

Dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 140.696 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 38.945 jiwa.

Dari aspek Kepadatan Penduduk tercatat sebesar 746 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.812 jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan terendah di Kecamatan Geyer dan Kecamatan Kedungjati yaitu sebesar 345 jiwa/km<sup>2</sup>. Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.9**  
**Kepadatan Penduduk Tahun 2020**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Jiwa/Km <sup>2</sup>
1	Kedungjati	130,342	44.947	335
2	Karangrayung	140,595	101.245	708
3	Penawangan	74,177	65.826	865
4	Toroh	119,32	118.773	980
5	Geyer	196,192	67.597	337
6	Pulokulon	133,644	110.632	817
7	Kradenan	107,748	83.480	765





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan
8	Gabus	165,365	74.731	448
9	Ngaringan	116,72	70.328	600
10	Wirosari	154,298	93.915	601
11	Tawangharjo	83,602	59.120	700
12	Grobogan	104,556	78.624	746
13	Purwodadi	77,656	140.696	1.795
14	Brati	54,891	50.887	920
15	Klambu	46,562	38.945	828
16	Godong	86,78	88.230	1.003
17	Gubug	71,119	85.566	1.177
18	Tegowanu	51,67	57.326	1.099
19	Tanggunharjo	60,628	42.563	694
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.975,865</b>	<b>1.473.431</b>	<b>736</b>

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

### **d. Struktur Usia dan Angka Ketergantungan Penduduk**

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0–14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (disebut usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15–64 tahun (usia produktif). Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Grobogan dapat dikelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2020**

No	Kelompok umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0–4	57.790	55.093	112.883
2	5–9	54.096	51.784	105.880
3	10–14	56.951	53.251	110.202



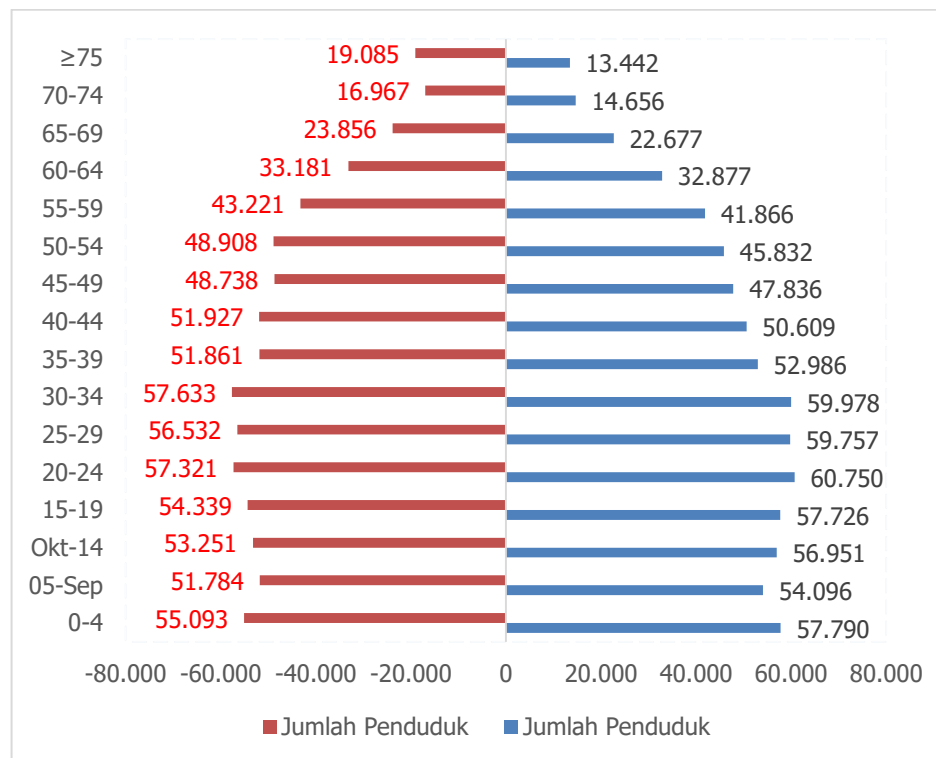
## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Kelompok umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
4	15-19	57.726	54.339	112.065
5	20-24	60.750	57.321	118.071
6	25-29	59.757	56.532	116.289
7	30-34	59.978	57.633	117.611
8	35-39	52.986	51.861	104.847
9	40-44	50.609	51.927	102.536
10	45-49	47.836	48.738	96.574
11	50-54	45.832	48.908	94.740
12	55-59	41.866	43.221	85.087
13	60-64	32.877	33.181	66.058
14	65-69	22.677	23.856	46.533
15	70-74	14.656	16.967	31.623
16	≥75	13.442	19.085	32.527
Jumlah		729.829	723.697	1.453.526

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

Pada tahun 2020 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15 -64 tahun), yang mencapai 1.013.878 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 328.965 jiwa, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 44%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 44 orang yang non produktif.

Dari data di atas dapat disusun dalam bentuk grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana tampak dalam Gambar berikut.



**Gambar 2.4 Piramida Penduduk Tahun 2020**

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2020 dapat dikatakan mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan PDRB dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.11**

**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2020**

PDRB	Tahun (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Atas Dasar Harga Berlaku	7,84	7,80	8,29	7,41	



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Pertumbuhan Ekonomi)	4,51	5,85	5,83	5,37	-1,59
---	------	------	------	------	-------

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Grobogan Menurut Lapangan Usaha 2016–2020, 2021

Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2016 sampai dengan 2020 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.12**  
**Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2016–2020**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010**

No.	Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,57	2,95	1,21	-1,52	2,28
2	Pertambangan dan Penggalian	2,35	4,29	6,31	9,23	1,52
3	Industri Pengolahan	5,37	8,42	11,56	8,93	0,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,16	4,72	5,31	5,81	5,65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,78	5,69	4,70	6,31	1,92
6	Konstruksi	5,59	5,56	4,88	5,65	-8,23
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,45	6,62	6,78	8,06	-3,26
8	Transportasi dan Pergudangan	7,51	7,00	7,24	9,82	-28,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,52	7,59	8,62	10,19	-1,60
10	Informasi dan Komunikasi	6,93	14,81	15,89	11,40	16,78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,78	7,50	4,03	3,81	4,59
12	Real Estate	6,04	5,31	5,21	6,58	-0,12
13	Jasa Perusahaan	6,80	7,17	9,17	10,19	-6,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,91	2,54	2,31	3,83	-0,89



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No.	Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
15	Jasa Pendidikan	5,83	5,61	7,22	7,28	-1,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,97	8,91	9,46	7,04	4,31
17	Jasa lainnya	6,60	8,86	8,98	9,47	-3,74
	<b>PDRB</b>	<b>4,51</b>	<b>5,85</b>	<b>5,83</b>	<b>5,37</b>	<b>-1,59</b>

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Grobogan Menurut Lapangan Usaha 2016–2020, 2021

### **b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Untuk mengkaji tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat, maka digunakan indikator perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan PDRB terbagi dalam dua kategori utama, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga konstan (ADHK) 2010. Pertumbuhan PDRB ADHB maupun ADHK 2010 Kabupaten Grobogan meningkat setiap tahunnya.

Perkembangan PDRB Atas dasar harga konstan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.13**  
**Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2016–2020**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010**

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.945.935,34	5.092.068,97	5.153.663,82	5.075.560,67	5.191.418,52
2	Pertambangan dan Penggalian	181.847,14	189.656,52	201.622,38	220.236,50	223.576,41
3	Industri Pengolahan	1.893.484,71	2.052.872,11	2.290.245,39	2.494.834,78	2.504.481,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17.111,62	17.919,28	18.870,21	19.965,72	21.093,65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.700,87	8.139,35	8.521,84	9.059,32	9.233,59
6	Konstruksi	934.380,36	986.361,63	1.034.496,48	1.092.990,96	1.003.028,18
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.533.658,09	3.767.444,62	4.015.289,06	4.292.117,11	4.205.503,15
8	Transportasi dan Pergudangan	874.144,68	935.331,03	1.003.059,08	1.101.544,34	786.284,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	742.451,16	798.783,54	867.601,69	956.007,73	940.730,51



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
10	Informasi dan Komunikasi	481.149,03	552.421,98	640.224,89	713.196,71	832.856,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	665.973,46	715.919,54	744.740,83	773.097,11	808.592,04
12	Real Estate	402.061,56	423.395,13	445.455,19	474.781,54	474.227,15
13	Jasa Perusahaan	42.444,56	45.486,68	49.657,39	54.716,60	51.284,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	570.846,43	585.332,49	598.876,61	621.795,77	616.278,75
15	Jasa Pendidikan	753.687,48	795.963,89	853.470,60	915.566,12	903.281,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160.404,70	174.701,11	191.232,91	204.689,96	213.517,52
17	Jasa lainnya	475.348,51	517.456,42	563.940,55	617.357,28	594.295,76
	<b>Jumlah</b>	<b>16.682.629,70</b>	<b>17.659.254,29</b>	<b>18.688.571,17</b>	<b>19.692.631,32</b>	<b>19.379.683,67</b>

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

Perkembangan PDRB Atas dasar harga berlaku dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.14**  
**Perkembangan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2016–2020**

No.	Lapangan Usaha	TAHUN (Juta Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.924.435,70	7.197.969,74	7.492.270,50	7.518.944,81	7.807.904,94
2	Pertambangan dan Penggalan	272.319,52	292.558,63	320.270,65	358.185,54	369.166,13





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No.	Lapangan Usaha	TAHUN (Juta Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Industri Pengolahan	2.592.911,62	2.868.784,18	3.270.867,21	3.632.925,31	3.734.211,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.425,63	20.901,66	22.744,91	24.298,54	25.266,56
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.788,56	10.434,91	11.044,71	11.973,13	12.534,75
6	Konstruksi	1.211.650,02	1.314.658,71	1.436.640,45	1.570.385,00	1.444.478,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.186.952,09	4.562.213,97	5.000.917,30	5.481.403,92	5.428.016,13
8	Transportasi dan Pergudangan	992.492,96	1.078.185,31	1.165.022,32	1.312.081,20	966.544,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	984.266,58	1.071.413,07	1.181.351,78	1.327.740,76	1.319.413,49
10	Informasi dan Komunikasi	450.255,95	543.471,56	629.542,51	708.722,88	834.197,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	908.281,21	1.015.734,38	1.094.052,95	1.156.280,44	1.215.736,00
12	Real Estate	459.717,05	496.373,34	532.275,61	576.910,89	579.572,84
13	Jasa Perusahaan	55.698,74	61.402,18	68.455,76	77.562,70	74.338,62
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	784.646,45	827.877,05	856.591,26	903.533,33	904.892,49
15	Jasa Pendidikan	1.107.669,68	1.211.128,52	1.329.896,27	1.465.454,96	1.456.775,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214.133,61	236.832,21	265.598,24	290.244,58	309.404,19
17	Jasa lainnya	591.271,91	653.603,83	720.374,24	794.204,84	782.189,38
	<b>Jumlah</b>	<b>21.764.917,28</b>	<b>23.463.543,25</b>	<b>25.407.053,22</b>	<b>27.278.521,82</b>	<b>27.264.642,82</b>

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

### **c. PDRB Per Kapita**

PDRB per kapita merupakan hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah, PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk melihat mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. Semakin besar angka PDRB per kapita, semakin sejahtera penduduk suatu wilayah.

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan melihat PDRB per kapita Kabupaten Grobogan, maka akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Grobogan tahun 2019 mengalami



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

kenaikan, baik dihitung atas dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel berikut :

**Tabel 2.15**  
**PDRB Per Kapita Tahun 2016–2020**

No	Tahun	Jumlah Penduduk	PDRB (Juta Rp)		PDRB Perkapita per tahun (Rp)	
			Harga Berlaku	Harga Konstan Th 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan Th 2010
1	2016	1.358.404	21.764.917,28	16.682.629,70	16.022.418	12.281.052
2	2017	1.365.207	23.463.543,25	17.659.254,29	17.186.803	12.935.221
3	2018	1.459.780	25.407.053,22	18.688.571,17	18.524.827	13.625.278
4	2019	1.473.431	27.278.521,82	19.692.631,32	19.807.817	14.292.921
5	2020	1.453.526	27.264.642,88	19.379.683,67	18.757.588	13.332.877

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

Sesuai tabel di atas terlihat data pertumbuhan PDRB Perkapita Tahun 2020 atas dasar Harga Konstan sebesar Rp13.332.877,00. Sementara itu PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp18.757.588,00.

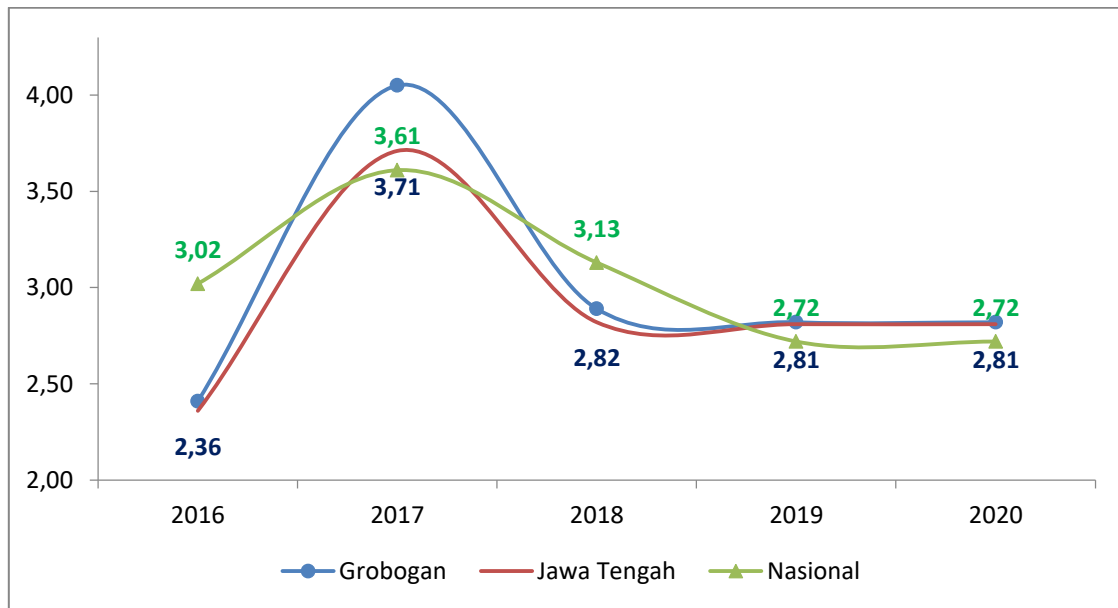
#### **d. Laju Inflasi**

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi yaitu indikator ekonomi yang sering dicermati karena terkait langsung dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki oleh masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Perubahan harga secara umum (inflasi/deflasi) untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 2,82%, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,89%. Lebih jelas dapat dilihat angka inflasi Kabupaten Grobogan tahun 2015 sampai dengan 2020 sebagaimana tercantum pada gambar berikut:



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Grobogan, 2021

**Gambar 2.5** Grafik Perkembangan inflasi Kabupaten Groboan, Jawa tengah Dan Nasional Tahun 2016–2020

Dibandingkan daerah sekitar, Inflasi Kabupaten Grobogan tahun 2020 lebih rendah dibandingkan Kabupaten Kudus dan Grobogan, seperti terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.6** Inflasi Kabupaten Grobogan dan Daerah Sekitar Tahun 2020

### e. Gambaran Kemiskinan



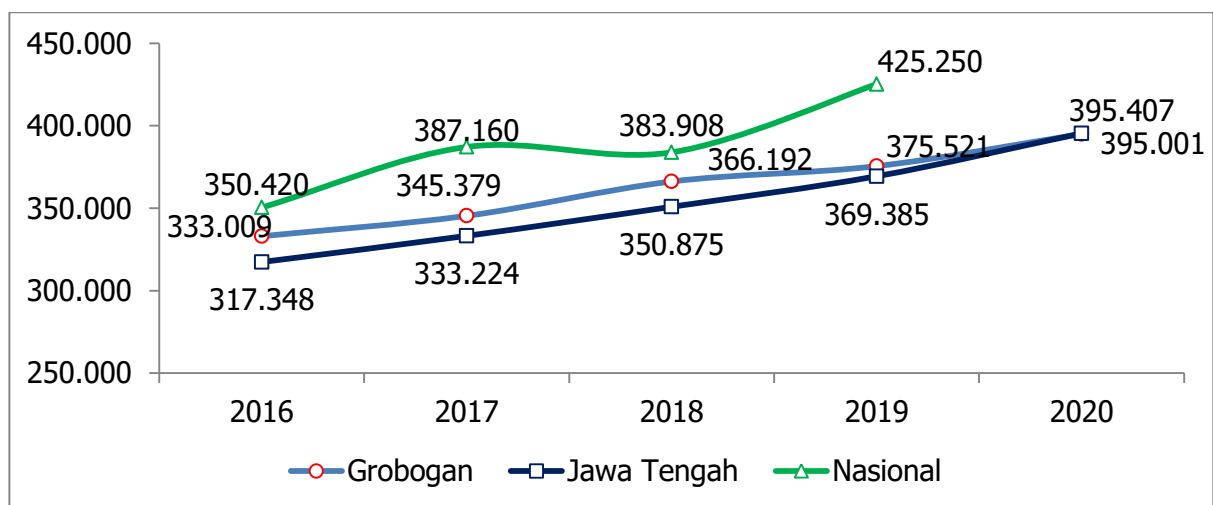
## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Grobogan dapat digambarkan dengan beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut adalah Garis Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Ke dalam Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

### 1) Garis Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Grobogan sampai dengan tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp395.001,-/kapita/bulan, yang terus meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp303.455-/kapita/bulan. Dilihat dari kondisi Provinsi dan Nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun termasuk kondisi Kabupaten Grobogan tahun-tahun sebelumnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



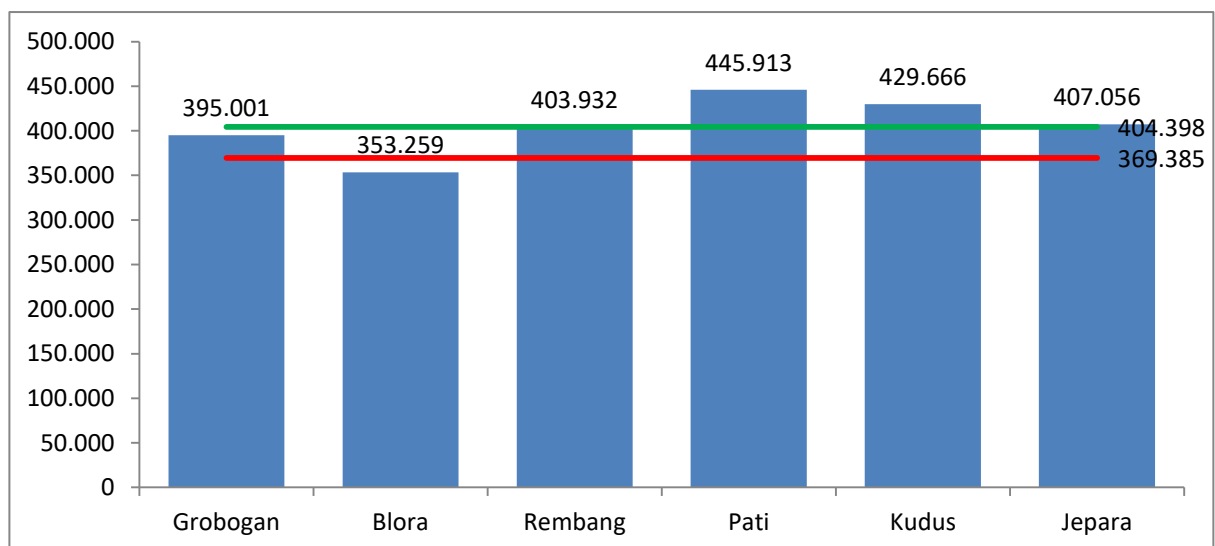
Sumber : BPS Nasional, 2021



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

**Gambar 2.7** Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi sebesar Rp369.385,-/kapita/bulan dan Nasional sebesar Rp404.398,-/kapita/bulan pada tahun 2020, Kabupaten Grobogan dengan capaian sebesar Rp395.001,-/kapita/bulan berada di atas Provinsi dan di bawah Nasional serta menempati posisi kedua terendah setelah Kabupaten Blora sebesar 353.259,-/kapita/bulan) dibandingkan Kabupaten Kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.8** Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)

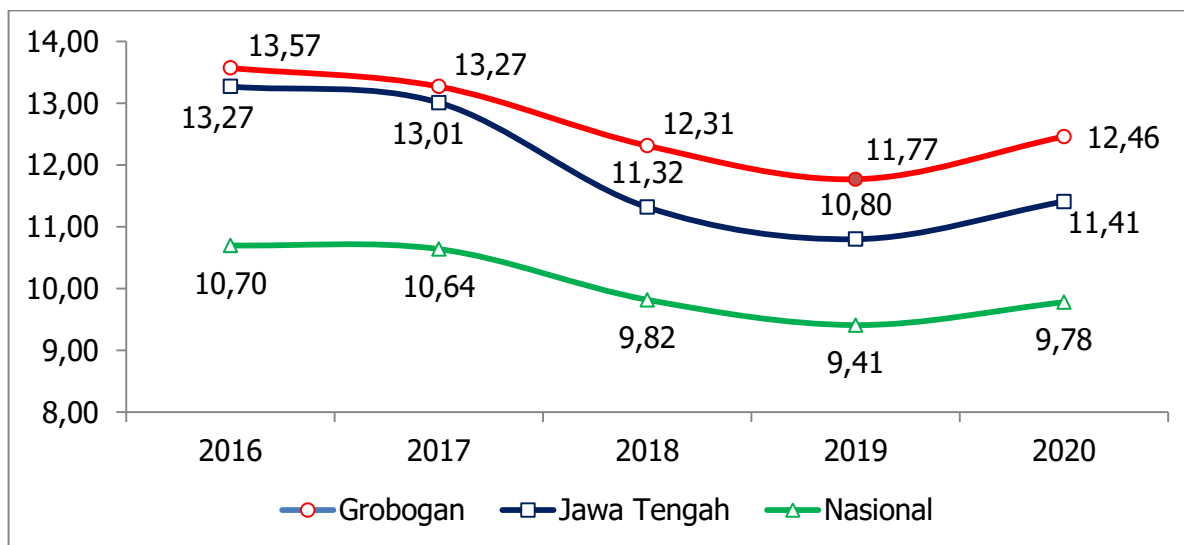
### **2) Persentase Penduduk Miskin**

Persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan penurunan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 13,57% menurun menjadi sebesar 12,46% pada tahun 2020. Kondisi relevan terhadap perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

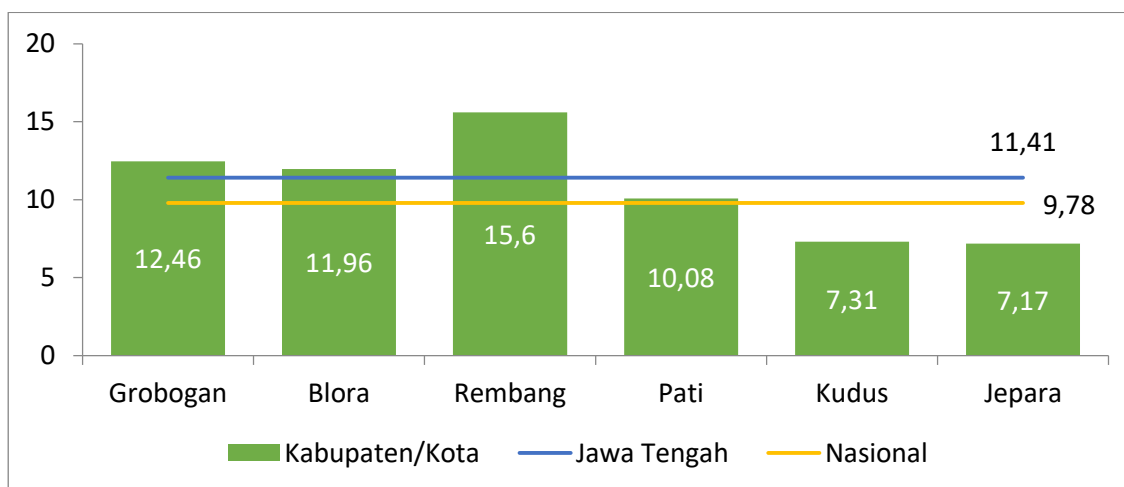
pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.9 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (%)**

Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 12,46% berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,41% dan Nasional sebesar 9,78% serta menempati posisi tertinggi kedua setelah Kabupaten Rembang sebesar 15,6% dibandingkan Kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2021

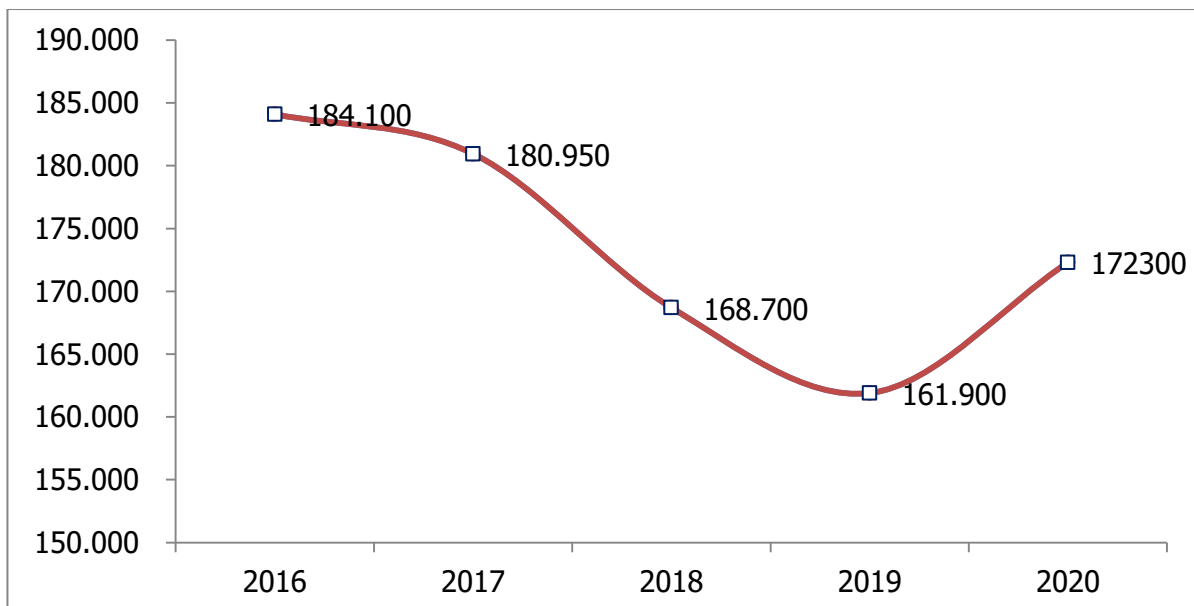




**Gambar 2.10** Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (%)

**3) Jumlah Penduduk Miskin**

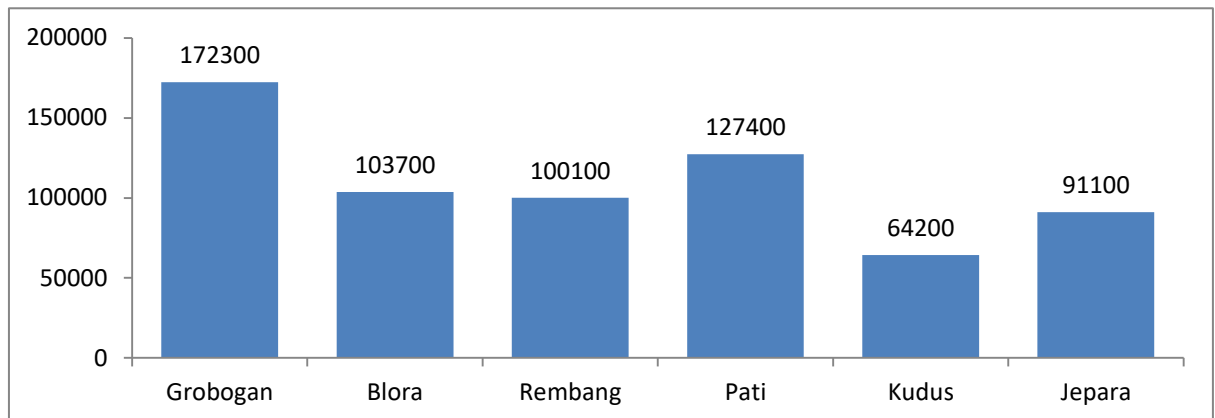
Jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2016 hingga 2020 terus menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 184.100 jiwa menurun menjadi sebesar 172.300 jiwa pada tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk miskin relevan dengan penurunan persentase penduduk miskin pada tahun yang sama. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.11** Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2020

Dibandingkan dengan Kabupaten lain dalam wilayah Kedungsepur, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2020 mencapai sebesar 172.300 jiwa menempati urutan tertinggi, berbeda dengan peringkat persentase penduduk miskin yang menempati posisi kedua setelah Kabupaten Demak. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2021

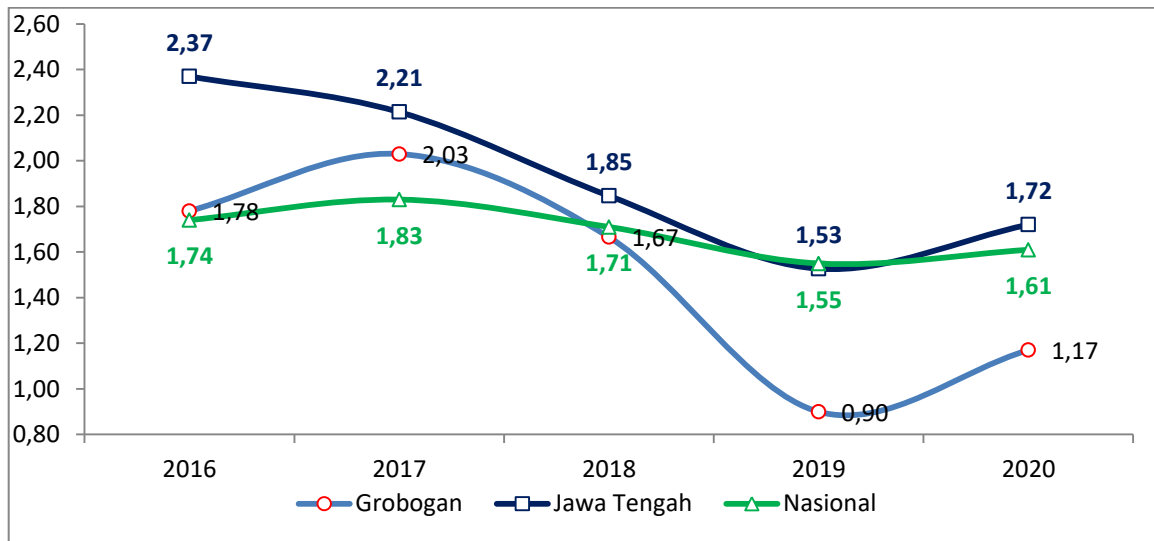
**Gambar 2.12 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Ribuan Jiwa)**

#### **4) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Grobogan selama tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi fluktuatif, namun kecenderungan menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 1,78 dan tahun 2020 menjadi sebesar 1,17. Kondisi tersebut juga terjadi pada perkembangan P1 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci pada gambar grafik berikut.



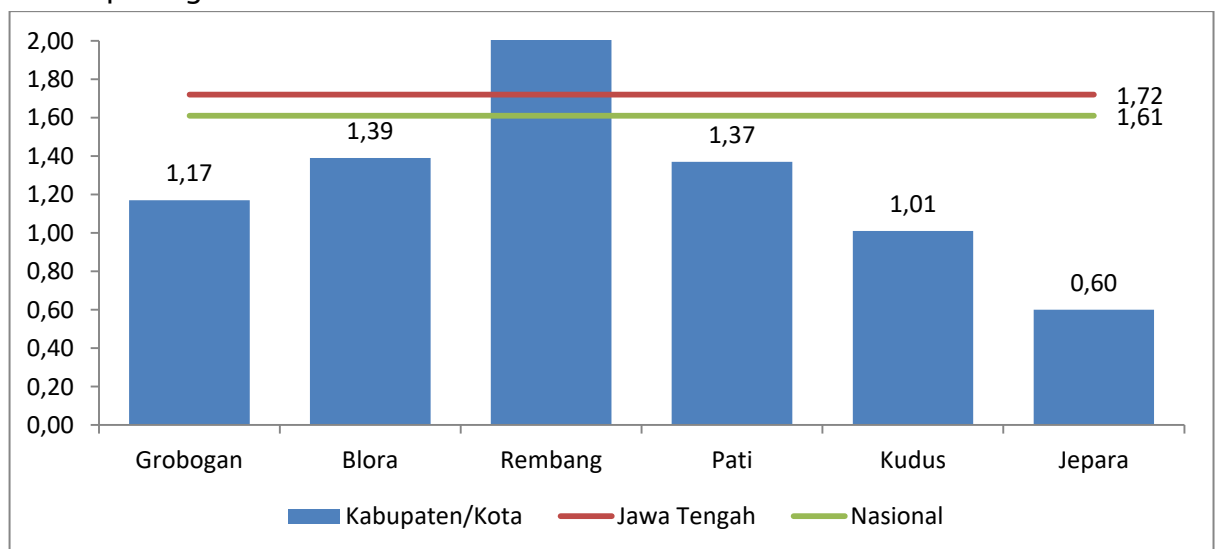
## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022



Sumber : BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.13 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016–2020**

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 1,17 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,72 dan Nasional sebesar 1,61. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P1 Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



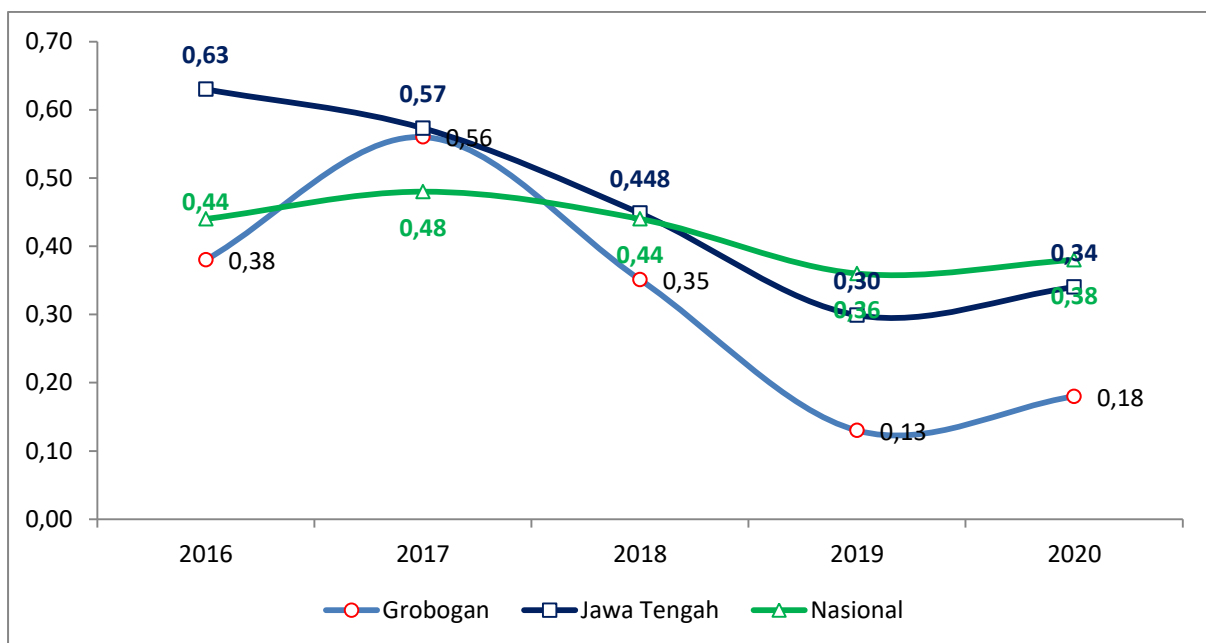
Sumber : BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.14 Posisi Relatif Indeks Ke dalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan Tahun 2020**



### 5) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan P2 Kabupaten Grobogan tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan fluktuatif, namun kecenderungan menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,38. Kemudian menurun menjadi sebesar 0,18 pada tahun 2020. Kondisi tersebut juga terjadi pada perkembangan P2 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci pada gambar grafik berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.15** Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016–2021

#### f. Gambaran Ketenagakerjaan

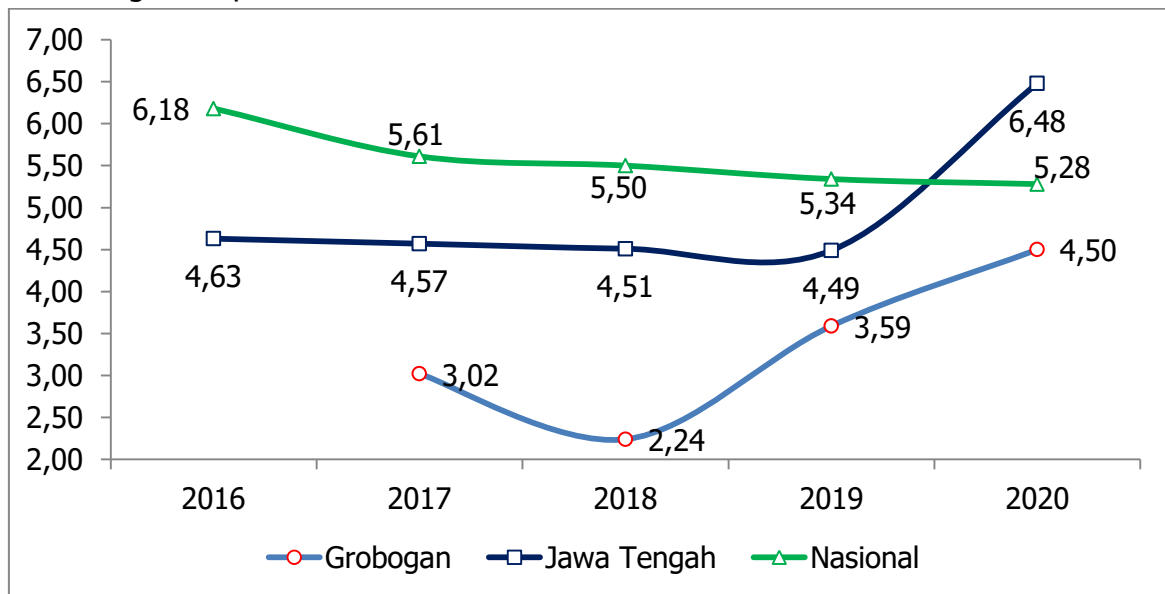
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan penurunan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 3,02% dan menjadi sebesar 4,5% pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami penurunan.



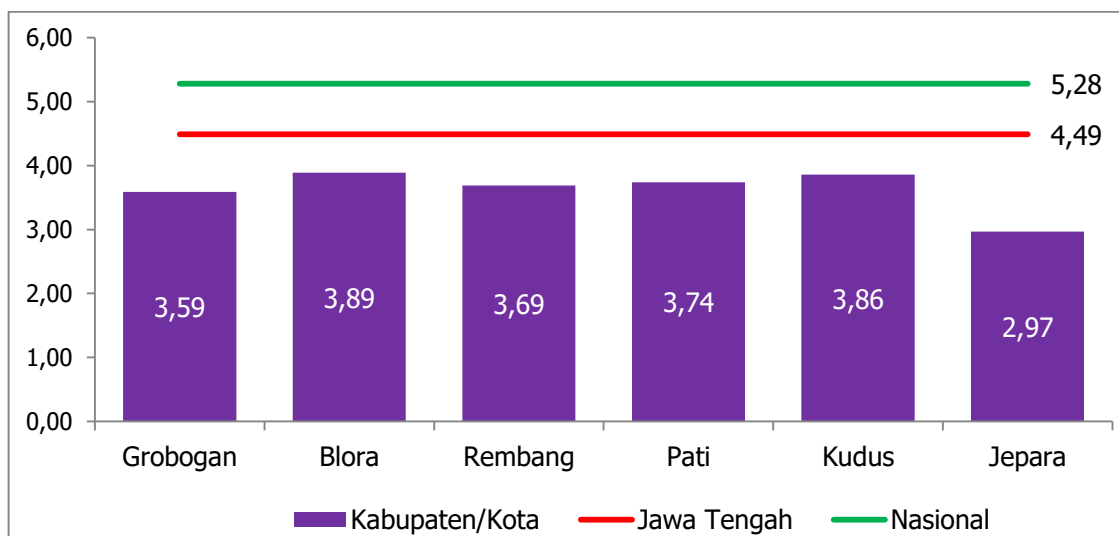
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020**

Dibandingkan kabupaten sekitar, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan bisa dilihat pada gambar berikut ini.

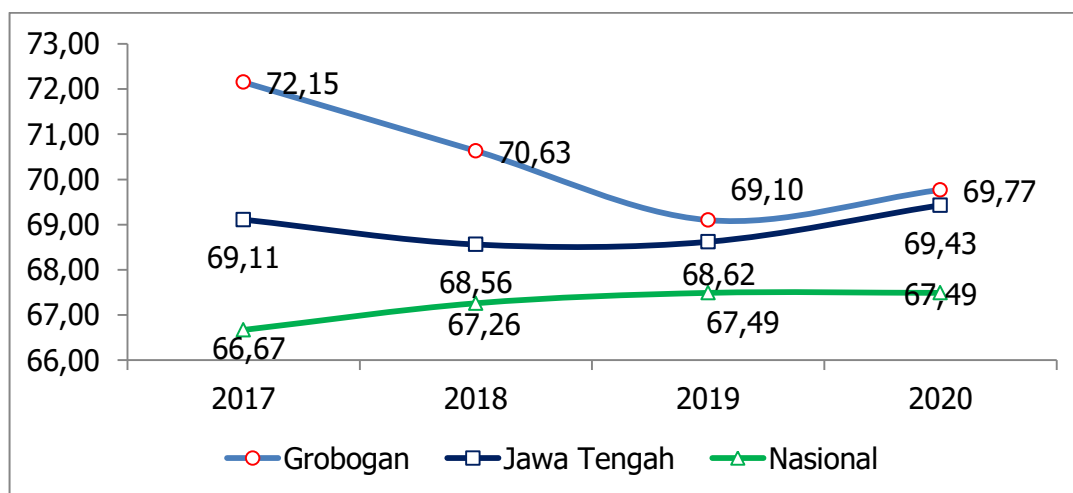


## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022



**Gambar 2.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dan Daerah Sekitar Tahun 2020**

Perkembangan TPAK Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2020 menunjukkan penurunan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 72,15% menurun menjadi sebesar 69,77%. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2.18 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2020 (%)**



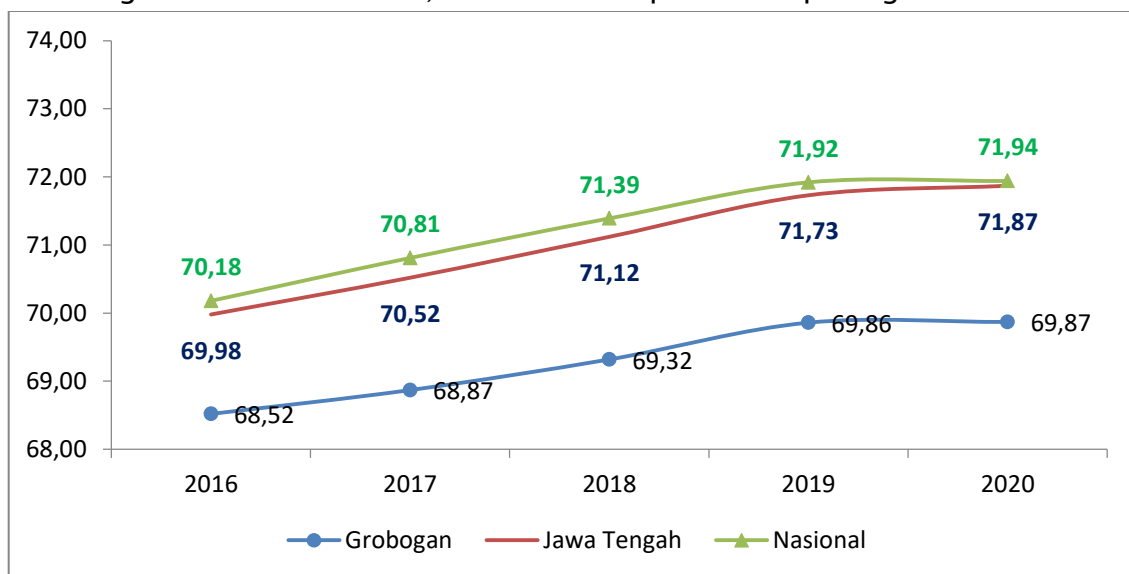


## 2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 68,52 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 69,87. Kondisi IPM Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relevan terhadap perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah dan IPM Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

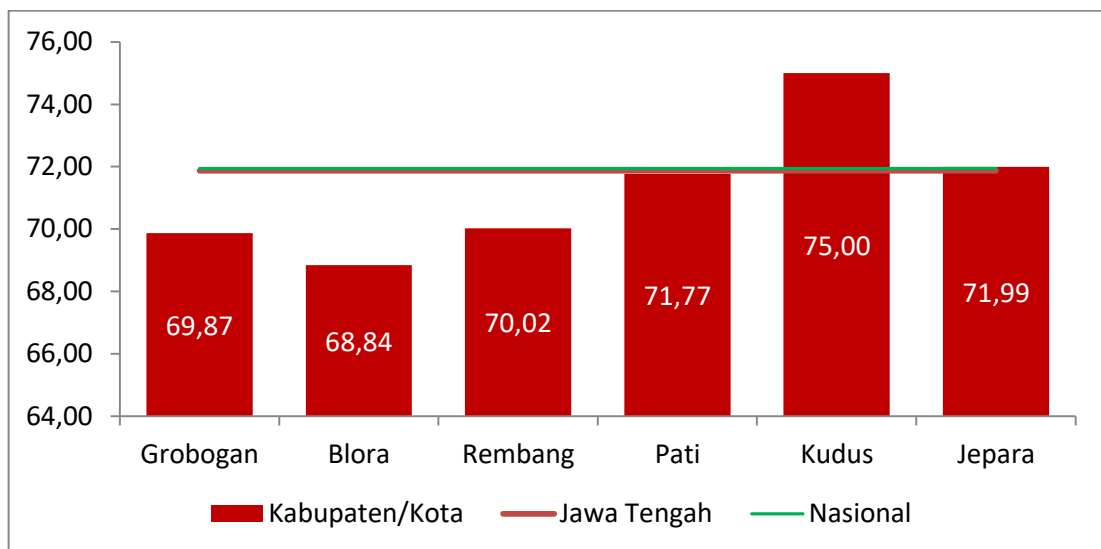


Sumber: BPSJawa Tengah, 2021

**Gambar 2.19 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020**



IPM Kabupaten Grobogan Tahun 2020 terendah kedua setelah Kabupaten Blora di bandingkan dengan Kabupaten lain se-Eks Karesidenan Pati. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih tertinggal dari kabupaten/kota lainnya. Perbandingan IPM kabupaten Grobogan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.20 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan dan Daerah Sekitar Tahun 2020**

Sementara itu, kondisi komponen pembentuk IPM Kabupaten Grobogan terdiri dari Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita sebagai berikut:

### **1) Umur Harapan Hidup (UHH)**

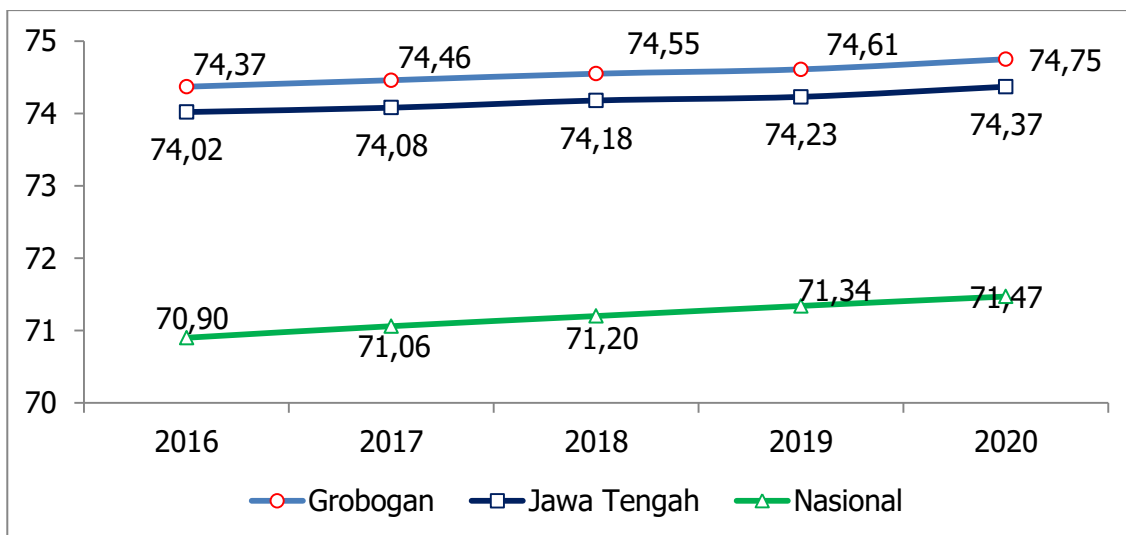
Indikator umur harapan hidup merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Perkembangan UHH Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 74,37 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 74,75



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

tahun. Kondisi AHH Kabupaten Grobogan sejalan dengan perkembangan UHH Provinsi Jawa Tengah dan UHH Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



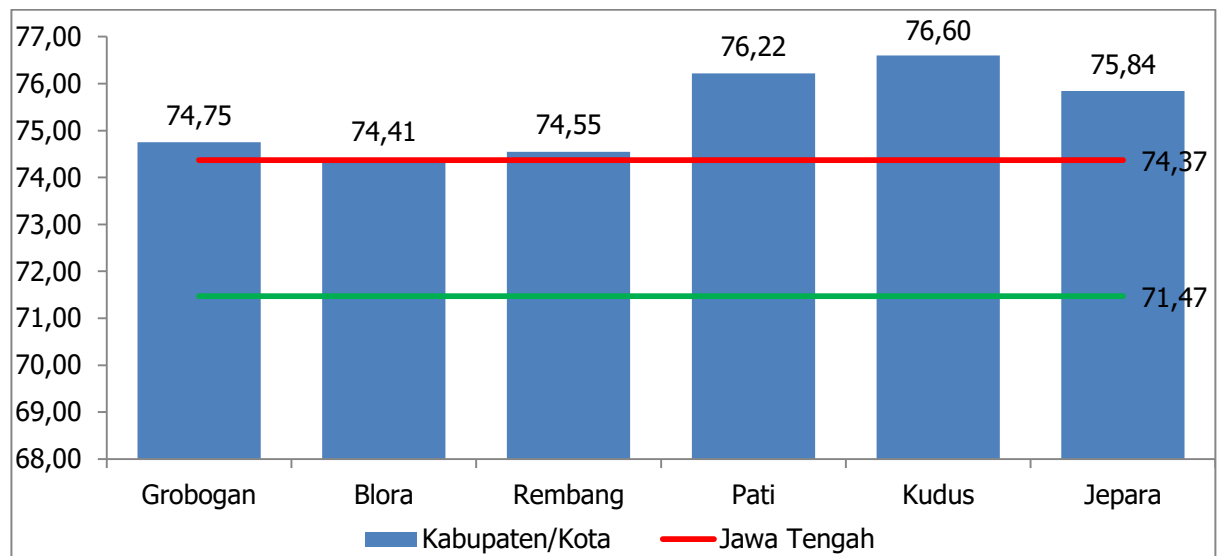
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2.21 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (tahun)**

Posisi relatif UHH Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 74,75 tahun berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (74,37 tahun) dan Nasional (71,47 tahun), serta menempati posisi ketiga terendah dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022



Sumber: BPSJawa Tengah, 2021

**Gambar 2.22 Posisi Relatif Umur Harapan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (tahun)**

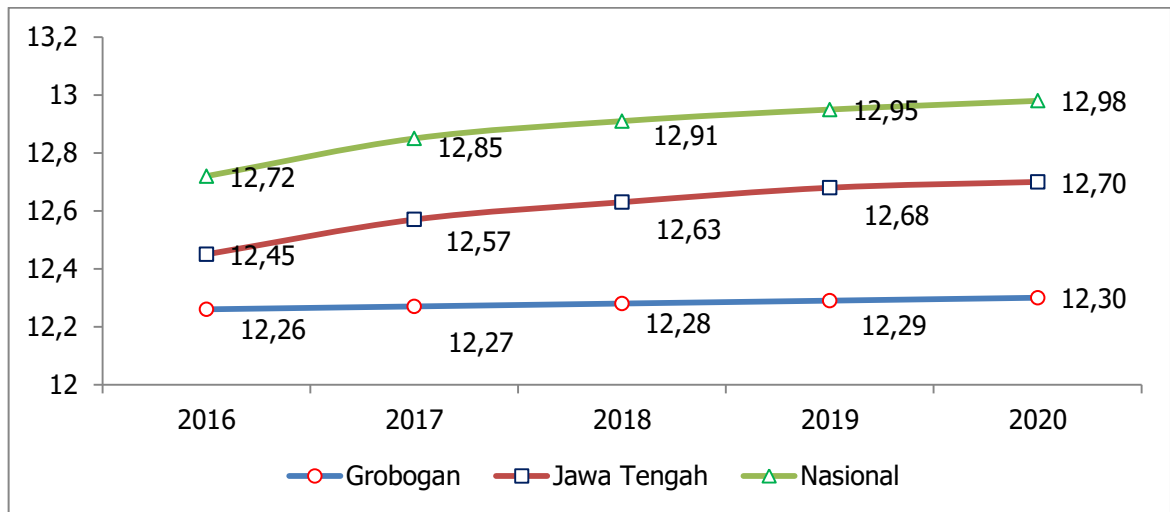
### 2) Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Perkembangan HLS Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat Gambar berikut.



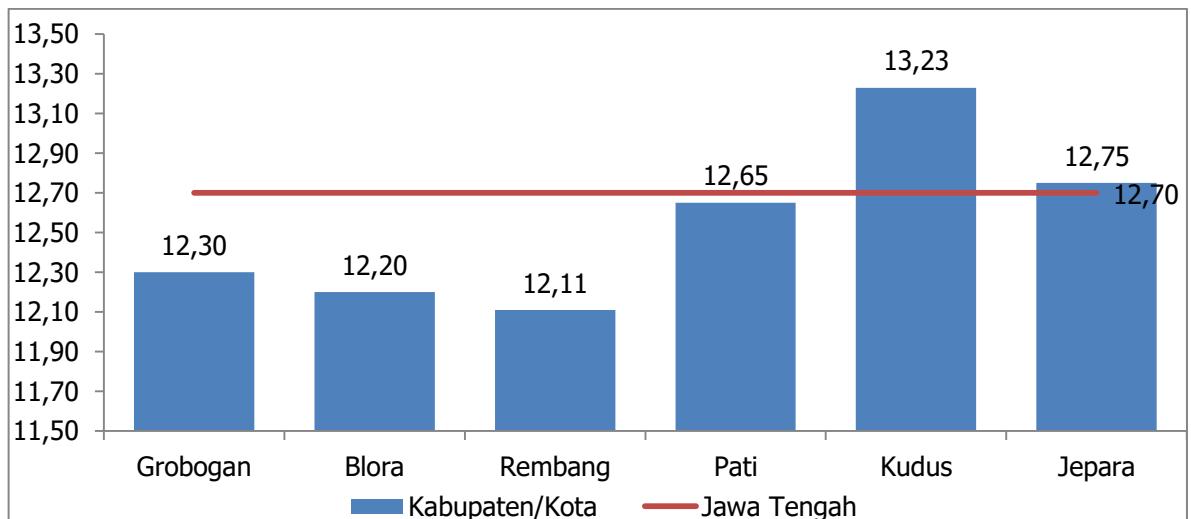
## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022



Sumber: BPS Jawa Tengah , 2021

**Gambar 2.23 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (tahun)**

Posisi relatif HLS Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 12,30 tahun berada di bawah Provinsi Jawa Tengah (12,70 tahun) serta menempati posisi ke empat dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



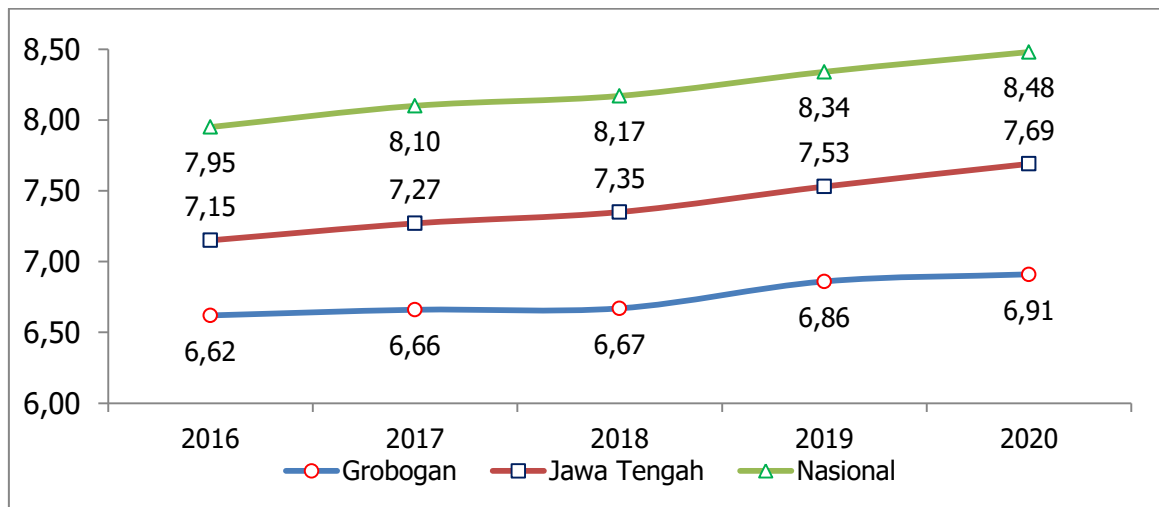
Sumber: BPS, 2021

**Gambar 2.24 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (tahun)**



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Perkembangan RLS Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu tahun 2016 sebesar 6,62 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 6,91 tahun. Kondisi RLS Kabupaten Grobogan relevan dengan perkembangan RLS Provinsi Jawa Tengah dan RLS Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

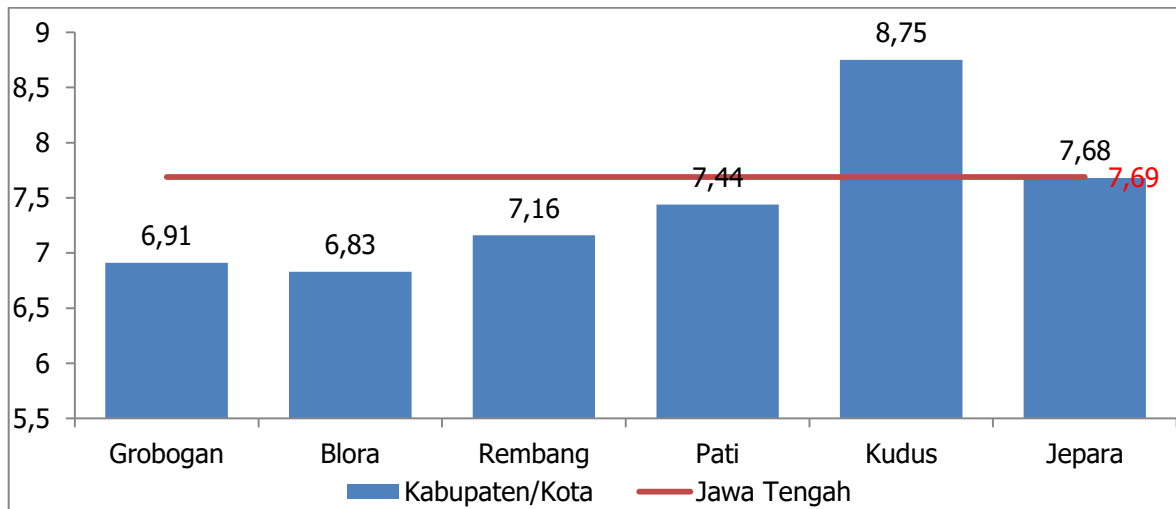


Sumber: BPS, 2021

**Gambar 2.25 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (tahun)**

Posisi relatif RLS Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 6,91 tahun berada di bawah Provinsi Jawa Tengah (7,69 tahun) serta berada menempati posisi terendah kedua setelah kabupaten Blora Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.





Sumber: BPS, 2021

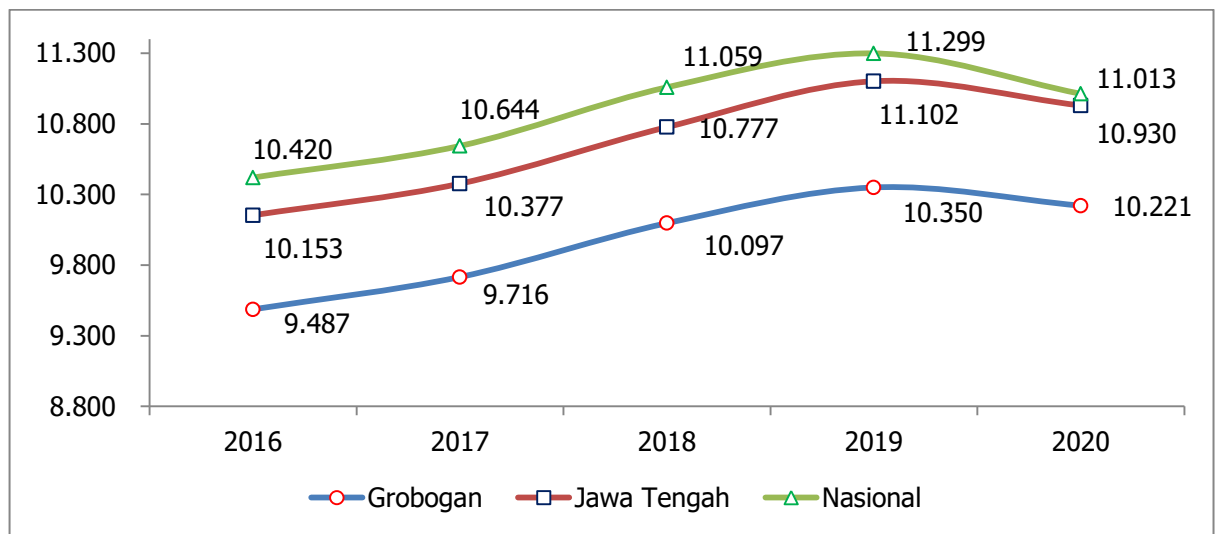
**Gambar 2.26 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (tahun)**

### 3) Pengeluaran per Kapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 juga terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 9.487 ribu dan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp10.350 ribu, namun menurun di tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 yaitu hanya sebesar Rp10.221 ribu. Secara rinci pengeluaran perkapita Kabupaten Grobogan bisa dilihat pada gambar di bawah ini :



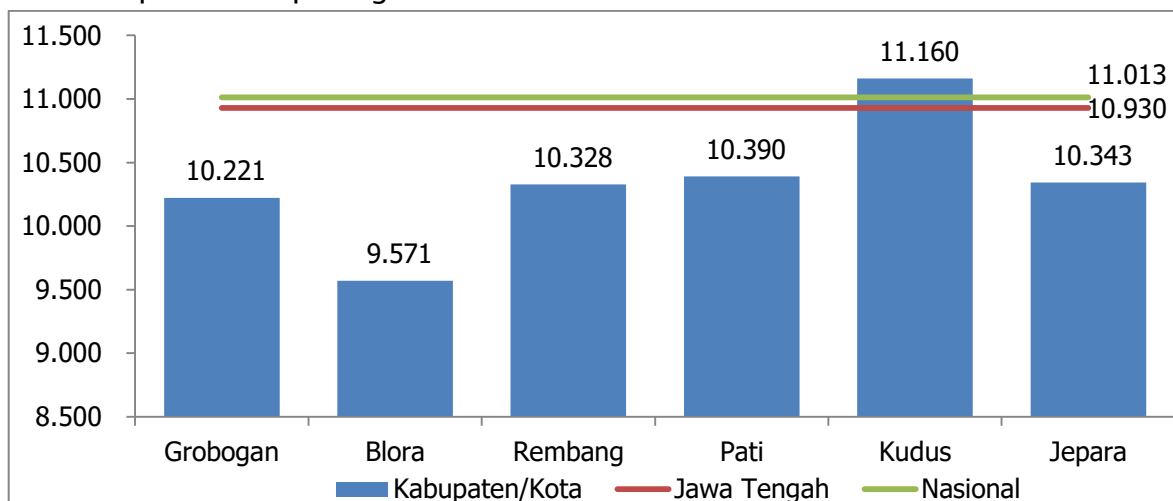
## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022



Sumber: BPS Jawa Tengah , 2021

**Gambar 2.27 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (ribu rupiah)**

Posisi relatif pendapatan per kapita Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar Rp10.221 ribu berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (Rp10.930 ribu) dan Nasional (Rp11.013 ribu). Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah , 2021

**Gambar 2.28 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (ribu rupiah)**

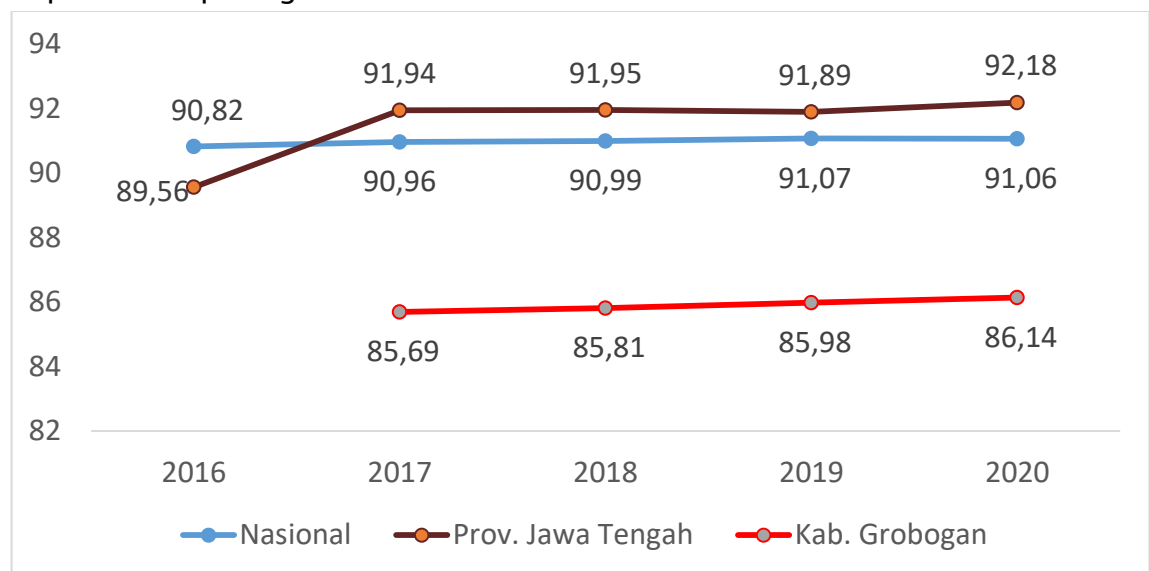
### b. Indeks Pembangunan Gender



Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Perkembangan IPG Kabupaten Grobogan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 cenderung meningkat yaitu dari 85,69 pada tahun 2017 menjadi 86,14 pada tahun 2020. Kondisi ini juga terjadi pada perkembangan IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

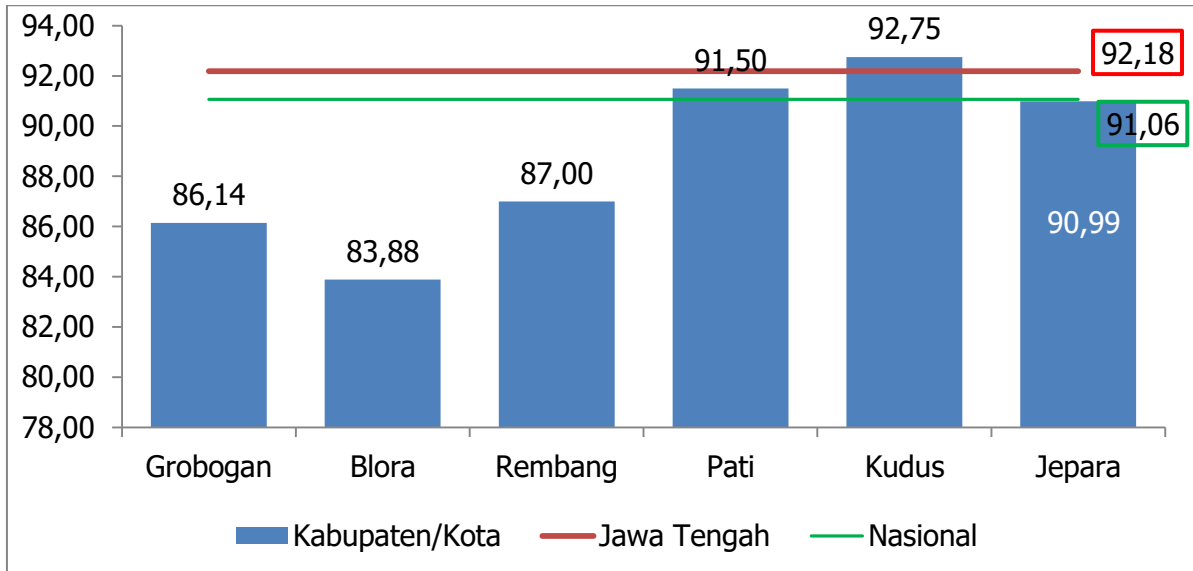
**Gambar 2.29 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020**

Posisi relatif IPG Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 86,14



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (92,18) dan Nasional (91,07) dan menempati posisi terendah dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2.30 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan Tahun 2020**

Gambaran komponen pembentuk IPG Kabupaten Grobogan terdiri dari Umur Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta Pengeluaran per Kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

### **1) Umur Harapan Hidup (UHH)**

Umur Harapan Hidup menurut jenis kelamin tahun 2018 hingga tahun 2020 Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan. UHH laki-laki lebih rendah dibandingkan UHH perempuan tiap tahunnya. Pada tahun 2020, UHH perempuan mencapai sebesar 76,54 tahun dan UHH laki-laki sebesar 72,9 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



**Tabel 2.16**

**Umur Harapan Hidup (UHH) Berdasarkan Jenis Kelamin  
Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sekitar dan Jawa Tengah  
Tahun 2017–2020**

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Grobogan	72,65	72,71	72,9	76,34	76,4	76,54
2	Blora	72,22	72,32	72,54	75,9	76,03	76,21
3	Rembang	72,5	72,53	72,67	76,17	76,22	76,34
4	Pati	74,08	74,09	74,22	77,81	77,82	78,01
5	Kudus	74,66	74,67	74,8	78,44	78,47	78,57
6	Jepara	73,86	73,89	74,04	77,7	77,71	77,81
Jawa Tengah		72,28	72,33	72,51	76,10	76,16	76,3

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

## **2) Rata-rata Lama sekolah**

Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Grobogan masing-masing mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, RLS laki-laki sebesar 7,36 tahun lebih tinggi dibandingkan RLS perempuan sebesar 6,50 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

**Tabel 2.17**

**Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Grobogan,  
Kabupaten Sekitar dan Jawa Tengah Tahun 2017–2020**

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Grobogan	7,19	7,35	7,36	6,14	6,34	6,50
2	Blora	6,99	7,14	7,40	5,96	6,06	6,30



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
3	Rembang	7,53	7,71	7,72	6,41	6,61	6,68
4	Pati	7,77	7,78	8,04	6,64	6,69	6,91
5	Kudus	9,19	9,20	9,38	8,09	8,10	8,18
6	Jepara	7,81	7,89	8,08	6,80	6,81	7,12
	Jawa Tengah	7,86	8,06	8,16	6,87	7,03	7,24

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

### **3) Pengeluaran Perkapita**

Pengeluaran perkapita Kabupaten Grobogan berdasarkan jenis kelamin masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp 15.281 ribu lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp7.461 ribu. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Tabel 2.18**

**Pengeluaran perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Grobogan Kabupaten Sekitar dan Jawa Tengah Tahun 2017–2020**

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Grobogan	15.072	15.464	15.281	7.397	7.566	7.461
2	Blora	13.815	14.382	14.004	5.737	5.968	5.841
3	Rembang	15.173	15.762	15.359	7.142	7.351	7.135
4	Pati	14.150	14.893	14.526	9.438	9.861	9.601
5	Kudus	14.895	15.433	15.146	10.351	10.618	10.464
6	Jepara	14.031	14.569	14.214	8.334	8.566	8.341

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2020

### **c. Indeks Pemberdayaan Gender**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

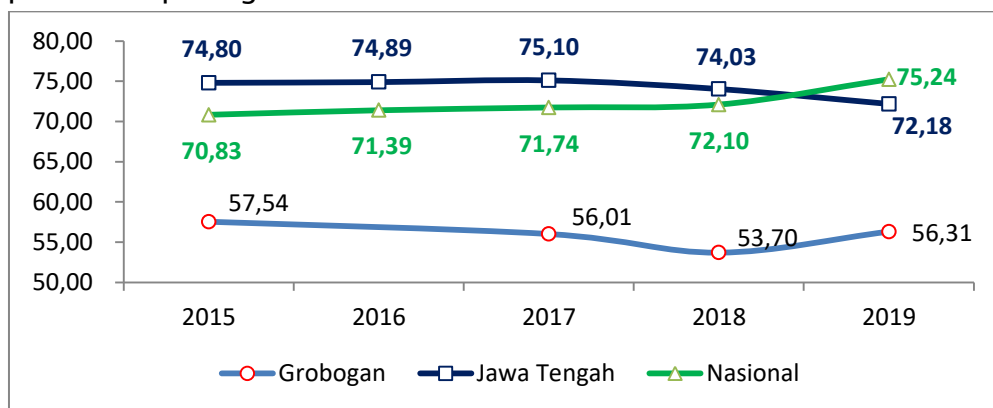
IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.

Perkembangan IDG pada tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 57,54 turun menjadi sebesar 56,31 pada tahun 2019. Kondisi ini tidak relevan terhadap perkembangan IDG Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2020

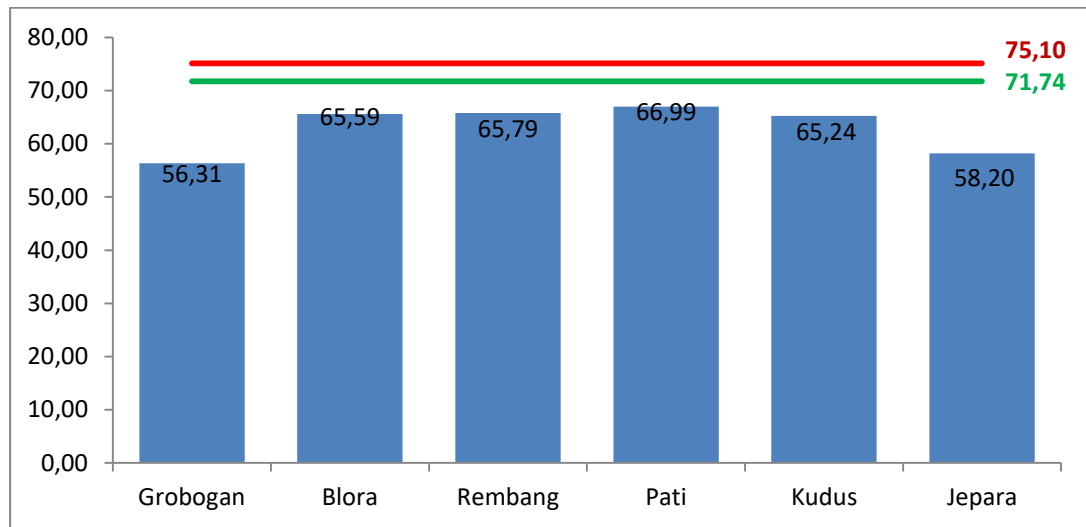
**Gambar 2.31 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015–2019**

Capaian IDG Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 sebesar 56,31 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 75,10 dan Nasional sebesar 71,74 serta menempati posisi terendah dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2020

**Gambar 2.32 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Grobogan tahun 2019**



### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

#### 1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan berada dibawah koordinasi Dinas Pendidikan, memiliki tujuan membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Sasaran urusan pendidikan yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dan meningkatnya kualitas pendidikan dan manajemen pelayanan pendidikan. Terdapat 6 indikator sasaran urusan pendidikan yaitu Rata-Rata lama Sekolah; Angka Harapan lama sekolah; Angka kelulusan SD/MI; Angka kelulusan SMP/MTS; Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV; dan Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV.

Urusan pendidikan semula terdiri dari 6 program dan 31 indikator, namun dalam perkembangannya program pendidikan menengah berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi sehingga program dan seluruh indikatornya tidak dilakukan penghitungan lagi. Untuk indikator lainnya yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 10 indikator telah mencapai target yaitu realisasi capaian hingga tahun 2020 mencapai 100% atau lebih; 12 indikator yang tidak mencapai target tahun 2020 yaitu realisasi capain hingga tahun 2020 belum mencapai 100% dan 3 indikator yang yang tidak tersedia datanya sehingga tidak bisa diukur.

Indikator yang tidak tersedia datanya yaitu Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI, Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 ujian nasional di tiadakan, dan indikator Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C belum ada realisasi data hingga tahun 2020 sehingga belum bisa di hitung persentase capaiannya.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 10 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD yaitu realisasi capaian hingga tahun 2020 telah mencapai 100% atau lebih; 7 indikator yang akan mencapai target akhir RPJM, 5 indikator masih berstatus memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD, dan 3 indikator belum diketahui hasilnya karena tidak tersedia data. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD yaitu Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, Angka



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022











Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, Ruang kelas SD/MI kondisi baik, Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik, dan Rasio guru/murid SMP. Sedangkan indikator yang belum bisa di hitung capaian akhirnya karena belum tersedia data yaitu Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI, Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs dan Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs yang masih perlu upaya keras disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kemampuan ekonomi yang kurang, kemalasan anak untuk sekolah dan kurangnya motivasi dari keluarga. Ruang kelas SD/MI kondisi baik dan Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik perlu upaya keras karena keterbatasan anggaran akibat adanya refocusing untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020.

Secara lebih rinci capaian indikator program urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.19**

**Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pendidikan**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Pendidikan</b>											
<b>Program PAUD</b>											
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	61,51	61,71	61,75	61,79	64,88	85,74	138,85		138,76	
<b>Program pendidikan Dasar 9 Tahun</b>											
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	%	106,65	106,79	106,83	106,85	107,79	93,79	87,80		87,78	
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B/SMPLB	%	100,03	100,17	100,21	100,24	102,27	94,11	93,91		93,88	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%	97,69	97,79	97,81	97,83	91,29	87,41	89,37		89,35	
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/	%	87,06	87,18	87,21	87,23	72,26	69,85	80,09		80,08	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Paket B/SMPLB											
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,03	0,02	0,01	0	0,13	0,41	-39,00	↓		▼
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,01	0,01	0,01	0	0,15	1,30	-129,0	↓		▼
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	■	100	●
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	99,23	100	100	■	100	●
Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	%	70,05	70,18	70,21	7,23	Tdk ada UN	Tdk ada UN				
Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	%	50,39	50,89	60,01	6,05	Tdk ada UN	Tdk ada UN				
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	97,83	97,95	97,98	98,01	92,42	76,47	78,05	↓	78,02	▶
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	72,78	72,99	73,05	73,08	93,03	94,49	129,35	■	129,30	●
Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	55,69	56,54	56,65	56,74	50,93	28,48	50,27	↓	50,19	▼
Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	91,42	91,53	91,55	91,57	34,93	29,69	32,43	↓	32,42	▼
Rasio guru/murid	%										
SD		22,74	22,86	22,89	22,91	20,94	20,52	89,65	↓	89,57	▶
SMP		29,74	29,84	29,87	29,89	18,18	18,09	60,56	↓	60,52	▼
<b>Program Pendidikan Non Formal</b>											
Penduduk usia >15 tahun melek huruf	%	91,87	91,95	91,98	91,99	97,24	97,32	105,81	■	105,79	●
Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti	%	5,22	5,38	5,43	5,49						



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
pendidikan Paket A/B/C											
<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</b>											
Guru yang memenuhi kualifikasi S1 /D-IV	%	94,34	94,43	94,45	94,48	95,63	94,26	99,80	↓	99,76	▶
Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1 /D-IV	%	52,58	52,61	52,65	52,69	65,38	60,30	114,53	■	114,44	●
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1 /D-IV	%	87,5	87,66	87,69	87,72	95,32	93,49	106,61	■	106,58	●
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1 /D-IV	%	92,95	93,05	93,09	93,13	96,61	96,13	103,27	■	103,22	●
<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>											
Prosentase Sekolah melaksanakan MBS dengan baik	%	98,51	99,49	99,75	100	100	100	100,25	■	100	●
Persentase PAUD terakreditasi	%	5,08	5,22	5,25	5,31	0	29,78	567,24	■	560,83	●

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD  
Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan  
Terpenuhi



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

## 2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan memiliki 13 program dengan 63 indikator program dan 5 indikator makro. Dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 26 indikator yang telah mencapai target tahun 2020, 38 indikator tidak mampu



mencapai target, dan 3 indikator tidak diketahui capaiannya. Indikator yang tidak diketahui target capainya sampai tahun 2020 yaitu Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan; Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; dan Pelayanan kesehatan balita.

Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup; Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran Hidup; Persentase balita gizi buruk; Angka Kematian Ibu; Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan; Rasio posyandu per satuan balita; Prevalensi balita gizi kurang; Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S); Cakupan pelayanan anak balita; Persentase Bayi 0–6 bulan mendapat ASI Eksklusif; Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin; Cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium; Persentase Balita usia 6–59 bulan mendapat kapsul vitamin A; Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi; Persentase BBLR; Cakupan Rumah Sehat; Cakupan penggunaan air bersih; Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate); Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus; Rasio dokter per satuan penduduk; Persentase tenaga kesehatan mempunyai izin; Jumlah RS tipe C yang dibangun; Cakupan puskesmas; Cakupan pembantu puskesmas; Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai; Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk; Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Cakupan kunjungan Ibu hamil K4; Cakupan pelayanan nifas; Pelayanan kesehatan pada usia produktif; Persentase penduduk yang mengetahui program JKN; TOI (turn Over Interval); BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur); NDR (NetDeath Rate); GDR (Gross Death Rate); Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD; BOR (Bed Occupancy Ration); dan AVLOS (Average Leght of Stay = Rata- rata lamanya pasien dirawat).

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 22 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD; 25 indikator yang akan mencapai target akhir RPJMD, 17 indikator yang memerlukan upaya keras dalam



mencapai target akhir RPJMD dan 3 indikator yang belum diketahui data realisasi hingga tahun 2020. Indikator yang hingga tahun 2002 masih memerlukan upaya keras yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup; Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran Hidup; Persentase balita gizi buruk; Rasio posyandu per satuan balita; Prevalensi balita gizi kurang; Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus; Jumlah RS tipe C yang dibangun; Cakupan pembantu puskesmas; Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk; Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Pelayanan kesehatan pada usia produktif; TOI (turn Over Interval); NDR (NetDeath Rate); GDR (Gross Death Rate); dan Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD.

Kematian bayi dan balita di Kabupaten Grobogan lebih banyak disebabkan oleh asfiksia. Dalam menekan angka itu, peningkatan skill tenaga kesehatan (nakes) juga perlu ditingkatkan dalam pemberian pertolongan persalinan maupun pascapersalinan. Persentase balita gizi buruk dan Prevalensi balita gizi kurang capaiannya perlu upaya keras disebabkan oleh akses pangan yang bergizi masih kurang khususnya pada penduduk miskin, dan akses gizi pada ibu hamil yang kurang.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, dan pelayanan kesehatan pada usia produktif capaiannya perlu upaya keras karena terpengaruh oleh kondisi Pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang enggan ke Puskesmas dan Rumah Sakit, sehingga pelayanan kesehatan tidak dapat optimal. Pencapaian beberapa indikator RSUD seperti TOI (turn Over Interval); NDR (NetDeath Rate); GDR (Gross Death Rate); dan Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD juga dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid-19.

Secara lebih rinci capaian indikator program urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.


















**Tabel 2.20**  
**Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan**





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

### Urusan Kesehatan

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Kesehatan											
Indikator Makro											
Angka usia harapan hidup	Tahun	–	74,36	73	73,1	74,44	74,75	102,40		100,42	
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	17,44	10,5	10	9,5	13,17	13,76	62,4		55,16	
Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran Hidup	per 1.000 KH	18,99	10,5	10	9,5	14,88	15,69	43,1		34,84	
Persentase balita gizi buruk	%	0,05	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	–100		(100,00)	
Angka Kematian Ibu	kasus	33	27	26	25	36	31	80,77		76,00	
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan											
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	100	100	100	97,46	97,46		97,46	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat											
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100		100,00	
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin yang sakit	%	100	100	100	100	100	100	100		100,00	
Program Pengawasan Obat Dan Makanan											
Jumlah kasus keracunan makanan	Kasus	28	< 18	< 15	< 12	2	0	100			
Persentase Penggunaan obat rasional di Puskesmas	%	60	75	80	85	87,72	81,34	101,68		95,69	
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat											



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	88,03	95	95	95	81,19	95,14	100,15		100,15	
Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Rasio posyandu per satuan balita	per 100 Balita	1,87	3,5	4	4,5	18,79	1,48	37,00		32,89	
Persentase Posyandu purnama dan mandiri	%	49,17	56	58	60	44,67	58,74	101,28		97,90	
<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>											
Prevalensi balita gizi kurang	%	7,6	5,3	5,2	5,1	0,8	0,83	15,96		16,27	
Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	82,81	100	100	100	85,88	77,72	77,72		77,72	
Cakupan pelayanan anak balita	%	80,07	95	95	95	94,46	83	87,37		87,37	
Persentase Bayi 0–6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	72,89	76	77	78	10,38	67,66	87,87		86,74	
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium	%	67,7	90	90	90	74	77,92	86,58		86,58	
Persentase Balita usia 6–59 bulan mendapat kapsul vitamin A	%	90,35	98	99	100	87,03	98,5	99,49		98,50	
Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi	%	95,5	98	99	100	88,9	89,03	89,93		89,03	
Persentase Balita dengan Kekurangan Energi dan Protein (KEP)	%	0,76	0,4	0,3	0,3	0,62	0,86	286,67		286,67	
Persentase BBLR	%	3,78	< 4	< 4	4	5,47	5,39				
<b>Program pengembangan Lingkungan Sehat</b>											



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Cakupan Rumah Sehat	%	79,59	80	85	90	62,97	84,14	98,99	↓	93,49	▶
Cakupan penggunaan air bersih		65	78	80	80	76,38	76,38	95,48	↓	95,48	▶
Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM	%	100	100	100	100	100	100	100,00	■	100,00	●
<b>Program Pencegahan Dan penanggulangan penyakit Menular</b>											
Persentase anak usia 0–11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100,00	■	100,00	●
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	29,3	76	78	80		32	41,03	↓	40,00	▼
Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS ( <i>success rate</i> )	%	95,74	98	99	100	92	94,69	95,65	↓	94,69	▶
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15–49 tahun	%	0,005	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,31	100	■	100	●
Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	%	53	85	90	95	100	100	111,11	■	105,26	●
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	80	100	100	100	100	7,76	7,76	↓	7,76	▼
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	80	100	100	100	100	61,8	61,80	↓	61,80	▼
<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>											
Cakupan Puskesmas Terakreditasi	%	3	30	30	30	30	100	333,33	■	333,33	●
Persentase Puskesmas yang telah memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP)	%	80	100	100	100	100	100	100,00	■	100,00	●
Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 pddk	15,76	19	20	21	16,11	16,03	80,15	↓	76,33	▶



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Persentase tenaga kesehatan mempunyai izin	%	92,5	100	100	100	66,31	99,91	99,91	↓	99,91	▶
Persentase Puskesmas non rawat inap dan rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	80	95	100	100	100	100	100,00	■	100,00	●
Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100,00	■	100,00	●
Jumlah RS tipe C yang dibangun	Unit	0	0	1	2	0	2 Type D	0	↓		▼
<b>Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.</b>											
Cakupan puskesmas		1,6	1,9	2	2	1,58	1,58	79	↓	79,00	▶
Cakupan pembantu puskesmas		0.25	0,5	0,6	0,7	0,28	0,28	46,67	↓	40,00	▼
Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	70	95	100,00	100	91,47	91,47	91,47	↓	91,47	▶
Rasio puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk	per 1.000 pddk	0.23	0,28	0,29	0,3	0,01	0,02	6,90	↓	6,67	▼
<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</b>											
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	50,78	75	80	85	100	35,35	44,19	↓	41,59	▼
<b>Program peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak</b>											
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99,95	100	100	100	100	100	100,00	■	100,00	●



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Cakupan kunjungan bayi	%	97,82	95	95	95	98,76	96,42	101,49		101,49	
Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	%	97	98	99	100	99,7	99,81	100,82		99,81	
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,78	100	100	100	87	92,92	92,92		92,92	
Cakupan pelayanan nifas	%	99,4	100	100	100	99,31	99,25	99,25		99,25	
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	93,44	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	79,28	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%	90	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	60	90	100	100	100	5,78	5,78		5,78	
<b>Program Jaminan Kesehatan Nasional</b>											
Persentase penduduk yang mengetahui program JKN	%	54,29	100	100	100	100	72,41	72,41		72,41	
<b>Program Bantuan Operasional Puskesmas</b>											
Persentase Puskesmas yang mempublikasikan laporan pemanfaatan BOK di Papan Pengumuman Puskesmas atau Kantor Kecamatan	%	80	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
<b>Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.</b>											
TOI (turn Over Interval)	Hari	1	1	1	1	3	4	25		41,67	
BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	Kali	72	75	75	75	56	47	62,67		85,07	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
NDR (NetDeath Rate)	‰	22	10	10	10	31	39	25,64	↓	32,68	▼
GDR (Gross Death Rate)	Kematian	41	25	25	25	53	71	35,21	↓	53,4	▼
Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	-	80	80	80	80	77,48	79,64	99,55	↓	46,82	▼
<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD RSUD)</b>											
BOR (Bed Occupancy Ration)	%	0,713	0,85	0,85	0,85	0,5532	51,07	60,08	↓	72	▶
AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	Hari	5	4	4	4	4	5	80	↓	95,24	▶
<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>											
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan	%	49,77	65	70	75	68,34					
<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>											
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	-	100	100	100	100					
Pelayanan kesehatan balita	%	80,07	95	100	100	94,4					

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD  
Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan  
Terpenuhi



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari 18 program dan 29 indikator. Terdapat beberapa program terkait dengan Pekerjaan umum dan penataan ruang yang tidak menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh merupakan tugas dari Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat. Program Pengaturan Jasa Konstruksi merupakan tugas dari Sekretariat Daerah, dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan tugas dari BPBD. Selain itu terdapat pula indikator program yang menjadi tugas dari dinas lain yakni indikator Persentase jumlah IMB yang diterbitkan merupakan tugas dari DPMPTSP dan indikator Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB merupakan tugas dari DLH

Terdapat 14 indikator yang telah mampu mencapai target tahun 2020 yaitu persentase capaian pada tahun 2020 mencapai 100% atau lebih, 8 indikator yang tidak mencapai target tahun 2020, dan 9 indikator yang belum bisa di hitung persentase capaiannya karena belum tersedia data hingga tahun 2020. Delapan indikator yang tidak tercapai hingga tahun 2020 yaitu Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik; Persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun; Cakupan pelayanan Sistem Drainase; Persentase turap/talud/bronjong di wilayah jalan penghubung kewenangan kabupaten terbangun; Durasi banjir untuk lokasi Lokasi banjir per hari; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang; Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan; Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan. Dan indikator yang belum di ketahui realisasi capaian hingga tahun 2020 yaitu Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik; Persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun; Cakupan pelayanan Sistem Drainase; Persentase turap/talud/bronjong di wilayah jalan penghubung kewenangan kabupaten terbangun; Durasi banjir untuk lokasi Lokasi banjir desa/kel; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang; Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan; Persentase





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 13 indikator yang telah berhasil mencapai target akhir RPJMD, 7 indikator yang akan mencapai target akhir RPJMD; 2 indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD, dan 9 indikator yang belum diketahui presentase capaian hingga akhir RPJMD karena belum tersedia data tahun 2020. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD meliputi indikator Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong terbangun dan Durasi banjir untuk lokasi Lokasi banjir per hari. Pencapaian kinerja dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran akibat refocussing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 pada tahun 2020.

Secara lebih rinci capaian indikator program untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.21**  
**Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>											
<b>Program pembangunan Jalan Dan Jembatan</b>											
Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	40,69	67,88	76,08	84,51	76,27	71	93,32	⬇	84,01	➡



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Persentase terhubungnya pusat- pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100		100	
Tingkat kualitas jalan lingkungan (jalan tanah menjadi perkerasan paving blok)	%	40	60	65	70	70		0		-	
<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong</b>											
Persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.	% penduduk	34	50	54	58	53	60	111,11		103,45	
	% genangan	19,10	13,1	11,6	10,10	12	10	86,21		99,01	
Cakupan drainase lingkungan dalam kondisi baik	%	58	62	63	64	65,117	65,4	103,81		102,19	
Cakupan pelayanan Sistem Drainase	%	40	50	52,5	55	48	50	95,24		90,91	
Panjang Saluran Drainase/Gorong- gorong terbangun	KM	1,20	3,06	3,06	17,85	9,544	10,744	351,11		60,19	
<b>Program Pembangunan turap/talud/ bronjong</b>											
Persentase turap/talud/bronjong di wilayah jalan penghubung kewenangan kabupaten terbangun	%	42,79	58,95	54,59	50,22	54,3	54,35	99,56		108,22	
<b>Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan</b>											
Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	%	14,68	19,3	20,68	20,15	24,4					
<b>Program Pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan</b>											



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Tingkat ketersediaan data jalan dan jembatan yang up to date	%	100	100	100	100	100	100	100		100	
<b>Program peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan</b>											
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan per tahun	%	100	100	100	100	100	100	100		100	
<b>Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.</b>											
Rasio Jaringan Irigasi	Km/Ha	0,017	0,017	0,017	0,017	0,018	0,018	105,88		105,88	
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	82	84,1	84,5	85	84,45	84,56	100,07		99,48	
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	%	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	100		100	
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah</b>											
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	64			85						
<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>											
Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	%	75			85,17						
<b>Program pengendalian Banjir</b>											
Persentase wilayah bebas banjir	%	65	76	78,00	80	85	85	108,97		106,25	
Durasi banjir untuk lokasi Lokasi banjir	hr	15	9	8	7	4	4	50,00		57,14	







## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
	Desa/Kel	10	8	7	7						
<b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b>											
persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	%	80	100	100,00	100	100	100	100		100	
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>											
Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	5	100	100	100	75	100	100		100	
<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>											
Persentase jumlah IMB yang diterbitkan	%	50	60	62,50	65						
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	25	45	50	55						
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	90,12	94,92	96,12		91,5	91,5	95,19			
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	14	18	19	20	17	17	89,47		85,00	
<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>											
Persentase Kawasan memiliki RTBL	%	0	100	100	100	50	100	100		100	
<b>Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau</b>											



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>dan Sumber Daya Air lainnya.</b>											
Tersedianya air embung untuk irigasi – pertanian	m3	110.676	130.676	135.676	140.676	252.000	252.000	185,74		179,14	
<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>											
Persentase Luas Bangunan / Gedung yang dibangun pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	%	30	40	42,50	45						
<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>											
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	14	18	19,00	20	17	17	89,47		85,00	
<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>											
Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	20			70						

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD  
Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan  
Terpenuhi



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

#### 4. Urusan Perumahan dan Permukiman

Urusan Perumahan dan Permukiman memiliki 3 program dengan 6 indikator program. Dibandingkan dengan target tahun 2020, terdapat 1 indikator yang telah tercapai dan 5 indikator yang tidak tercapai. Indikator yang tidak mencapai target tahun 2020 yaitu Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum; Persentase



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Berkurangnya Permukiman Kumuh di Perkotaan; Cakupan Rumah Layak Huni Yang terjangkau; dan Persentase ketersediaan PJU.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 3 indikator yang akan tercapai dan 3 indikator yang memerlukan upaya keras. Indikator yang masih perlu upaya keras yaitu Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum; Cakupan Rumah Layak Huni Yang terjangkau; dan Persentase ketersediaan PJU. Pencapaian indikator dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran untuk penataan lingkungan permukiman, penyediaan prasarana sarana utilitas umum, penanganan rumah tidak layak huni, dan penyediaan penerangan jalan umum akibat refocussing anggaran pada tahun 2020 untuk penanganan covid-19.

Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perumahan dan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.22**  
**Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Perumahan dan Permukiman**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>											
<b>Program pengembangan Perumahan</b>											
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum	%	58	60	60,5	70	12,5	16,67	27,55	⬇️	23,81	⬇️
<b>Program Lingkungan Sehat perumahan</b>											
Persentase Berkurangnya	%	0,054	0,018	0,009	0	0,009	0,003	99,98	⬇️	99,997	➡️



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Permukiman Kumuh di Perkotaan	Ha	77,32	17,32	7,32		22,69	19,04	95,4	↓	95,40	▶
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	58	60	60,5	70	62,20	62,54	103,372	■	89,34	▶
Cakupan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	25	40	45	50	16,57	16,66	37,02	↓	33,32	▼
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</b>											
Persentase ketersediaan PJU	%	60	88	94	100	12,64	13,26	14,10	↓	13,26	▼

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat memiliki 4 program dengan 11 indikator pendukung program. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 9 indikator yang telah tercapai yaitu persentase capaian hingga tahun 2020 telah mencapai 100% atau lebih dan 2 indikator yang tidak mencapai target tahun 2020, karena persentase capaiannya masih di bawah 100%. Indikator yang tidak tercapai hingga tahun 2020 yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten dan Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk.

Jika dilihat dari capaian akhir RPJMD, maka terdapat 8 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD dan 3 indikator yang akan mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang masih on the track yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten; Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk, dan Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi. Untuk lebih jelasnya capaian indikator kinerja program urusan Ketentraman,











## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.23**  
**Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>											
<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>											
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	61	80	83,00	85	79,17	91,67	110,45		107,85	
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	50	70	75,00	80	66,67	68,33	91,11		85,41	
<b>Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal</b>											
Persentase cakupan patroli petugas Satpol PP	%	67	80	83	85	72,22	88,89	107,10		104,58	





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>											
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	1,16	1,31	1,34	1,4	16,67	17	1.268,66		1.214,29	
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	62,40	62,4	62,4	62,40	0	60,2	96,47		96,47	
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	%	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,31	3.100,00		3.100,00	
Prosentase rasio petugas Linmas tiap RT di desa/kelurahan	%	0,98	1	1,0	1	100	1,04	104,00		104,00	
<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>											
Cakupan pelayanan bencana kebakaran dikabupaten/Kota	%	21,38	39,9	47,02	53,79	57,14	79,11	168,25		147,07	
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	%	45,5	65	70	75	66,1	83,05	118,64		110,73	
Persentase Aparatur Pemadam	%	0	70	90	100	70	90,00	100,00		90,00	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi											
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000–5000 Liter Pada WMK	%	21,05	42,1	47,36	52,63	66,66	83,31	175,91		158,30	

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD  
Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan  
Terpenuhi



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 6. Urusan Sosial

Urusan sosial yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan memiliki tujuan meningkatkan kualitas penanganan PMKS, dengan sasaran berkurangnya masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS. Indikator sasaran dari urusan sosial adalah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan urusan sosial memiliki 7 program utama yakni program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah sosial (PMKS) lainnya; Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; Program pelayanan dna rehabilitasi kesejahteraan sosial; program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; program pembinaan panti asuhan/ panti jompo; Program pembinaan eks-penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya); Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; dan program pembinaan anak terlantar. Dari 7 program tersebut kemudian dijabarkan menjadi 11 indikator program.

Dilihat dari capaian tahun 2020 terdapat 8 indikator yang tidak mampu mencapai target tahun 2020, dan 3 indikator telah mencapai target tahun 2020. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

terdapat 2 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir; 6 indikator berstatus akan mencapai target akhir dan 3 indikator perlu upaya keras dalam mencapai target akhir. Indikator yang perlu upaya keras dalam mencapai target akhir tersebut adalah Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial; Persentase Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina; dan Persentase anak terlantar yang dibina. Pencapaian indikator tersebut lebih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dalam penanganan PMKS, pemberian bantuan difokuskan pada penanganan dampak Pandemi Covid-19.

Secara lebih rinci perkembangan dan persentase capaian indikator program urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.24**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Sosial**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Sosial</b>											
Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang											



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>											
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	58,45	70,71	74,64	78,57	57,69	60	80,40	↓	76,37	▶
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	23,48	40,9	55	72,22	30	55	100	■	76,16	▶
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	23,33	70,58	76,47	87,5	70	76,47	100	■	87,39	▶
<b>Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>											
Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial	%	66	80	85	93	50	80	94,1	↓	86,02	▶



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
selama masa tanggal darurat											
Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0	70	75	85	50	70	93,3	↓	82,35	▶
<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma</b>											
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	2,76	5,6	6,53	7,46	19,88	1,05	16,07	↓	14,08	▼
<b>Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</b>											
Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	78,12	87,5	92,8	93,75	71	90	96,98	↓	109,09	●
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti	Lembag a	29	32	32	32	32	23	23	↓	65,71	▶



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
jompo dan panti rehabilitasi											
<b>Program pembinaan Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)</b>											
Persentase Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	18,42	28,19	32,89	37,59	28	11,61	35,3	↓	56,63	▼
<b>Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>											
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100	100	100	100	100	100	100	■	200,00	●
<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>											
Persentase anak terlantar yang dibina	%	5	10,02	12	14,8	8,016	–	–	↓		▼





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Perlu Upaya Keras



### 7. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan terdiri dari 3 program dan 14 indikator. Dibandingkan dengan 5 indikator masih belum diketahui realisasi capaiannya pada tahun 2020 sehingga belum bisa dilihat persentase capaian akhirnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 4 indikator yang telah mencapai target akhir RPJM, 4 indikator yang berstatus akan tercapai, 1 indikator berstatus perlu upaya keras dan 4 indikator masih belum diketahui persentase capaian hingga akhir RPJMD karena masih belum ada realisasi capaian tahun 2020.

Indikator yang kinerjanya perlu upaya keras adalah pencari kerja yang ditempatkan. Pencapaian kinerja ini sangat tergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan, dan pengaruh Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan.

Secara lebih rinci capaian kinerja program pada urusan ketenagakerjaan bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.25**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Ketenagakerjaan**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Tenaga Kerja</b>											
<b>Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>											
Pencari kerja yang ditempatkan	%	69,48	74,6	75,14	75,38	67,03	21,02	27,97		27,89	





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	44,44	48	50	52	44,72	40,02	80,04	↓	76,96	▶
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	63	71	73	75	71	73	100,00	■	97,33	▶
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	6,67	8	8,5	9	8	8,5	100,00	■	94,44	▶
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,22	4,21	4,2	4,19	3,59	4,5	107,14	■	107,40	●
<b>Program peningkatan Kesempatan Kerja</b>											
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	96,72	96,75	96,76	96,77	69,1	68,6	70,90	↓	70,89	▶
Rasio penduduk yang bekerja	%	72,29	82	85	87	74,44					
Angka sengketa pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	■	100,00	●
Tingkat pengangguran terbuka	%	4,25	4,21	4,2	4,19	3,59	4,5	107,14	■	107,40	●
<b>Program Perlindungan Dan</b>											



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan</b>											
Keselamatan dan perlindungan	%	90	100	100	100	95					
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	67					
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	50,5	60	65	66	96	88,28	135,82		126,11	
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	66,17	60	60	60						
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	49,72									

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri dari 4 program dan 18 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 5 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 yaitu persentase capaian hingga tahun 2020 telah mencapai 100% atau lebih dan 13



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

indikator mencapai tidak mencapai target hingga tahun 2020 yaitu persentase capaiannya kurang dari 100%.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 5 indikator telah mencapai target akhir RPJMD; 3 indikator berstatus akan mencapai target akhir RPJMD dan 10 indikator memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang memerlukan upaya keras meliputi Cakupan ketersediaan lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender; Kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif; Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian; Jumlah pernikahan usia anak; Angka Perceraian; Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS; Jumlah layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu; Jumlah penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Jumlah layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan Jumlah layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Jumlah pernikahan usia anak dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang cenderung menikahkan anak perempuan setelah selesai sekolah SMA dan faktor kemiskinan keluarga. Angka Perceraian disebabkan oleh tidak harmonisnya hubungan suami istri. Pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang masih rendah dipengaruhi oleh ketersediaan dan kompetensi SDM dalam penanganan korban kekerasan yang masih kurang.

Secara lebih rinci capaian kinerja program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.26**

### **Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>											
<b>Program peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak</b>											
Presentase kelembagaan PUG yang aktif	%	50	70	80	85	60	75	93,75	↓	88,24	▶
Cakupan ketersediaan lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender	lembaga	123	177	193	200	2	-	-	↓	-	▼
Kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	kasus	25	32	35	42	6	0	0	↓	-	▼
<b>Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>											
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	46,7	46,79	47,82	47,85	42,3	40,44	84,57	↓	84,51	▶










## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	Rupiah	6879150	7710087	7.987.066	8264045	0	-	-	↓	-	▼
Jumlah pernikahan usia anak	Jumlah	3170	2500	2400	2300	57	233	9,7	↓	10,13	▼
Angka Perceraian	Kasus	3225	6670	3650	3635	0		-	↓	-	▼
Lembaga aktif dalam peningkatan kualitas keluarga	lembaga	-	3	3	3	3	3	100	■	100,	●
Persentase forum anak aktif	%	0,42	0,63	0,8	0,7	0,54	1	125	■	142,86	●
<b>Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak</b>											
Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	110	135	125	98	42	90	72	↓	91,84	▶
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana	Jumlah	55	55	60	65	28	0	0	↓	-	▼



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
KtP/A dan PPT/PKT di RS.											
Jumlah layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah	22	42	47	52	30	0	0		-	
Jumlah penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Jumlah	5	12	14	16	12	0	0		-	
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	Jumlah	11	14	14	14	20	38	271,4 2		271,4 3	
Jumlah layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah	1	4	4	4	1	0	0		-	





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Jumlah layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah	1	6	7	10	6	0	0		-	
Jumlah layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah	6	12	16	20	42	90	562,5		450,	
<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>											
Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Jumlah	1	2	2	2	1	4	200		200,	

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD  
Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan  
Terpenuhi



Target Akhir RPJMD  
Perlu Upaya Keras

### 9. Urusan Pangan

Urusan pangan memiliki satu program utama yakni program peningkatan ketahanan pangan pertanian dan 8 indikator program. Dari



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

kedelapan indikator tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2020 semuanya telah memenuhi target yakni persentase capaian hingga tahun 2020 telah mencapai 100% atau lebih.







Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD semua indikator berstatus telah mencapai target akhir RPJMD yakni persentase capaian target akhir RPJMD telah mencapai 100% atau lebih. Secara rinci capaian kinerja program urusan ketahanan pangan bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.27**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Ketahanan Pangan**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Pangan											
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian											
Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kapita/hari	143	170	175	175	171	176	100,57	<div></div>	100,57	<div></div>
Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita/hari	105	110	115	115	108	117	101,74	<div></div>	101,74	<div></div>
Penguatan cadangan pangan	%	85,63	125	130	130	142	146	112,31	<div></div>	112,31	<div></div>
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,	<div></div>	100,	<div></div>
Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100,	<div></div>	100,00	<div></div>



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85	87	90	90	86	90,5	100,56		100,56	
Pengawasan dan pembinaan kemandirian pangan	%	100	100	100	100	100	100	100,		100,	
Penanganan daerah rawan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100,		100,	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 10. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan hidup memiliki 7 program dan 21 indikator. Dilihat dari perbandingan antara realisasi tahun 2019 dan target tahun 2020 secara keseluruhan indikator memiliki persentase capaian dengan status telah memenuhi target tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 9 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD yaitu persentase capaian hingga tahun 2020 telah mencapai 100% atau lebih.

Jika di bandingkan dengan capain target akhir RPJMD, 10 indikator yang berstatus telah mencapai target, dan 11 indikator beratus akan mencapai target akhir RPJMD. Secara lebih rinci capaian kinerja program RPJMD urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28

#### Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Lingkungan Hidup

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Lingkungan Hidup											



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>											
Prosentase jumlah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah standart 3 R	%	20	76	90	100	76	90	100		90,00	
Persentase pengurangan sampah diperkotaan	%	4,75	20	25	30	20	25	100		83,33	
Persentase Pengangkutan sampah	%	30	40	42	44	40	42	100		95,45	
<b>Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>											
Presentase Pemantauan status mutu air	%	44	77	88	100	77	88	100		88,00	
Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	20	50	60	60	50	60	100		100,00	
Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi	%	100	100	100	100	100	100	100		100,00	
Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati teknis pencegahan pencemaran air	%	80	90	93	95	90	93	100		97,89	
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100		100,00	
kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100		100,00	
Pencapaian predikat kota bersih / penghargaan Adipura	%	-	100	100	100	100	100	100		100,00	
<b>Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>											
Rasio cakupan penghijauan wilayah Konservasi dan rawa abrasi	%	100	100	100	100	100	100	100		100,00	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Rasio tutupan vegetasi terhadap seluruh wilayah	%	37,93	40,53	41,18	42	40,53	41,18	100		98,05	
Pengurangan Emisi GRK	%	54	34	29	24	34	29	100		120,83	
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup</b>											
Persentase ketersediaan dokumen SLHD	%	100	100	100	100	100	100	100		100,00	
<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>											
Jumlah usaha dan / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi pencegahan pencemaran udara	%	100	100	100	100	100	100	100		100,00	
Jumlah usaha dan / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan teknis pencegahan pencemaran udara	%	30	70	80	90	70	80	100		88,89	
Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi	%	40	85	100	100	85	100	100		100,00	
<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>											
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	14		19	20	16	19	100		95,00	
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>											
Persentase pengurangan sampah diperkotaan	%	4,75	20	25	30	20	25	100		83,33	
Persentase Pengangkutan sampah	%	30	70	75	80	70	75	100		93,75	
Persentase pengoperasian TPA	%	50	70	75	80	70	75	100		93,75	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD  
Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan  
Terpenuhi



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan memiliki 1 program yakni program penataan administrasi kependudukan dengan 6 indikator program pendukungnya. Dari keenam indikator tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 1 indikator telah mencapai target tahun 2020 dan masih ada 5 indikator yang tidak mencapai target tahun 2020 yakni Rasio Penduduk ber KTP; Rasio bayi ( 0 – 1 th ) ber akta kelahiran; Kepemilikan akta kelahiran; Ketersediaan data base kependudukan; dan Kepemilikan KK.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 1 indikator yang memerlukan upaya keras, 4 indikator yang berstatus akan akan mencapai target akhir dan 1 indikator berstatus telah mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir yakni indikator kepemilikan akta kelahiran. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29

#### Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Administrasi Kependudukan</b>											
<b>Program penataan Administrasi Kependudukan</b>											
Rasio Penduduk ber ktp	%	87,99	99	100	100	99,54	98,24	98,24		98,24	
Rasio bayi ( 0 – 1 th ) ber akta kelahiran	%	82	100	100	100	98,68	98,44	98,44		98,44	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Kepemilikan akta kelahiran	%	47,09	100	100	100	38,72	40,46	40,46		40,46	
Ketersediaan data base kependudukan	%	19	20	20	20	20	19,53	97,65		97,65	
Kepemilikan KK	%	98,76	100	100	100	99,4	99,48	99,48		99,48	
Kepemilikan akta kematian	jiwa	6.837	1769	1769	10.614	33.252	12.815	724,421		120,74	

Keterangan:



Target 2018 Tercapai



Target 2018 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Urusan pemberdayaan masyarakat memiliki 7 program utama dan 12 indikator. Dari 12 indikator tersebut dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 8 indikator telah mencapai target tahun 2020 dan masih terdapat 4 indikator yang tidak mencapai target tahun 2020 yakni Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK; LPM Berprestasi; Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat; dan Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 7 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD; 3 indikator berstatus akan mencapai target RPJMD dan 2 indikator berstatus memerlukan upaya keras. Indikator yang masih berstatus perlu upaya keras yaitu LPM Berprestasi dan Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin. Pemugaran perumahan penduduk miskin capaiannya rendah dipengaruhi keterbatasan anggaran karena adanya refocusing anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

**Tabel 2.30**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</b>											
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>											
PKK aktif	%	100	100		100	100	100	100		100	
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	13,57	54,28		81,42	64,2	57,78	85,16		70,97	
Posyandu aktif	%	95	100		100	100	100	100		100	
LPM Berprestasi	%	0,44	0,44		2,64	0,4	0,4	83,25		13,88	
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD)	%	13,57	54,28		81,42	54,9	67,77	100		83,23	
<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan</b>											



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDesa)	%	5,4	750		100	97,8	100	100		100	
<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>											
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	14,5	16,5		17,5	7,9	18,42	108		105	
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	5	5		5	4,145	4,12	82,40		82,40	
<b>Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan</b>											
Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	%	80	95		95	100	100	105		105	
<b>Program Pengembangan Data</b>											
Desa yang berprofil	%	87,14	100		100	100	100	100		100	
<b>Program Pengentasan Kemiskinan</b>											
Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin	%	0,14	2,53		4,75	0,7	1,09	33,22		22,87	
<b>Program Peningkatan</b>											



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
kapasitas aparaturn pemerintah desa											
RPJMDes	%	98,53	100		100	100	100	100		100	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

### 13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana memiliki 6 program dan 19 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 9 indikator yang belum mencapai target tahun 2020 dan 10 indikator telah mencapai target.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 8 indikator yang telah berhasil mencapai target akhir RPJMD; 8 indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD; dan 3 indikator memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD meliputi Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19 tahun) per 1000 perempuan usia 15–19 tahun; Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat; dan Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB). Pencapaian Angka kelahiran remaja dipengaruhi oleh masih banyaknya perkawinan usia dini. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) capaiannya masih rendah karena terbatasnya jumlah PLKB/PKB. Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat tergolong rendah disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam rangka penyediaan alat dan obat kontrasepsi.

Secara lebih rinci capaian indikator program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.31**



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

### Capaian Indikator Program Daerah Kabupaten Grobogan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>											
<b>Program Keluarga Berencana</b>											
Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2,39	2,33	2,31	2,29	2,23	2,31	100		100,87	
Rasio akseptor KB baru	%	108	98	99	100	64,87	98,64	99,64		98,64	
Cakupan peserta KB aktif	%	74,54	76,72	76,84	77,2	77,77	76,96	100,16		99,69	
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	%	1,93	1,87	1,85	1,83	8,2	8,1	437,838		442,62	
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	11,8	10,2	10	9,2	10,96	10,54	105,4		114,57	
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	1000 perempuan usia 15-19 tahun	18 / 1000	17,72/10	17,68/1000	17,64/1000	-	-	-		-	
Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan	%	71,54	71,72	71,84	72,2	77,77	76,96	107,127		106,59	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
menikah usia 15–49											
Cakupan KB Pria	%	1,34	1,47	1,58	1,66	1,8	1,14	72,15 19		68,67	
<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>											
Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	0	3	4	5	5	0	0		-	
<b>Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri</b>											
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	%	27,5	41,43	46,07	100	4,75	5,45	11,82 98		5,45	
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	%	1,06	1,07	1,07	1,07	1,13	1,1	102,8 04		102,8 0	
Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) aktif	%	1	1	1	100	1,13	100	100		100,	
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha	%	84	86	86	87	87,45	85	98,84		97,70	





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB											
<b>Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa</b>											
Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	92,11	97,37	100	100	184	100	100		100,	
<b>Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>											
Persentase desa/ kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif	Aktif	BKB 563,	BKB 567,	BKB 572,	BKB 576,	BKB 570,	556	97,2		96,53	
		BKR 259,	BKR 269,	BKR 274,	BKR 279,	BKR 252,	257	93,79		92,11	
		BKL 304	BKL 316	BKL 320	BKL 324	BKL 296	300	93,75		92,59	
<b>Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU</b>											
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	87,55	87,59	87,61	88	87,25	86	98,16 23		97,73	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Rasio BKB holistik	%	5	30	80	100	90	100	125		100,	

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD  
Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan  
Terpenuhi



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 14. Urusan Perhubungan

#### a. Terminal

Jumlah Terminal di Kabupaten Grobogan sebanyak 5 terminal dengan perincian sebagai berikut:

1. Terminal Induk Purwodadi di Jl. Gajah Mada, Purwodadi tipe B dengan pelayanan meliputi AKAP, AKDP, AngkDes, Angkota
2. Terminal Wirosari di Jl. Blora, Wirosari tipe C dengan pelayanan meliputi AKAP, AKDP, AngkDes
3. Terminal Gubug di Jl. Purwodadi-Semarang, Gubug tipe C dengan pelayanan meliputi AKAP, AKDP, AngkDes
4. Terminal Godong di Godong tipe C dengan pelayanan meliputi AKAP, AKDP, AngkDes Baik
5. Terminal Sulursari Sulursari, Gabus tipe C dengan pelayanan meliputi AKDP, AngkDes
6. Terminal Angkudes Jl. A. Yani, Purwodadi tipe C dengan pelayanan meliputi AngkDes, Angkota.

#### b. Fasilitas Keselamatan Jalan

Pencapaian kinerja indikator Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Grobogan mencapai sebanyak 80% pada tahun 2020, dan Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik sebesar 88% pada tahun 2020.

#### c. Uji Laik Kendaraan





Dinas Perhubungan memberikan layanan pengujian kendaraan bermotor. Persentase ketersediaan alat pengujian kendaraan bermotor yang laik operasi telah mencapai 100%.

**d. Angkutan Umum**

Di Kabupaten Grobogan ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota sebesar 92%. Presentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan laik jalan sebesar 98%. Pembangunan terkait dengan angkutan umum perlu peningkatan seiring dengan rencana penyediaan layanan transportasi umum massal penggaron-gubug/godong di Tahun 2021 untuk bisa dijadikan sebagai potensi pengembangan wilayah sehingga diperlukan dukungan untuk mengoptimalkan program provinsi terkait layanan umum massal yang direncanakan operasional di September 2021. Beberapa yang dapat dilakukan yaitu peningkatan/revitalisasi terminal tipe C yang dilewati trayek Trans Jateng, rerouting angkutan umum perdesaan/perkotaan yang diperankan sebagai feeder Trans Jateng, penyediaan park and ride, pembangunan shelter, sosialisasi keberadaan Trans Jateng, dan penciptaan daya tarik masyarakat luar daerah untuk berkunjung ke Grobogan.

Urusan perhubungan memiliki 5 program utama dan 9 indikator program. Dari ke-9 indikator tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 5 indikator yang telah mencapai target yaitu persentase capaian hingga tahun 2002 telah mencapai 100% atau lebih dan masih ada 4 indikator yang tidak memenuhi target tahun 2020. Empat indikator yang belum memenuhi target yakni Jumlah Terminal yang beroperasi; Rasio ijin trayek; Presentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum; dan Presentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan laik jalan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD hanya terdapat 3 indikator yang telah berhasil mencapai target akhir yakni Presentase ketersediaan terminal angkutan penumpang; Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan









## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Kabupaten/Kota; dan Presentase ketersediaan alat pengujian kendaraan bermotor yang laik operasi. Selanjutnya terdapat 4 indikator yang memiliki status akan mencapai target akhir. Dan ada 2 indikator yang masih memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang masih mempunyai status perlu upaya keras yaitu Rasio ijin trayek; dan Persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum. Pencapaian indikator Rasio ijin trayek dipengaruhi berkurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum seiring dengan adanya transportasi online. Ketersediaan halte dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran untuk penyediaan halte akibat refocussing anggaran.











Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.32**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Perhubungan**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target RPJMD			Realisasi		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020	Target Akhir RPJMD	2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Perhubungan											
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan											
Jumlah Terminal yang beroperasi	terminal	6	6	6	6	5	5	83		83	
Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang	%	100	100	100	100	100	100	100		100	
Rasio ijin trayek	Ratio	0,019	0,0220	0,0220	0,0230	0,0169	0,0000	0		0	





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target RPJMD			Realisasi		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020	Target Akhir RPJMD	2019	2020	%	Status	%	Status
Presentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum	%	50	75	75	75	0	0	0		0	
<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>											
Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	78	86	88	90	85	88	100		98	
<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>											
Presentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan laik jalan	%	85	97	99	99	90	98	99		99	
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	92	92	92	92	92	92	100		100	
<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>											
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	%	55	75	80	85	77	80	100		94	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target RPJMD			Realisasi		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020	Target Akhir RPJMD	2019	2020	%	Status	%	Status
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor											
Presentase ketersediaan alat pengujian kendaraan bermotor yang laik operasi	%	70	85	85	90	81	100	118		111	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika memiliki 3 program utama dan 13 indikator dalam RPJMD. Dari ke-13 indikator tersebut terdapat 8 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 yaitu persentase capaian hingga tahun 2020 telah mencapai 100% atau lebih dan 5 indikator yang tidak mencapai target tahun 2020 yaitu Jumlah penyiaran radio/TV Radio : kali; Jumlah penyiaran radio/TV Televisi : kali; Media massa seperti majalah, radio, dan televisi Majalah : kali / tahun; Media massa seperti majalah, radio, dan televisi Dialog radio : kali / tahun; dan Media massa seperti majalah, radio, dan televisi Siaran TV : kali / tahun.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 8 indikator yang telah mencapai target, 2 indikator akan mencapai target akhir RPJMD dan 3 indikator yang memerlukan upaya keras dalam memenuhi target akhir RPJMD. Indikator yang masih berstatus perlu upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD meliputi Jumlah penyiaran radio/TV Televisi : kali; Media



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

massa seperti majalah, radio, dan televisi Majalah : kali / tahun, dan Media massa seperti majalah, radio, dan televisi Siaran TV : kali / tahun. Pencapaian indikator tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dalam rangka penyiaran maupun desiminasi informasi.

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan komunikasi dan informatika bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.33**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Komunikasi dan Informatika**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Informasi dan Komunikasi</b>											
<b>Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa</b>											
Jumlah Jaringan komunikasi	SKPD	56	225	56	329	225	56	100,00		100,00	
Jumlah penyiaran radio/TV	Radio : kali	19	19	43	19	19	33	76,74		73,33	
	Televisi : kali	17	17	8	17	17	1	12,50		10,00	
<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>											
Prosentase SKPD yg punya Website	%	25	79	100,00	100	100	100,00	100,00		100,00	
<b>Program Kerjasama Informasi dan media masa</b>											
Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi											



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Nasional melalui :											
– Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	Majalah : kali / tahun	4	10	10	12	6	1	10,00	⬇️	8,33	⬇️
	Dialog radio : kali / tahun	31	43	43	45	21	33	76,74	⬇️	73,33	▶️
	Siaran TV : kali / tahun	4	6	8	10	5	1	12,50	⬇️	10,00	⬇️
– Media baru seperti website (media online)	setiap hari	3 kali Minggu	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	100,00	■	100,00	●
– Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	kali / tahun	1	3	0	3	2	0	100,00	■	100,00	●
– Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	kali / tahun / Kecamatan	1	1 kali/	1	1	2	1	100,00	■	100,00	●
		2	12 Kec.	4	19	2	4	100,00	■	100,00	●
– Media luar ruang seperti media bulletin, brosur, spanduk, baliho dll	kali / tahun	0	3	2	3	2	2	100,00	■	100,00	●
Pameran / Exspo	kali / tahun	0	2	0	3	1	0	100,00	■	100,00	●

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras





## 16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan kinerja program koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri dari 4 program dan 10 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 8 indikator yang telah mencapai target tahun 2020, yaitu persentase capaian target hingga tahun 2020 mencapai 100% atau lebih dan 2 indikator yang tidak memenuhi target tahun 2020. Indikator yang tidak memenuhi target tahun 2020 yaitu meliputi Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 5 indikator yang telah mencapai target; 3 indikator berstatus akan mencapai target dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD meliputi persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk dan Jumlah Koperasi. Pencapaian persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk yang rendah dipengaruhi oleh pembatasan event promosi produk seiring adanya Pandemi Covid-19. Jumlah koperasi capaiannya kurang dipengaruhi oleh kurangnya minat masyarakat membentuk koperasi karena manfaatnya kurang dirasakan oleh masyarakat.

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.34**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2018		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Koperasi dan UMKM											
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif											
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	73,71	93,7	92	90,5	96,3	96,6	105,		106,74	
Program pengembangan sistem pendukung usaha											



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2018		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>bagi usaha mikro kecil menengah</b>											
Jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM)	Unit	26.094	29000	29500	30.000	33.363	34.183	115,87		113,94	
persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,2	0,16	0,08	0,3	0,16	0,08	100,		26,67	
persentase UKM/Koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan			92	93	94	95,35	93,03	100,03		98,97	
% UKM yang mengakses permodalan	%	90	0,86	1,07	1,28	0,92	1,1	102,80		85,94	
% Koperasi yang mengakses permodalan	%	0									
<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>			645	663	684	513	527	79,49		77,05	
Jumlah Koperasi	Unit	481	91,2	92,2	93,22	47,15	44,97	48,78		48,24	
Persentase Koperasi Aktif	%	88	52	52,23	55	59,5	59	112,96		107,27	
Persentase KSP/USP Sehat	%										
<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</b>			15	16	18	16	16	100,		88,89	
Jumlah produk unggulan, andalan dan potensial daerah	Produk	11	93,7	92	90,5	96,3	96,6	105,		106,74	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

### 17. Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal dan perizinan terpadu memiliki 3 program dengan 13 indikator pendukung. Dari ke-13 indikator tersebut terdapat 4





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

indikator yang telah tercapai dan 9 indikator yang tidak mencapai target yaitu persentase capaian target kurang dari 100%.

Jika dilihat dari capaian target akhir RPJMD, terdapat 10 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD, 1 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam pemenuhan capaian RPJMD yakni Penerapan Sistem Manajemen Mutu 9001 : 2008 dan Implementasi sistem mutu ISO 9001 : 2008; dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pencapaian Implementasi sistem mutu ISO 9001 : 2008 dipengaruhi oleh sistem manajemen yang kurang tertata dengan baik dan kurangnya sarana prasarana dan kompetensi SDM.

Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 2.35**  
**Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan**  
**Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Penanaman Modal</b>											
<b>Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi</b>											
Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Jenis	0	1	1	1	1	1	100,		100,	
Jumlah fasilitasi pemerintah daerah	kali	1	1	1	1	1	0	-		100,	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
dalam rangka kerjasama kemitraan											
Jumlah promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	kali	3	3	3	3	3	1	33,33	↓	100,	●
<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>											
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)											
· PMA	Perusahaan	2	1	1	6	1	0	-	↓	116,67	●
· PMDN	Perusahaan	38	5	5	44	133	340	6.800,00	■	2.115,91	●
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)											
· PMA	ribu Us \$	2.500	1250	1.250	71430	47.468	0	-	↓	205,38	●
· PMDN	Juta Rp	2.960.092	389486	389.486	5884964	903.892	1.134.358	291,24	■	122,81	●
Jumlah perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal yang dikeluarkan BPPT	Jumlah	3605	3850	3900	3950	1530	2246	57,59	↓	377,70	●
Jumlah jenis perijinan dan non perijinan investasi yang dilayani BPPT	Jenis	50	52	52	52	72	75	144,23	■	138,46	●
Persentase waktu pelayanan PTSP ditetapkan maksimal 7 hari kerja	%	90	100	100	100	100	90	90,00	↓	90,00	▶
Penerapan Sistem Manajemen Mutu 9001 : 2008 dan Implementasi sistem mutu ISO 9001 : 2008	paket	1	1	1	1	0	0	-	↓	-	▼



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	X Rp1000	10.515	40.000	40.000	40000	0		-		-	
<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Investasi Daerah</b>											
Peta potensi investasi kabupaten Grobogan	buah	0	1	1	1	1	0	-		100,00	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga berada di bawah koordinasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata. Urusan kepemudaan dan olahraga memiliki 3 program dan 4 indikator. Dari ke 4 indikator tersebut terdapat 1 indikator yang telah tercapai dan 3 indikator yang tidak tercapai hingga tahun 2020. Indikator yang tidak tercapai pada tahun 2020 yaitu Jumlah kegiatan kepemudaan; Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan; dan Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 1 indikator yang telah mencapai target RPJMD, 2 indikator yang akan mencapai target RPJMD hingga tahun 2020 dan 1 indikator yang masih perlu upaya keras. Indikator yang berstatus masih perlu upaya keras yaitu indikator Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 pandemi covid-19 sehingga Tidak ada delegasi yang diberangkatkan. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan kepemudaan dan olahraga bisa dilihat pada tabel sebagai berikut ini.



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

**Tabel 2.36**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Pemuda dan Olahraga</b>											
<b>Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</b>											
Jumlah kegiatan kepemudaan	buah	14	16	16	16	16	11	68,75	↓	68,75	▶
Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan	%	20	30	30	30	37,5	0	-	↓	-	▼
<b>Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>											
Jumlah organisasi pemuda	buah	22	25	25	25	25	25	100,00	■	100,00	●
<b>Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda</b>											
Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	orang	883	950	975	1000	1000	950	97,44	↓	95,00	▶

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

### 19. Urusan Statistik

Urusan statistika berada dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyelenggaraan urusan statistika bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran Meningkatnya kualitas e- government, pengelolaan data/informasi dan arsip daerah, serta pengamanan informasi sandi. Indikator sasaran urusan statistik yakni persentase PD yang memiliki buku profil buku data statistik.

Indikator program urusan statistik terdiri dari 1 program yakni pengembangan data statistik. Pada program tersebut terdapat 2 indikator pendukung yang jika dibandingkan dengan target tahun 2020 maupun di bandingkan dengan target akhir RPJMD statusnya sudah mampu tercapai. secara rinci sebagai berikut ini.

**Tabel 2.37**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Statistik**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Statistik</b>											
<b>Program Pengembangan Data Statistik</b>											
Buku "kabupaten dalam angka"	%	100	100	100	100	100	100	100		100	
Buku "PDRB kabupaten"	%	100	100	100	100	100	100	100		100	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

### 20. Urusan Persandian

Urusan persandian berada dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyelenggaraan urusan persandian memiliki tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran Meningkatnya kualitas e- government, pengelolaan data/informasi dan arsip daerah, serta





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

pengamanan informasi sandi. Urusan persandian memiliki 1 program yakni program pengelolaan persandian dengan indikator persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan pada pihak terkait.

Pada tahun 2020 realisasi capaiannya jika dibandingkan dengan target tahun 2020 persentase capaiannya sebesar 100% dan artinya telah mencapai target. Sedangkan, jika dibandingkan target akhir RPJMD status capaiannya berstatus telah mencapai target akhir RPJMD dengan persentase capaiannya 100%. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan persandian bisa di lihat sebagaimana pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.38**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Persandian**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Persandian											
Program Pengelolaan Persandian											
Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan pada pihak terkait	%	89	99	100	100	99	100	100		100	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 21. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan yang ditargetkan dalam RPJMD memiliki 3 program yang dijabarkan dalam 6 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020, terdapat 2 indikator yang telah mencapai target hingga tahun 2020, 3 indikator tidak mencapai target tahun 2020 dan 1 indikator tidak tercapai karena event ditiadakan pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 yaitu Jumlah event budaya di tingkat regional dan nasional yang diikuti.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diketahui 2 indikator telah tercapai, 3 indikator masih berstatus perlu upaya keras dalam mencapai target RPJMD dan 1 indikator tidak dilaksanakan event pada tahun 2020 karena pandemi covid-19. Indikator yang memerlukan upaya keras yaitu Jumlah upacara adat tradisional yang dilestarikan baru mencapai 13,33% hingga tahun 2020; Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya baru mencapai 28,57%; dan Jumlah Misi Kesenian tidak terlaksana pada tahun 2020 karena ada Pandemi Covid-19.

Secara rinci capaian kinerja program urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.39**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Kebudayaan**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Kebudayaan											
Program pengembangan Nilai											



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Budaya</b>											
Jumlah upacara adat tradisional yang dilestarikan	jenis	0	3	3	15	60	2	66,67	↓	13,33	▼
<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>											
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	■	100	●
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	2	6	6	7	5	2	33,33	↓	28,57	▼
Jumlah Misi Kesenian	kali	2	3	3	3	3	0	-	↓	-	▼
Jumlah grup kesenian	kelompok	1.323	1400	1420	1435	1445	1867	131,48	■	130,10	●
<b>Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>											
Jumlah event budaya di tingkat regional dan nasional yang diikuti	event	3	3	3	18	3	0	-			

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

## 22. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan memiliki dua program dan 4 indikator di dalam RPJMD. Dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 1 indikator yang telah mencapai target dan 3 indikator yang tidak mencapai target hingga tahun 2020. Indikator yang tidak mencapai target hingga tahun 2020 yaitu Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun; Jumlah











## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Buku Koleksi perpustakaan Daerah; dan Jumlah Karya Rekam dan Karya Cetak yang dilestarikan.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 1 indikator yang telah tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD yaitu Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun; dan Jumlah Karya Rekam dan Karya Cetak yang dilestarikan. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah mengalami penurunan karena adanya pembatasan pengunjung dalam rangkaantisipasi penularan Covid-19.



Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.40**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Perpustakaan**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Perpustakaan</b>											
<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>											
Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	156	158	158	790	790	790	500		100	
Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun	Orang	20.250	25000	26.000	146000	44.807	11.077	43		8	
Jumlah Buku Koleksi perpustakaan Daerah	Judul	24.053	27453	28.303	29253	50.158	27.184	96		93	
<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi</b>											



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Bahan Pustaka											
Jumlah Karya Rekam dan Karya Cetak yang dilestarikan	Eks	200	200	200	200	21	21	11		11	

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD  
Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan  
Terpenuhi



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 23. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan yang ditargetkan dalam RPJMD terdiri dari 3 program yang dijabarkan dalam 3 indikator yaitu Persentase arsip yang terduplikasi; Jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku; dan Persentase sarpras kearsipan yang terpelihara.







Jika dibandingkan dengan target tahun 2020, semua indikator yang ditargetkan pada tahun 2020 semuanya telah tercapai yaitu persentase capaian hingga tahun 2020 telah mencapai 100% atau lebih. Dan jika dibandingkan dengan target RPJMD ketiga indikator urusan kearsipan semuanya telah mencapai target. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.41**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Kearsipan**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2018	2019	%	Status	%	Status



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2018	2019	%	Status	%	Status
<b>Urusan Kearsipan</b>											
<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>											
Persentase arsip yang terduplikasi	%	–	20	20	100	100	100	500		100	
<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan</b>											
Jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	10	10	10	50	100	100	1.000		200	
<b>Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</b>											
Persentase sarpras kearsipan yang terpelihara	%	–	10	10	50	50	50	500		100	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 24. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kinerja daerah urusan kelautan dan perikanan dilihat dari 3 program dan 9 indikator yang menjadi tolok ukurnya. Pada tahun 2020 terdapat 8 indikator yang telah tercapai dan masih ada 1 indikator yang tidak tercapai. Indikator yang tidak mencapai target hingga tahun 2020 yaitu indikator Cakupan bina kelompok nelayan, hingga tahun 2020 baru terealisasi sebesar 16 kelompok dengan target tahun 2020 sebesar 40 kelompok.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2021 terdapat 5 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD, 3



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

indikator yang akan mencapai target akhir RPJMD dan 1 indikator yang berstatus masih perlu upaya keras. 1 indikator yang masih perlu upaya keras yaitu indikator Tingkat cakupan bina kelompok ikan. Pada 2020 realisasi capaiannya sebesar 16,8% dengan target akhir RPJMD sebesar 90%, sehingga persentase capaian target akhir baru mencapai sebesar 18,67%. Pencapaian cakupan bina kelompok ikan dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran untuk pembinaan kelompok ikan.









Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.42**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Kelautan dan Perikanan**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Kelautan dan perikanan</b>											
<b>Program pengembangan Perikanan Tangkap</b>											
Produksi perikanan Tangkap	kg	934500	1.094.072	1.144.399	1201619	1.136.235	1.168.120	102,07		97,21	
Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	30	40	40	18	18	16	40,00		88,89	
Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	27	20	20,00	20	25	22,5	112,50		112,50	
<b>Program pengembangan Perikanan Budidaya</b>											
Produksi perikanan budidaya	kg	1890990	2.325.993	2.452.760	2587662	2.587.670	2.584.385	105,37		99,87	
Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	kelompok	20	35	40	45	37	50	125,00		111,11	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	75	15	15,00	90	25	16,8	112,00		18,67	
<b>Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi perikanan</b>											
Tingkat konsumsi makan ikan	kg/kep/th	14,43	17,27	17,98	15,38	17,22	17,98	100,00		116,91	
Jumlah produksi hasil olahan ikan	kg	284375	292990	295900	298880	293.000	298.950	101,03		100,02	
Jumlah usaha pengolahan ikan	Unit	80	86	88	88	88	88	100,00		100,00	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 25. Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata terdiri dari 3 program yang dijabarkan dalam 9 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 5 indikator yang telah tercapai, 2 indikator yang tidak mencapai sampai dengan target tahun 2020 dan 2 indikator tidak tersedia data hingga tahun 2020 sehingga tidak bisa menghitung persentasenya.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 3 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD; 4 indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD; dan 2 indikator masih belum diketahui realisasi data capaian hingga tahun 2020. Indikator yang belum diketahui data capaiannya hingga tahun 2020 yaitu Jumlah kajian pengembangan wisata dan Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD dipengaruhi oleh pengunjung pariwisata yang menurun karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD sektor pariwisata.



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.43**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Pariwisata**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Pariwisata</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>											
Kunjungan wisata	orang	206.896	300000	325.000	375.000	626.873	330.180	110,06		88,05	
Jumlah kajian pengembangan wisata	dokumen	0	3	3	3	3					
Jumlah regulasi bidang kepariwisataan (Perda dan Perbup)	Perda / Perbup	1	3	3	3	2	2	66,67		66,67	
Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,76	0,87	0,9	0,93	0,31	belum tersedia data PAD Grobogan sebagai perhitungan				
<b>Program pengembangan</b>											



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Destinasi Pariwisata</b>											
Jumlah destinasi wisata unggulan	unit	2	7	8	9	12	22	314,29		244,44	
<b>Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata</b>											
Jumlah restoran dan rumah makan	unit	32	40	45	50	38	40	100,		80,00	
Jumlah penginapan/hotel	unit	10	19	21	23	15	15	78,95		65,22	
Jumlah desa wisata	desa	6	19	21	23	12	26	136,84		113,04	
Jumlah Pokdarwis	kelompok	6	19	21	23	12	26	136,84		113,04	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 26. Urusan Pertanian

Urusan pertanian diampu oleh Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada urusan pertanian memiliki 3 bidang yakni pertanian, kehutanan dan peternakan yang terdiri dari 9 program dan dijabarkan dalam 39 indikator. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 19 indikator yang telah tercapai dan 24 indikator yang tidak mencapai target hingga tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat sebanyak 11 indikator yang akan mencapai target dan 14 indikator yang masih memerlukan upaya keras. Indikator yang masih memerlukan upaya keras yaitu Populasi komoditas peternakan utama (Kerbau), Angka kesakitan/morbiditas ternak (Kambing); Pengobatan ternak besar (sapi); Jumlah promosi produk peternakan; Pengembangan Biogas; Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Pertanian yang berbadan hukum; Produksi tanaman pangan (Kedelai); Jumlah



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

promosi komoditi pertanian dan hortikultura; Peningkatan kualitas pasca panen komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura; Jumlah kelompok tani yang mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; Jumlah aplikasi dan adopsi teknologi baru; Produksi tebu rakyat (ton tebu giling); dan kelompok petani tebu yang dibina (kelompok petani tebu).

Pencapaian populasi kerbau dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan sehingga berpengaruh terhadap minat peternak untuk memelihara kerbau. Produksi tanaman kedelai dipengaruhi biaya produksi yang tinggi dan berkurangnya minat petani untuk menanam kedelai. Beberapa indikator capaiannya rendah dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran karena refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19.

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.44**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Pertanian**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Pertanian</b>											
<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>											
Populasi komoditas peternakan utama											
– Sapi potong	ekor	178.555	193.274	197.139	201.082	193.292	198.158	100,52		98,55	
– Kerbau	ekor	2.457	2.660	2.713	2.767	1.696	1.780	65,61		64,33	
– Kambing	ekor	117.756	127.463	130.012	132.612	142.005	147.147	113,18		110,96	





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
- Domba	ekor	18.257	19.762	20.157	20.560	30.865	32.396	160,72		157,57	
- Unggas ( Ayam )	ekor	1.294.904	203.573	2.286.126	2.571.891	2.125.747	2.384.522	104,30		92,71	
Meningkatnya produksi daging (kg)											
- Sapi potong	kg	1.641.121	177.640	1.811.930	1.848.169	1.779.595	1.677.859	92,60		90,78	
- Kerbau	kg	113.120	122.445	124.894	127.391	76.640	44.480	35,61		34,92	
- Kambing	kg	737.300	798.077	814.039	830.320	1.071.900	1.072.993	131,81		129,23	
- Domba	kg	105.902	114.632	116.924	119.263	30.344	102.953	88,05		86,32	
- Unggas ( Ayam )	kg	1.872.516	202.687	2.067.409	2.108.757	1.513.364	1.408.225	68,12		66,78	
<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>											
Angka kesakitan / morbiditas ternak											
§ Sapi	ekor	1.174	900	850	800	916	587	69,06		73,38	
§ Kambing	ekor	670	550	500	450	247	162	32,40		36,00	
§ Unggas	ekor	2.860	2.000	1.900	1.800	6.800	1.500	78,95		83,33	
Angka Pengobatan ternak											
§ Vaksin AI (Ayam)	dosis	33.000	70.000	75.000	80.000	170.000	100.000	133,33		125,00	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
§ Desinfektan	liter	300	275	300	325	930	885	295,00		272,31	
§ Pengobatan ternak besar (sapi)	ekor	17.500	21.500	22.500	23.500	22.000	10.000	44,44		42,55	
<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi Peternakan</b>											
Jumlah promosi produk peternakan	kali	21	22	22	22	15	7			31,82	
<b>Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</b>											
Capaian Inseminasi Buatan Sapi Potong	Dosis	80.996	82.000	82.500	83.000	130.753	118.789	143,99		143,12	
Capaian Kelahiran hasil IB	ekor	45.000	49.500	50.000	50.500	55.486	43.629	87,26		86,39	
Pengembangan Biogas	unit	9	10	12	12	10	0	-		-	
<b>Urusan Pertanian</b>											
<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>											
Cakupan bina kelompok petani	Kelompok Tani	1600	1600	1.600,0	1600	1606	1606	100,38		100,38	
Jumlah kelompok	Kelompok	124	170	180,0	190	200	184	102,22		96,84	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
tani Utama	k Tani										
Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Pertanian yang berbadan hukum	LKM	0	90	100,0	110	6	6,0	6,00	↓	5,45	▼
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>											
Produksi tanaman pangan											
– Padi	Ton	764.148	780034	784.479,0	788.924	799.726	808.910	103,11	■	102,53	●
– Jagung	Ton	656.027	684991	690.738,0	695.584	771.837	771.957	111,76	■	110,98	●
– Kedelai	Ton	43.760	47304	48.040,0	50.108	13.429	10.709	22,29	↓	21,14	▼
<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>											
Jumlah promosi komoditi pertanian dan hortikultura	Kali	3	15	18,0	21	15	4,0	22,22	↓	19,05	▼
Peningkatan kualitas	%	5	10	12,0	15	5	6,0	50,00	↓	40,00	▼



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
pasca panen komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura											
Jumlah kelompok tani yang mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Kelompok Tani	1	10	15,0	20	7	8,0	53,33		40,00	
Jumlah kemitraan yang terjalin	Kelompok tani	10	14	15,0	16	19	21,0	140,00		131,25	
<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>											
Jumlah aplikasi dan adopsi teknologi baru	Unit	0	4	5,0	6	1	1,0	20,00		16,67	
<b>Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan</b>											
Produksi komoditas hortikultura											
– Bawang Merah	Kw	53.296	57.293	57.560,0	57.666	126.275	203.641	353,79		382,09	
– Cabe Besar	Kw	10.672	11.259	11.419,0	11.526	44.845	52.873	463,03		495,44	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
- Cabe Rawit	Kw	27.143	28.446	29.043,0	29.070	67.225	57.199	196,95		210,73	
- Melon	Kw	112.738	135.029	135.705,0	118.919	78.832	92.026	67,81		81,63	
- Semangka	Kw	126.066	13.083	13.476,0	137.469	207.518	249.101	1.848,48		197,60	
- Pisang	Kw	217.768	7.023	7.234,0	250.340	326.523	517.180	7.149,29		237,49	
- Jambu Air	Kw	11.913	399.787	411.780,0	14.149	12.077	52.953	12,86		444,50	
- Belimbing	Kw	6.370	117.924	118.375,0	7.596	15.868	22.689	19,17		356,19	
Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan											
Produksi tebu rakyat (ton tebu giling)	ton tebu giling	121.237,1	133.385,4	136.422,5	118.706,0	73.325,0	74.399	54,54		62,68	
Produksi tembakau (ton rajangan kering)	ton rajangan kering	2.578,9	2.769,1	2.832,5	1.197,8	4.198,0	4.565	161,17		381,13	
populasi tanaman kelapa (batang)	batang				234.264,0	133.320,0	131.750	84,42		83,88	
kelompok petani tebu yang dibina (kelompok petani tebu)	kelompok petani tebu	19,0	25,0	27,0	46,0		19,00	70,37		41,30	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 27. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan terdiri dari 5 program yang dijabarkan dalam 9 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020, 8 indikator telah tercapai dan 1 indikator yang tidak memenuhi target tahun 2020. Indikator yang tidak memenuhi target tahun 2020 yaitu indikator Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB. Pada tahun 2020 realisasi capainnya sebesar 20,09% dengan persentase capaian hingga tahun 2020 sebesar 86,89%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 6 indikator yang telah mencapai target akhir, dan 2 indikator yang akan mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang masih berstatus akan tercapai yaitu Persentase Pasar yang diawasi dan Tingkat Pengaduan yang ditangani. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.45**  
**Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Perdagangan**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Perdagangan											









## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan perdagangan</b>											
Persentase Pasar yang diawasi	%	15,17	15,8	16,00	16,5	15,8	16,00	100,00		96,97	
Tingkat Pengaduan yang ditangani	%	75	87	90,00	95	125	90,00	100,00		94,74	
<b>Program peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional</b>											
Produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	3	4	4	4	5	5	125,00		125,00	
<b>Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor</b>											
Perkembangan nilai ekspor	Rp. (000)	142.032.319	144.173.470	144.894.341	145.618.813	52.529.470.096	1.226.969.568.429	846.802,96		842.590,01	
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	20,56	22,55	23,12	23,65	21	20,09	86,89		84,95	
<b>Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri</b>											
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	12,5	24	28	30	85	90	321,43		300,00	
<b>Program pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan</b>											



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Asongan</b>											
Persentase lokasi PKL yang tertata	%	10,34	30	45,00	50	75	75,00	166,67		150,00	
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	43,75	56,25	62,50	68	70	75,00	120,00		110,29	
Jumlah pasar daerah	%	16	16	16	16	17	18	112,50		112,50	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 28. Urusan Perindustrian

Urusan perindustrian terdiri dari 5 program yang dijabarkan dalam 8 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 4 indikator program yang telah mencapai target tahun 2020 dan 4 indikator program tidak mencapai target tahun 2020.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 3 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD, 3 indikator akan mampu mencapai target di akhir periode, dan 2 indikator masih memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target RPJMD meliputi Pertumbuhan Industri, dan Persentase sentra industri yang berkembang. Pertumbuhan Industri dan persentase sentra industri yang berkembang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang belum membaik terdampak Pandemi Covid-19.

Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini.





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

**Tabel 2.46**  
**Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Perindustrian**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Perindustrian</b>											
<b>Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi</b>											
Cakupan pembinaan unit Usaha IKM	%	1,2	1,9	2	2,1	25	2,22	111,00		105,71	
<b>Program pembinaan dan pengembangan industri Kecil Dan menengah</b>											
Pertumbuhan Industri	%	1,27	1,32	1,33	1,35	1,27	0,78	58,65		57,78	
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,7	3,35	3,40	3,46	16,5	13,31	391,47		384,68	
Persentase industri kecil dan menengah	%	99,96	99,96	99,97	99,97	38,4	99,93	99,96		99,96	
Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran	%	0,02	0,19	0,19	0,21	75	0,59	310,53		280,95	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
promosi produk											
<b>Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dan Kemampuan Teknologi Industri</b>											
Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	73,5	88,23	94,12	94,12	47	62,5	66,40	⬇️	66,40	▶️
<b>Program Penataan Struktur Industri</b>											
Persentase sentra industri yang berkembang	%	83,58	87,59	88,69	89,42	40	49,12	55,38	⬇️	54,93	⬇️
<b>Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial</b>											
Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	15,09	16,56	16,59	16,75	20	16,7	100,66	■	99,70	▶️

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD  
Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan  
Terpenuhi



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 29. Urusan Transmigrasi

Urusan transmigrasi terdiri dari 2 program yang dijabarkan dalam 3 indikator, yaitu Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK); Jumlah perjanjian kerjasama (MoU) antar daerah kerjasama transmigrasi; dan Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU). Namun sampai dengan tahun 2002 masih belum diketahui realisasi capainnya sehingga masih belum di hitung persentase



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

capaian akhir tahun 2020 maupun akhir RPJMD. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47

### Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Transmigrasi

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Urusan Transmigrasi</b>											
<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>											
Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	KK	14	25	30	30	25					
Jumlah perjanjian kerjasama (MoU) antar daerah kerjasama transmigrasi	MoU	3	4	5	5	2					
<b>Program transmigrasi lokal</b>											
Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	Orang	14	25	30	30	30					

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 30. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan pembangunan terdiri dari 6 program dan 10 indikator. Program Pengembangan Data/Informasi terdiri dari indikator



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Persentase ketersediaan data perencanaan. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri dari indikator Jumlah hasil penelitian yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan; indikator Penataan Kelembagaan SIDA; dan indikator Penataan Jaringan SIDA. Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari indikator Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS, KUAP-PPASP, dan TapKin); indikator Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi; dan indikator Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri dari indikator persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah. Program perencanaan Sosial Budaya terdiri dari ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah. Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam terdiri dari indikator ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah.

Dilihat persentase capaian realisasi hingga tahun 2020 maupun target akhir RPJMD, terdapat 9 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dan 1 indikator yang tidak mencapai target hingga tahun 2020. Indikator yang tidak mencapai target hingga tahun 2020 yaitu indikator Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.48**  
**Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Perencanaan Pembangunan**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Perencanaan Pembangunan											











## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>											
Persentase ketersediaan data perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100		100	
<b>Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</b>											
Jumlah hasil penelitian yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan	dok	4	4	4	4	4	4	100		100	
Penataan Kelembagaan SIDA	unit	10	10	10	10	10	10	100		100	
Penataan Jaringan SIDA	Kecamatan	19	19	19	19	19	19	100		100	
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>											
Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD,	%	100	100	100	100	100	100	100		100	





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Renja, KUA-PPAS, KUAP-PPASP, dan TapKin)											
Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi	%	100	100	100	100	100	100	100		100	
Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	%	65	100	100	100	90	90	90		90	
<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>											
% ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100		100	
<b>Program perencanaan Sosial Budaya</b>											
% ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100		100	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam											
% ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100		100	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 31. Urusan Keuangan Daerah

Urusan Keuangan Daerah terdiri dari 4 program yang dijabarkan dalam 10 indikator pendukung. Dibandingkan dengan target tahun 2020, terdapat 4 indikator yang telah tercapai dan 6 indikator yang tidak mampu mencapai target. Indikator yang tidak tercapai yaitu Belanja Langsung terhadap total APBD; Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja; Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya; Rasio SILPA thdp Jumlah Pendapatan; Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi); dan Peningkatan PAD.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021, terdapat 5 indikator yang telah tercapai, 2 indikator yang on the track akan tercapai dan 3 indikator yang berstatus memerlukan upaya keras untuk mencapainya. Indikator yang masih berstatus perlu upaya keras yaitu Belanja Langsung terhadap total APBD; Rasio SILPA thdp Jumlah Pendapatan;



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

dan Peningkatan PAD. Capaian peningkatan PAD dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang kurang baik pada tahun 2020 terpengaruh oleh dampak Pandemi Covid-19, sehingga berpengaruh terhadap kinerja PAD.

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.49**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Keuangan Daerah**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Keuangan</b>											
<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>											
Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,		100,00	
Belanja Publik terhadap DAU	%	76,94	85,62	88,10	91,84	222,	234,03	265,65		254,82	
Belanja Langsung terhadap total APBD	%	39,22	39,53	39,81	40,13	21,4685	17,6335	44,30		43,94	
Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	%	89,03	94	95	95	88,69	78,49	82,62		82,62	
<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota</b>											
Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	%	12,74	7	6	5	7,00	5,28	88,04		105,64	
Rasio SILPA thdp Jumlah Pendapatan	%	12,76	10	11	12	6,36	5,44	49,42		45,30	
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan daerah</b>											





## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	13,52	13,91	15,01	16,2	13,35	14,15	94,24	⬇️	87,35	▶️
<b>Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah</b>											
Rasio pajak terhadap PAD	%	19,22	17,46	16,83	16,22	27,78	27,41	162,83	■	168,97	●
Peningkatan PAD	%	15,9	24,34	24,51	24,67	9,13	1,80	7,34	⬇️	7,29	▼
Tingkat Pengelolaan asset daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	■	100,00	●

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 32. Urusan Kepegawaian

Urusan kepegawaian terdiri dari 3 program dengan 12 indikator. Dari ke-12 indikator tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 5 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dan 4 indikator yang tidak mencapai target dan 3 indikator yang tidak dilaksanakan karena pandemi Covid-19, sehingga capaian targetnya tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan formal; Persentase pejabat yang telah mengikuti diklatpim (II, III dan IV); Persentase CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan sesuai dengan waktu yang ditentukan; Jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis fungsional; Persentase PNS berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya; Jumlah ASN yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi; dan Jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 5 indikator yang telah mencapai target akhir RPJM; 3 indikator yang masih on the track










## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

akan tercapai, dan 4 indikator yang perlu upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target RPJMD yaitu Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan formal; Persentase CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan sesuai dengan waktu yang ditentukan; Persentase PNS berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya; dan Jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya. Pencapaian kinerja dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran karena adanya refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19.

Secara rinci capaian kinerja program urusan kepegawaian bisa dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

**Tabel 2.50**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Kepegawaian**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Kepegawaian</b>											
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>											
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	54	75	75	75	100,00	100	133,33		133,33	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>											
Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan formal	ASN	15	27	29	30	14,00	10	34,48		33,33	
Persentase pejabat yang telah mengikuti diklatpim (II, III dan IV)	%	79	80	80	80	75,05	62,68	78,35		78,35	
Persentase CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan	%	100	100	100	100	100,00	0	-		-	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
sesuai dengan waktu yang ditentukan											
Jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis fungsional	ASN	188	300	300	300	80,00	203	67,67		67,67	
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>											
Persentase PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100	100	100	100,00	100	100		100	
Persentase PNS yang menerima SK pindah (mutasi) sesuai kebutuhan organisasi	%	100	100	100	100	100,00	100	100		100	
Persentase penerbitan SK pensiun tepat waktu	%	100	100	100	100	100,00	100	100,		100,	
Persentase PNS berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya	%	100	100	100	100	100,00	0	-		-	
Jumlah data pegawai yang di update	ASN	10577	2500	2500	2500	2.500,00	7964	318,56		318,56	
Jumlah ASN yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi	ASN	0	50	50	50	20,00	41	82,00		82,00	
Jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya	ASN	150	150	200	200	150,00	0	-		-	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras



### 33. Urusan Sekretariat Daerah

Urusan sekretariat daerah terdiri dari 6 program yang dijabarkan dalam 11 indikator, yaitu Persentase luas lahan bersertifikat; Penyelesaian izin lokasi; Penyelesaian kasus tanah Negara; Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda; Frekuensi peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan aparatur dan penilaian kecamatan sebagai penyelenggara paten; Jumlah perangkat kecamatan yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; Prosentase MoU kerjasama Daerah antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat serta dengan pihak ketiga yang difasilitasi oleh TKSD; Persentase desa / kelurahan yang dilakukan pembakuan rupa bumi; Persentase desa yang telah dilakukan pemeliharaan patok batas wilayahnya; Jumlah Rapat Koordinasi bagi pejabat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan yang terselenggara selama 1 tahun; dan Jumlah SKPD yang mengikuti rakor pejabat Pemda.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2020, ada 5 indikator yang belum di ketahui realisasi capainnnya yaitu Persentase luas lahan bersertifikat, Penyelesaian izin lokasi, Penyelesaian kasus tanah Negara, Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda dan Jumlah perangkat kecamatan yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga persentase capaian tahun 2020 maupun target akhir RPJMD maish belum di ketahui status capainnya. Dan untuk indikator lainnya persentase capaian tahun 2020 maupun persentase capaian target akhir RPJM sudah mencapaian terget yang telah di tetapkan. Secara lebih rinci capaian kinerja Program urusan sekrtariat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.51**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Sekretariat Daerah**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status







## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>											
Frekuensi peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan aparatur dan penilaian kecamatan sebagai penyelenggara paten	bulan	12	12	12	12	12	12	100		100,	
Jumlah perangkat kecamatan yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	orang	38	38	38	38	38	0				
<b>Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah</b>											
Prosentase MoU kerjasama Daerah antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat serta dengan pihak ketiga yang difasilitasi oleh TKSD	%	100	100	100	100	100	100	100		100,	
<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>											
Persentase desa / kelurahan yang dilakukan pembakuan rupa bumi	%	50	90	100	100	100	100	100		100,	
Persentase desa yang telah dilakukan pemeliharaan patok batas wilayahnya	%	0	62	81	81	81	81	100		100,	



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah</b>											
Jumlah Rapat Koordinasi bagi pejabat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan yang terselenggara selama 1 tahun	Keg	12	12	12	12	12	12	100		100,	
Jumlah SKPD yang mengikuti rakor pejabat Pemda	PD	32	32	32	32	32	32	100		100,	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 34. Urusan Sekretariat Dewan







Urusan sekretariat DPRD lebih fokus kepada legislasi daerah dengan program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Program tersebut memiliki 3 indikator utama yaitu indikator PERDA yang ditetapkan; indikator RAPERDA yang disetujui DPRD dan indikator Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti.

Dibandingkan dengan target tahun 2019 maupun target akhir RPJMD, terdapat 1 indikator yang telah tercapai dan 2 indikator yang tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu PERDA yang ditetapkan; dan indikator RAPERDA yang disetujui DPRD. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

**Tabel 2.52**  
**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan**  
**Urusan Sekretariat Dewan**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Legislasi Daerah											
Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah											
PERDA yang ditetapkan	Dok	10	15	15	15	8 dok	11 dok	73,33		73,33	
RAPERDA yang disetujui DPRD	Dok	16	75	75	75	44%	50%	66,67		66,67	
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Dok	45	100	100	100	100%	100%	100		100	

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD  
Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan  
Terpenuhi



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### 35. Urusan Pengawasan

Urusan pengawasan terdiri dari 2 program dan 6 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020 semua indikator berstatus belum mencapai target, yaitu realisasi hingga tahun 2002 belum mencapai 100%.













Sedangkan jika dibandingkan dengan target RPJMD, masih ada 5 indikator yang berstatus akan tercapai yaitu realisasi capaian hingga tahun 2020 belum mencapai 100% dan 1 indikator telah tercapai yaitu realisasi capaian hingga tahun 2020 telah mencapai 100%. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.53**



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

### Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pengawasan

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Pengawasan											
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH											
Persentase obyek pemeriksaan yang diperiksa	%	30	80	90	100	58,76	86,36	95,96%		86,36%	
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawas eksternal											
§ APIP	%	80	95	95	95	71,05	82,72	87,07%		87,07%	
§ BPK	%	80	95	95	95	84,26	85,57	90,07%		90,07%	
Persentase penurunan aduan masyarakat	%	60	40	35	30	22,12	31,4	89,71%		104,67%	
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan											
Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 1	Level 3	Level 4	Level 4	masih proses penilaian BPKP	Level 3	75%		75%	
Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 1	Level 3	Level 4	Level 4	masih proses penilaian BPKP	Level 3	75%		75%	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**



Target Akhir RPJMD  
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan  
Tercapai



Target Akhir  
RPJMD Perlu  
Upaya Keras

### **2.2 Permasalahan**

#### **1. Permasalahan Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada masing-masing urusan diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Pendidikan**

- (1) Masih kurangnya akses pendidikan terlihat dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah
- (2) Kurangnya kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
- (3) Kurangnya daya tampung PAUD dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah.
- (4) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan khususnya perpustakaan, laboratorium, dan media pembelajaran, dan teknologi komunikasi dan informasi.
- (5) Kurangnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar

##### **b. Kesehatan**

- (1) Masih tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian Bayi (AKB), angka kematian Balita (AKBa), dan prevalensi balita stunting
- (2) Meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular.
- (3) Belum semua Puskesmas dan Rumah Sakit terakreditasi, kurangnya sarana dan prasarana dan kualitas tenaga kesehatan
- (4) Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pola hidup bersih dan sehat

##### **c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- (1) Masih adanya infrastruktur jalan dan jembatan, drainase dan saluran irigasi dalam keadaan rusak.
- (2) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

##### **d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- (1) Masih adanya kawasan kumuh perkotaan dan rumah tidak layak huni
- (2) Akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang belum optimal.

##### **e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

- (1) Belum optimalnya penegakan pelanggaran Perda/Perkada dan penyelesaian pelanggaran K3.
- (2) Adanya potensi konflik yang perlu diantisipasi dengan baik



- (3) Belum optimalnya mitigasi, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana.
- f. Sosial**
  - (1) Kurangnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
  - (2) **Belum optimalnya pengelolaan taman makam pahlawan**
- g. Tenaga Kerja**
  - (1) Meningkatnya pengangguran sebagai dampak Pandemi Covid-19
  - (2) Kurangnya kompetensi tenaga kerja
  - (3) Masih rendahnya perlindungan terhadap pekerja/buruh
- h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
  - (1) Belum optimalnya pelembagaan PUG di tingkat daerah dan perangkat daerah.
  - (2) Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
  - (3) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - (4) Terbatasnya desa/kelurahan ramah anak
- i. Pangan:** Kurang optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan terlihat dari Skor Pola Pangan Harapan.
- j. Pertanian:** Belum optimalnya penyediaan lahan untuk pembangunan daerah.
- k. Lingkungan Hidup:**
  - (1) Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup terlihat dari capaian IKLH
  - (2) Kurangnya cakupan pelayanan sampah disebabkan sarana dan SDM yang terbatas
- l. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:** Kurangnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil (terutama KK, KTP dan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian)
- m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:** Belum optimalnya kualitas pelayanan pemerintah desa dan pengelolaan dana desa,
- n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:**
  - (1) Belum optimalnya partisipasi KB
  - (2) Belum optimalnya kelompok Tribina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.
- o. Perhubungan**
  - (1) Masih kurangnya, sarana dan prasarana lalu lintas seperti rambu-rambu, marka jalan, Warning Light, RPPJ, APILL, dan lainnya.
  - (2) Masih terjadinya kemacetan jalan dan kasus kecelakaan.



- (3) Belum optimalnya simpul transportasi (terminal) dan integrasi antar jaringan transportasi dan antar simpul.
- p. **Komunikasi dan Informatika:** Belum optimalnya jaringan komunikasi antar Perangkat Daerah (PD) untuk mendukung e-government dan pengembangan smart City.
- q. **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**
  - (1) Masih adanya koperasi yang tidak aktif dan koperasi yang tidak sehat.
  - (2) Kemandirian dan daya saing produk UMKM yang masih rendah
- r. **Penanaman Modal**
  - (1) Belum optimalnya investasi, dipengaruhi oleh kurangnya promosi dan kerjasama investasi, dukungan regulasi, kepastian hukum, dan sarana prasarana seperti jaringan jalan, listrik, dan air bersih.
  - (2) Belum optimalnya sistem OSS dalam pelayanan perizinan dan non perizinan, dan masih adanya jenis perizinan dan non perizinan investasi yang belum dilayani DPMPTSP
- s. **Kepemudaan dan Olahraga**
  - (1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga
  - (2) Kurangnya pembinaan yang berjenjang pada atlet yang berprestasi
  - (3) Masih kurangnya kualitas dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga
  - (4) Belum optimalnya kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, dan pembinaan organisasi pemuda.
- t. **Kebudayaan:** Belum optimalnya perlindungan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- u. **Statistik:** Pengembangan portal satu data statistik sektoral belum optimal.
- v. **Persandian:** Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi
- w. **Perpustakaan:**
  - (1) rendahnya minat baca masyarakat, terlihat dari jumlah kunjungan perpustakaan daerah yang masih terbatas.
  - (2) Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan (terutama gedung dan mobil perpustakaan), dan kemampuan teknis petugas perpustakaan.
- x. **Kearsipan:** Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku di perangkat daerah.
- y. **Kelautan dan Perikanan**
  - (1) Belum optimalnya produksi perikanan.
  - (2) Kurangnya keterampilan pelaku usaha perikanan (pembudidaya, nelayan, dan pengolah & pemasar hasil perikanan).



**z. Pariwisata**

- (1) Kurangnya kunjungan wisata, lama tinggal wisatawan dan rata-rata pengeluaran wisatawan
- (2) Belum berkembangnya usaha ekonomi kreatif

**aa. Pertanian**

- (3) Masih kurangnya produksi pertanian dan perkebunan.
- (4) Masih kurangnya penerapan modernisasi pertanian, penerapan teknologi ramah lingkungan, penerapan pola tata tanam yang tepat untuk mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani.
- (5) Belum optimalnya produksi peternakan

**bb. Perdagangan**

- (1) Belum semua pasar memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan.
- (2) Perlunya pemantauan terhadap fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- (3) Sebagian konsumen/ pelaku usaha belum menyadari akan pentingnya tera dan tera ulang.
- (4) Masih adanya barang-barang di toko, pasar dan toko modern yang tidak sesuai dengan ketentuan (pelabelan, standar kadaluwarsa)
- (5) Belum optimalnya penggunaan produk lokal (cinta produk dalam negeri)

**cc. Perindustrian**

- (1) Kurangnya pertumbuhan dan daya saing industri kecil dan menengah
- (2) Masih banyaknya industri mikro dan kecil yang belum memiliki izin usaha dan memenuhi standar kelayakan produksi (SNI, ISO dan lain).

**dd. Transmigrasi** : Terbatasnya pemberangkatan transmigran dipengaruhi oleh alokasi pemberangkatan transmigran yang tidak sebanding dengan peminat transmigrasi, dan lokasi lokasi transmigrasi yang tidak sesuai keinginan calon transmigran.

**ee. Fungsi perencanaan pembangunan**: Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah.

**ff. Fungsi pengawasan:**

- (1) Masih adanya temuan pemeriksaan baik oleh Inspektorat Daerah maupun oleh BPK yang tidak ditindaklanjuti.
- (2) Kurangnya kuantitas dan kapasitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah).
- (3) Belum optimalnya tingkat maturitas SPIP dan implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) di seluruh perangkat daerah.



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

---

gg. **Fungsi keuangan daerah:** Belum optimalnya pertumbuhan pendapatan asli daerah dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mempertahankan Opini WTP dari BPK.

hh. **Fungsi kepegawaian**

- (1) Masih adanya pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi Jabatan
- (2) Masih kurangnya profesionalitas dan kompetensi ASN
- (3) Belum optimalnya penempatan pegawai berbasis merit system

ii. **Fungsi sekretariat DPRD**

- (1) Belum optimalnya fungsi Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD

jj. **Fungsi Sekretariat Daerah**

- (1) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- (2) Belum optimalnya inovasi dan kualitas pelayanan publik Pemerintah daerah
- (3) Masih kurangnya kinerja BUMD dalam pelayanan publik dan peningkatan kontribusi pendapatan dari laba perubahan.

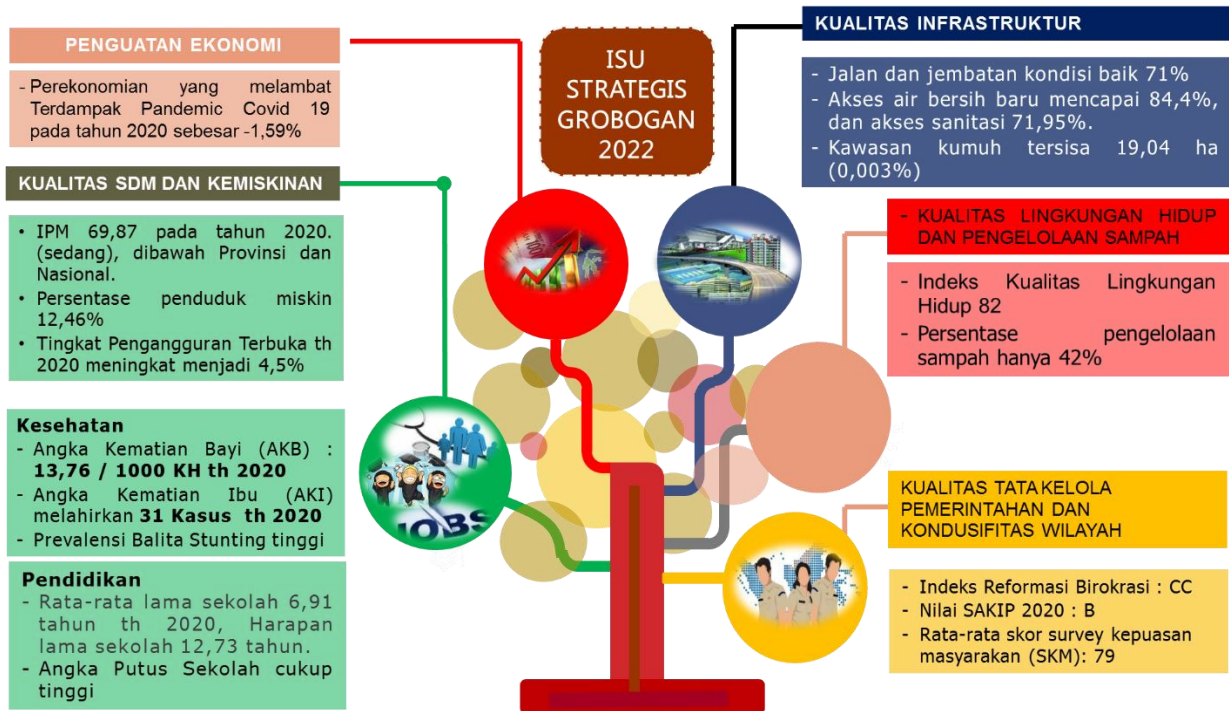
## **2. Permasalahan Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran RKPD (Isu Strategis Daerah) Tahun 2022**

Perumusan isu strategis daerah tahun 2022 didahului dengan telaah terhadap isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021–2026, isu strategis dalam RKP Nasional Tahun 2022, isu strategis dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Isu strategis daerah yang diangkat dalam RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi
2. Kualitas Infrastruktur
3. Kualitas Sdm Dan Kemiskinan
4. Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah
5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Kondusifitas Wilayah



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022



Gambar 2.27 Isu Strategis Kabupaten Grobogan Tahun 2022



### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

#### **3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional**

Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen berkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang berkontraksi sebesar 14,71 persen.

Pertumbuhan ekonomi triwulan tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,19 persen, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Faktor yang menjadi pendorong perbaikan adalah relaksasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah. Sebagian aktivitas masyarakat, seperti aktivitas perkantoran, produksi, dan pariwisata dapat mulai berjalan kembali, meski masih di bawah kondisi sebelum pandemi. Kembali berkontraksinya pertumbuhan ekonomi memastikan Indonesia mengalami resesi.

Hampir semua provinsi mengalami kontraksi pada tahun 2020, kecuali Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah. Pertumbuhan Ekonomi 2020 didorong oleh Kawasan Timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulawesi didorong oleh pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah seiring dengan meningkatnya produksi baja dan besi. Pertumbuhan di Maluku dan Papua didorong oleh pertumbuhan positif di Maluku Utara (seiring dengan beroperasinya smelter pirometalurgi) dan Papua (seiring dengan peningkatan produksi tembaga). Kontraksi di Wilayah Jawa disebabkan oleh





kontraksi pada sektor transportasi & pergudangan serta akomodasi mamin akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas penduduk akibat pandemi. Kontraksi pertumbuhan di pulau Bali – Nusra disebabkan oleh kontraksi yang dalam di Provinsi Bali (–9,3 persen, yoy) seiring dengan tekanan yang besar di sektor pariwisata sebagai dampak pembatasan mobilitas akibat pandemi. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatera disebabkan oleh dalamnya kontraksi di provinsi Kepulauan Riau (–3,8%, yoy) seiring dengan turunnya kinerja sektor transportasi & pergudangan. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan disebabkan oleh penurunan kinerja industri di seluruh provinsi Kalimantan. Kontraksi di Wilayah Jawa disebabkan oleh kontraksi pada sektor transportasi & pergudangan serta akomodasi mamin akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas penduduk akibat pandemi.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2021 diproyeksikan sebesar 5,0%. Dilihat dari Konsumsi rumah tangga, meningkatnya pengangguran dan turunnya pendapatan pekerja akan berdampak pada lambatnya pemulihan konsumsi rumah tangga, meski alokasi bansos yang masih besar akan membantu. Dari sisi investasi/PMTB. Pada tahun 2021, investasi masih lemah disebabkan oleh: tingginya ketidakpastian karena COVID–19 masih tinggi akan menahan investasi, kapasitas produksi yang saat ini masih pada kisaran 70%, neraca perusahaan, baik domestik maupun global, yang masih mengalami tekanan, dan potensi realokasi belanja modal lebih besar, untuk pemenuhan kebutuhan vaksin. Konsumsi pemerintah pada tahun 2021 diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan program vaksinasi dan stimulus PEN yang direncanakan masih besar. Ekspor diperkirakan akan mengalami akselerasi pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi global yang didorong oleh China dan negara maju yang telah memulai program vaksinasinya. Kinerja impor diperkirakan masih lemah seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang masih berjalan.

Prospek perekonomian nasional tahun 2022 diharapkan semakin membaik. Dari sisi konsumsi rumah tangga, pada tahun 2022, ketika COVID–19 mulai terkendali, tingginya saving masyarakat kelas





menengah atas akan menjadi pendorong akselerasi konsumsi RT. Akselerasi terutama akan terjadi pada konsumsi leisure – transportasi dan pariwisata. Konsumsi masyarakat bawah masih akan tetap dibantu melalui bansos meski menurun jumlahnya. Pada tahun 2022, dorongan investasi akan bersumber dari terkendalinya COVID-19 seiring dengan selesainya vaksinasi dan dampak reform yang dilakukan (implementasi UU ciptaker & SWF). Dorongan investasi juga didorong oleh tingginya likuiditas di sektor perbankan, yang memungkinkan kredit untuk tumbuh tinggi. Bantuan tetap perlu diberikan kepada dunia usaha untuk bisa mengakselerasi proses pemulihan. Project infrastruktur pemerintah kembali berjalan normal. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan semakin melamban. Namun kinerja ekspor diperkirakan akan mampu terjaga didorong oleh peningkatan ekspor jasa yang mulai akan kembali pulih secara perlahan seiring dengan vaksinasi yang sudah meluas dan terkendalinya COVID-19. Kinerja impor meningkat tajam seiring dengan peningkatan permintaan domestik. Pada tahun 2022, konsumsi pemerintah melambat seiring dengan konsolidasi fiskal. Dorongan belanja stimulus akan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 3.1**

**Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Jangka Menengah 2020–2022**

Pertumbuhan YoY (Persen)	Realisasi	Proyeksi	Proyeksi
	2020	2021	2022
PDB	-2,1	5,0	5,4 – 6,0
Konsumsi Rumah Tangga	-2,6	4,7	5,2 – 5,8
Konsumsi LNPRT	-4,3		
Konsumsi Pemerintah	1,9	6,2	2,8 – 4,2
Pembentukan Modal Tetap bruto	-4,9	6,4	6,4 – 7,2



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Ekspor Barang dan Jasa	-7,7	4,5	6,3 – 6,7
Impor Barang dan Jasa	-14,7	5,9	8,2 – 9,2

Sumber: Materi Paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pembukaan Masa Musrenbang dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

### **3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 dan 2022 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2020. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan 2022 didorong oleh seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong keyakinan konsumen yang membaik disertai masuknya hari besar keagamaan nasional. Sementara, peningkatan investasi sejalan prospek investasi pabrik baru dan akselerasi pembangunan proyek strategis. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut secara gradual. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter Bank Indonesia. Dari sisi mobilitas, perkembangan terakhir menunjukkan mobilitas masyarakat Jawa Tengah mengalami peningkatan saat pelonggaran pembatasan sosial dilakukan.

Dari sisi pengeluaran, perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2021 dan 2022. Konsumsi rumah tangga meningkat di tengah bulan puasa dan hari raya Idulfitri, serta hari besar keagamaan lainnya. Keyakinan konsumen pun membaik didorong agresivitas pemerintah dalam mendistribusikan vaksin. Konsumsi nonpangan bergerak lebih tinggi karena ada dukungan



keringanan pajak penjualan kendaraan. Prospek investasi pabrik baru yang mengarah ke kawasan industri, diperkirakan akan mulai dibangun pada tahun 2021. Selain itu, pembangunan proyek strategis nasional akan semakin intens dilakukan, demi mengejar target percepatan pembangunan. Ekspor luar negeri akan semakin meningkat seiring permintaan global yang semakin baik.

Konsumsi diperkirakan meningkat pada 2021 dan 2022 sejalan perbaikan pendapatan dan keyakinan masyarakat. Perkiraan konsumsi rumah tangga yang membaik didukung oleh perbaikan sisi pendapatan yang antara lain bersumber dari keberlanjutan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial pada 2021 yang menopang daya beli masyarakat. Daya beli juga ditopang oleh kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2021 bervariasi mulai 0,75% hingga 3,68%, yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah pada November 2020. Pemulihan konsumsi turut didukung oleh optimisme konsumen yang membaik, terutama optimisme perbaikan pendapatan yang tercermin antara lain dari peningkatan indeks ekspektasi konsumen sebesar 133,4 pada Januari 2021. Selain itu, ekspektasi masyarakat juga membaik seiring optimisme vaksinasi yang meluas di akhir 2021 dan terselesaikan pada april tahun 2022.

Pemulihan investasi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut pada 2021 dan 2022. Investasi berpotensi meningkat seiring membaiknya indeks ekspektasi kegiatan usaha di Januari 2021 menjadi 116,3, termasuk pembangunan infrastruktur lainnya. Daya saing investasi Jawa Tengah yang cukup baik bersumber dari tenaga kerja yang kompetitif dan kawasan industri di berbagai daerah. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) menargetkan pembangunan investasi baru di kawasan industri di Jawa Tengah terjadi di triwulan II 2021. Hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan keyakinan berusaha sehingga mendorong investasi yang juga berperan penting dalam penyerapan lapangan kerja dan perekonomian Jawa Tengah. Perbaikan kinerja investasi pada 2021 dan 2022 turut ditopang oleh berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur setelah sempat tertunda pada 2020. Pembangunan proyek infrastruktur 2021 dan 2022 akan difokuskan pada infrastruktur



konektivitas dan pelayanan dasar seperti pembangunan bendungan, jalan tol, serta pembangkit listrik.

Perbaikan kinerja ekspor turut mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi Jawa Tengah pada 2021 dan 2022. Perbaikan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut pada negara tujuan ekspor Jawa Tengah, mendorong perbaikan ekspor. Perkiraan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global yang lebih baik, mengindikasikan prospek permintaan global yang meningkat. Optimisme peningkatan ekspor tersebut sejalan dengan karakteristik komoditas ekspor Jawa Tengah yang memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, furnitur, hingga makanan. Seperti ekspor komoditas alas kaki yang sedang dalam tren meningkat didorong aktivitas event olahraga berskala internasional yang berlangsung dalam periode mendatang.

Lapangan usaha utama seperti industri pengolahan; konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, akan membaik. Sejalan dengan pemulihan permintaan domestik dan global, produksi industri Jawa Tengah diperkirakan mengalami peningkatan baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Pelaku usaha mencatat peningkatan permintaan yang bersumber dari penundaan order di 2020, semakin tinggi di tahun 2021. Dengan akselerasi produksi industri, sektor perdagangan juga akan meningkat. Tidak hanya bersumber dari perdagangan luar negeri, peningkatan juga didorong peningkatan konsumsi domestik di wilayah Jawa Tengah dan provinsi lain mitra dagang. Aktivitas konstruksi diperkirakan akan meningkat di awal tahun seiring mulai bergeraknya pembangunan infrastruktur.

Lapangan usaha terdampak COVID-19 diperkirakan akan membaik di tahun 2021-2022. Lapangan usaha industri pengolahan menjadi motor utama perbaikan ekonomi. Permintaan global dan domestik yang membaik, membuat produksi industri utama Jawa Tengah meningkat. Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), furnitur, makanan dan minuman, dan farmasi, akan tumbuh lebih baik. Permintaan domestik dari produk TPT untuk kebutuhan penanganan COVID-19 akan berlanjut, antara lain masker, alat pelindung diri, dan produk pendukung bantuan sosial.



Relokasi pabrik ke Jawa Tengah akan semakin menambah peningkatan produksi industri pengolahan Jawa Tengah.

Perbaikan industri dan pergerakan masyarakat, mendorong perbaikan sektor perdagangan. Perdagangan kendaraan bermotor akan kembali menggeliat setelah penurunan yang terjadi pada tahun 2020. Penjualan kebutuhan tersier tersebut didukung kebijakan pemerintah berupa diskon pajak penjualan barang mewah (PPnBM) pada golongan kendaraan tertentu. Sektor ritel akan membaik tidak hanya dari komoditas makanan dan minuman, tetapi juga komoditas sandang dan peralatan rumah tangga. Perdagangan alat kesehatan disertai obat-obatan, diperkirakan masih akan meningkat di tahun 2021 dan 2022.

Selanjutnya, lapangan usaha konstruksi juga membaik di 2021 dan 2022. Meningkatnya aktivitas konstruksi terutama bersumber dari pembangunan proyek infrastruktur. Pembangunan yang tertunda di tahun 2020 akan dilaksanakan di tahun 2021 dan 2022. Selain dari sektor pemerintah, pihak swasta juga diperkirakan meningkatkan aktivitas investasi bangunan. Pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi, akan banyak dilakukan pada industri unggulan Jawa Tengah.

Pemulihan ekonomi secara gradual, akan memberikan dampak positif terhadap pariwisata Jawa Tengah. Sektor transportasi akan meningkat di tahun 2021 dan 2022 seiring pulihnya sektor pariwisata, konsumsi domestik, dan perjalanan bisnis. Destinasi wisata diperkirakan akan semakin ramai di tahun 2021 dan 2022 sehingga meningkatkan tingkat hunian hotel dan restoran. Peningkatan kinerja akomodasi tidak hanya bersumber dari wisatawan, tetapi juga dari pebisnis yang meningkatkan aktivitas ekspansi usahanya di 2021 dan 2022 serta kegiatan meeting, incentive, convention and exhibition (MICE) lainnya.

Kehadiran vaksin COVID-19 menjadi penting di tahun 2021 dan 2022 sehingga dapat meminimalkan tingkat kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas. Stimulus yang dilakukan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan menjadi faktor pendukung dan berpengaruh positif pada perekonomian 2021 dan 2022.



Namun demikian beberapa risiko yang perlu diwaspadai berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian antara lain: (i) efektifitas vaksin dalam membangun *herd immunity* di bawah perkiraan sehingga berdampak pada mobilitas dan produktivitas rumah tangga; (ii) kebijakan pembatasan sosial di global dan domestik, berlangsung lebih lama dari perkiraan; (iii) terbatasnya konsumsi barang tahan lama dan rekreasi pada masyarakat golongan menengah atas; serta (iv) dampak sosial yang meluas akibat penurunan pendapatan sehingga meningkatkan angka kriminalitas.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada tahun 2021 dan 2022 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, Dan Tembakau; Kelompok Transportasi; serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya.

Secara rinci proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2022 tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**

**Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2021–2022**

No	Indikator	Proyeksi Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	3,93–5,20
2	Inflasi (Persen)	3,0±1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,96–5,88
4	Kemiskinan (Persen)	71,42–10,27
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,43
6	Nilai Tukar Petani	103,56

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah*

### **3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan**

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah nasional dan Provinsi Jawa Tengah, kondisi ekonomi makro Kabupaten Grobogan juga diproyeksikan mengalami perbaikan. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat



adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian. Berbagai sektor yang terkena dampak akibat Pandemi Covid-19 seperti jasa pendidikan, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum diharapkan dapat pulih kembali mulai tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini seiring dengan rencana dibukanya kembali proses pembelajaran tatap muka di sekolah, dan telah dibukanya obyek wisata dan pusat perdagangan.

Konsumsi rumah tangga akan meningkat didorong keyakinan konsumen yang membaik dan agresivitas pemerintah dalam mendistribusikan vaksin yang diperkirakan akan selesai pada april tahun 2022. Selain itu pelonggaran pembatasan sosial pada tahun 2021 dan 2022 akan berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi masyarakat yang akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian daerah.

Konsumsi pemerintah pada tahun 2021 diproyeksikan masih terbatas, karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pengadaan vaksin. Diharapkan konsumsi pemerintah pada tahun 2022 semakin seiring dengan penyelesaian pelaksanaan vaksinasi pada april 2022. Investasi swasta diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan keyakinan berusaha. Investasi pemerintah akan kembali meningkat dengan adanya pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 dan 2022 yang setelah sempat tertunda pada tahun 2020.

Perkembangan kondisi dan proyeksi ekonomi makro Kabupaten Grobogan tercantum pada tabel berikut ini.



**Tabel 3.2**  
**Kondisi dan Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Grobogan**  
**Tahun 2017–2022**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,85	5,83	5,37	-1,59	4,0+1	4,5±1
2	Inflasi	%	4,05	2,89	2,82	2,81	2,71	3±1
3	Persentase Penduduk Miskin	%	13,27	12,31	11,77	12,46	11,96	11,42
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,02	2,24	3,59	4,5	4,2	4,13
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,87	69,32	69,86	69,6	69,91	70,31

Arah kebijakan perekonomian daerah pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi sebagai modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.
2. Pengendalian inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat, melalui pengendalian pasokan dan harga kebutuhan pokok dan barang penting.
3. Pengembangan produk unggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Pemulihan usaha mikro dan industri kecil, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan.





5. Pengembangan wilayah dan peningkatan sarana prasarana untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **3.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**

Kapasitas fiskal daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 disusun dengan mengacu pada beberapa asumsi. Pendapatan daerah diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun 2021 seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah. Perbaikan kondisi ekonomi akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Sementara alokasi dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk penyusunan APBD tahunan diamanatkan bahwa apabila belum ada informasi resmi alokasi dana tranfer pusat, maka penganggaran pendapatan dari transfer pusat didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran sebelumnya. Penggunaannya dalam belanja daerah perlu dialokasikan sama utamanya yang bersumber dari DBH dan DAK.

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah tahun 2022 sebagai berikut:



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Tabel 3.3  
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah  
RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No Urut	Uraian	RKPD 2022
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.583.151.028.000
1. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	330.821.437.000
1. 1. 1	Pendapatan Pajak Daerah	100.510.000.000
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	12.827.402.000
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.267.448.000
1. 1. 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	197.216.587.000
1. 2	PENDAPATAN TRANSFER	2.107.799.291.000
1. 2. 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.903.138.397.000
1. 2. 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	204.660.894.000
1. 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	144.530.300.000
1. 3. 1	Pendapatan Hibah	5.500.000.000
1. 3. 2	Dana Darurat	-
1. 3. 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	139.030.300.000
2	BELANJA DAERAH	2.684.901.400.000
2. 1	BELANJA OPERASI	1.789.577.238.059
2. 1. 1	Belanja Pegawai	1.029.897.968.244
2. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	642.495.778.065
2. 1. 3	Belanja Bunga	3.093.112.000
2. 1. 4	Belanja Subsidi	-
2. 1. 5	Belanja Hibah	98.605.273.000
2. 1. 6	Belanja bantuan Sosial	15.485.106.750
2. 2	BELANJA MODAL	447.674.117.641
2. 2. 1	Belanja Tanah	0
2. 2. 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.414.510.077
2. 2. 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.572.813.914
2. 2. 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	279.191.249.460
2. 2. 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.280.544.190
2. 2. 6	Belanja Modal Aset Lainnya	215.000.000



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No Urut	Uraian	RKPD 2022
1	2	3
2. 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000
2. 3. 1	Belanja Tidak terduga	20.000.000.000
2. 4	BELANJA TRANSFER	427.650.044.300
2. 4. 1	Belanja Bagi Hasil	11.333.741.000
2. 4. 2	Belanja Bantuan Keuangan	416.316.303.300
	SURPLUS / (DEFISIT)	(101.750.372.000)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3. 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	145.000.000.000
3. 1. 1	SiLPA	30.000.000.000
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	0
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	0
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	115.000.000.000
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
3. 1. 6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	0
3. 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	43.249.628.000
3. 2. 1	Penyertaan Modal Daerah	18.249.628.000
3. 2. 2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0
3. 2. 3	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0
3. 2. 5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	0
	PEMBIAYAAN NETTO	101.750.372.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (DEFISIT SETELAH PEMBIAYAAN)	0



### 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

#### 1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan untuk tahun anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dana transfer, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, melalui pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi melalui penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi SDM untuk menunjang pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan pemungutan pajak secara elektronik, serta pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui SIPADA.



- d. Mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara profesional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
- e. Meningkatkan yang bersumber dari deviden BUMD dengan revitalisasi BUMD melalui upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat
- f. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan dengan melakukan rekonsiliasi dengan KPP Pratama maupun KPPN, dan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
- g. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana transfer bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak.
- h. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis) dan pemerintah Provinsi untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.
- i. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian / Lembaga mengenai pendanaan yang bersifat rebursmen sebagai alternatif



pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat / Lembaga donor.

- j. Pemberian data yang akurat untuk pembiayaan yang bersifat hibah baik dari pemerintah pusat maupun Lembaga lain.

## **2. Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pemenuhan belanja daerah terutama untuk pemenuhan belanja mandatory peraturan perundangan seperti pendidikan, kesehatan, pengawasan dan peningkatan kualitas SDM.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

### **1) Belanja Pegawai**

belanja pegawai akan menampung kebutuhan :

- a) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.
- b) Gaji DPRD Kabupaten Grobogan.
- c) Tambahan Penghasilan PNS.
- d) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

### **2) Belanja Barang Dan Jasa**



Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

- a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b) Pencapaian program unggulan Kepala Daerah
- c) Pemenuhan kebutuhan prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

### **3) Belanja Bunga**

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

### **4) Belanja Subsidi**

Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

### **5) Belanja Hibah**

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus



setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan, sehingga harus ada kepastian by name bg address penerima hibah.

#### **6) Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko





sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada SKPD berkenaan, sehingga harus ada kepastian by name bg address penerima bansos.

### **b. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan kualitas infrastruktur perkotaan dan layanan dasar permukiman.

### **c. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **d. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit



10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

### **3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Pengalokasikan pembentukan dana cadangan untuk mendasarkan Perda Dana Cadangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022 belum merencanakan SiLPA. Sementara itu kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan rencana investasi pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di Kabupaten Grobogan.



## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021–2026

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi RPJMD tahun 2021–2026.



Gambar 4.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai secara lengkap terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Penjabaran Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran  
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran
<b>MISI 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing</b>		
Meningkatkan masyarakat yang		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Indeks pembangunan Gender (IPG)



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Misi / Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran
cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	Harapan Lama Sekolah Rata-rata lama Sekolah
	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
	4	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	Indeks PUG
<b>Misi 2. Membangun infrastruktur daerah yang merata memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana</b>			
Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana			<i>Tingkat pembangunan infrastruktur daerah (jalan, drainase, irigasi, sarana prasarana perhubungan, kawasan kumuh, kesesuaian tata ruang, air bersih, sanitasi, limbah, sampah)</i>
			<i>Indeks kualitas lingkungan hidup</i>
			<i>Indeks risiko bencana</i>
	1	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	persentase infrastruktur jalan dan sumberdaya air kondisi baik Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni Sanitasi adalah air limbah domestik Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik
	2	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan
	3	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah
<b>Misi 3 Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing</b>			



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Misi / Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran
Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah			<i>Pertumbuhan ekonomi</i>
			<i>Angka Kemiskinan</i>
	1	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
			Kontribusi PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
			Kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan
			NTP
	2	Meningkatnya investasi berskala nasional	nilai investasi di daerah
	3	menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	indeks desa membangun
	4	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengeluaran per kapita disesuaikan
	5	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	TPT
<b>Misi 4 Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik</b>			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			<i>Indeks reformasi birokrasi</i>
	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Rata-rata nilai IKM
			Indeks Inovasi Daerah
	2	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	3	Meningkatnya	Nilai SAKIP



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran
	akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	Level Maturitas SPIP
		Indeks Manajemen Resiko
		Opini BPK
	4 Meningkatkan kualitas manajemen ASN	Indeks merit sistem
<b>Misi 5 Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat</b>		
Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat		<i>Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan</i>
		<i>Persentase penurunan konflik sosial dan pelanggaran Perda/Perkada</i>
	1 Meningkatkan kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan
	2 Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persentase Konflik SARA tertangani
		Angka Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada
		Indeks toleransi

### 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

#### 1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Visi RPJMN 2020 – 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, adalah merupakan penjabaran visi Presiden yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

- Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



- e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sebagai prioritas pembangunan nasional, yaitu :

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

- 1. Industri
- 2. Pariwisata
- 3. Ketahanan Pangan
- 4. UMKM
- 5. Infrastruktur
- 6. Transformasi Digital
- 7. Pembangunan Rendah Karbon



8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8–6,5%
  - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97–17,99%
  - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5–10,5 juta kunjungan
  - b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36–39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
  - b. Nilai Tukar Petani 102–104
  - c. Nilai Tukar Nelayan 102–105
  - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
  - e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton
  - f. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
  - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
  - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
  - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
  - c. Panjang Jalan Tol Baru: 400 km
  - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m<sup>3</sup>/s





- e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
- f. Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
- g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
- h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
- 6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
  - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
  - c. 72.500 SDM talenta digital
  - d. 12,4 juta local champion literasi digital
  - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
  - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
- 7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
  - b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
  - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
  - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
- 8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Tingkat Kemiskinan 8,5–9%
  - b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%
  - c. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60%
  - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
- 9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
  - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

- c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
  - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasias Teknologi (PPBT)
  - e. 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
  - b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk
  - c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
  - d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
  - e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
  - f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
  - g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
  - h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 adalah: **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**, dengan 7 Prioritas Nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

## 2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 diarahkan pada "Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

a. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana, yang difokuskan pada :

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani;
- 2) Perwujudan korporasi Petani;
- 3) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- 4) Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- 5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- 6) Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah;
- 7) Pengembangan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah, khususnya pada kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi;
- 8) Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- 9) peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan;
- 10) Rehabilitasi DAS kritis dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
- 11) Konservasi lingkungan, pengendalian pencemaran air sungai, peningkatan Sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah serta pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan;
- 12) Peningkatan kapasitas tampungan air baku melalui pembangunan waduk, embung dan longstorage yang didukung penguatan pengelolaan irigasi berbasis masyarakat;



- 13) Peningkatan Sarana prasarana penanggulangan banjir, rob dan tanah longsor;
  - 14) Integrasi dokumen perencanaan kebencanaan dengan perencanaan pembangunan;
  - 15) Sinergitas program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan literasi kebencanaan;
  - 16) Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan;
  - 17) Kemitraan kolaboratif serta peningkatan pembiayaan bersumber dari non Pemerintah,
- b. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran/ yang difokuskan Pada :
- 1) penyediaan basic life access unturk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelomPok rentan lainnya;
  - 2) Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat);
  - 3) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui koordinasi TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, penggunaan Sumber pembiayaan lain, Serta penguatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - 4) Pengurangan pengangguran melalui startup wirausaha, peningkatan kualitas dan prodr-rktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan pengawasan tenaga kerja.
- c. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing, yang difokuskan pada :
- 1) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
  - 2) Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah, meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan Puskesmas dan pelayanan Rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah



- perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Peningkatan akses layanan dasar serta pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan perempuan dan anak.
- d. pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah yang difokuskan pada :
- 1) Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), dan membangun pemerintahan yang terbuka (open government);
  - 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
  - 3) Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
  - 4) Mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur Yang baik;
  - 5) Meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong tumbuh kembang iklim inovasi kondusif di masyarakat;
  - 6) Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal;
  - 7) Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat;
  - 8) Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Pembangunan tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2016–2022. Adapun tema pembangunan daerah tahun 2022 adalah: ***“Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan***



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

*Didukung Reformasi Struktural dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia".* Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 mengacu pada Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005–2025, visi dan misi RPJMD, prioritas pembangunan nasional tahun 2022, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dan Isu Strategis KLHS RPJMD, dan isu strategis RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2022, dan pokok–pokok pikiran DPRD.

**TEMA: "Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan  
Didukung Reformasi Struktural dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"**



**Gambar 4.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 terlihat pada tabel berikut ini.



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

**Tabel 4.2**  
**Perumusan Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005– 2025</b>	<b>Prioritas RKP Tahun 2022</b>	<b>Prioritas RKPD Jateng 2022 dalam RPJMD Tahun 2018– 2023</b>	<b>Visi dan Misi Bupati Terpilih</b>	<b>Isu Strategis KLHS RPJMD</b>	<b>Isu Strategis RKPD 2022</b>	<b>Prioritas RKPD Grobogan Tahun 2022</b>
1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.	4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan & budaya dalam kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kesehatan Yang Baik (TPB 3)</li><li>• Pendidikan Berkualitas (TPB 4)</li><li>• Kesenjangan Gender (TPB 5)</li><li>• Tidak Ada Kemiskinan (TPB 1)</li></ul>	Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengentasan kemiskinan, dan Penanaman nilai-nilai keimanan dan budaya
2. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing tinggi dan cerdas untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menghapuskan Kelaparan (TPB 2)</li></ul>		



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005– 2025	Prioritas RKP Tahun 2022	Prioritas RKPD Jateng 2022 dalam RPJMD Tahun 2018– 2023	Visi dan Misi Bupati Terpilih	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis RKPD 2022	Prioritas RKPD Grobogan Tahun 2022
sejahtera.		Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;				
3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan. 4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat di Kabupaten Grobogan.	7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal saerah.	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Industri, Inovasi dan Infrastruktur (TPB 9)</li><li>• Kota dan Masyarakat Berkelanjutan (TPB 11)</li><li>• Perdamaian dan Keadilan (TPB 16)</li><li>• Kemitraan (TPB 17)</li></ul>	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusifitas Wilayah	Penerapan reformasi birokrasi, perbaikan kualitas pelayanan publik dan penciptaan kondusifitas wilayah.





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005– 2025	Prioritas RKP Tahun 2022	Prioritas RKPD Jateng 2022 dalam RPJMD Tahun 2018– 2023	Visi dan Misi Bupati Terpilih	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis RKPD 2022	Prioritas RKPD Grobogan Tahun 2022
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.	2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		Membangun infrastruktur daerah yang merata memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana	• Air Bersih dan Sanitasi (TPB 6)	Kualitas Infrastruktur Daerah	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005– 2025	Prioritas RKP Tahun 2022	Prioritas RKPD Jateng 2022 dalam RPJMD Tahun 2018– 2023	Visi dan Misi Bupati Terpilih	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis RKPD 2022	Prioritas RKPD Grobogan Tahun 2022
6. Pembangunan daerah yang dinamis untuk membangun Kabupaten Grobogan yang asri dan lestari	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;	Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing	• Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi (TPB 8)	Perekonomian Sedikit Melambat Terdampak Pandemic Covid 19.	Pengembangan potensi unggulan daerah dan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 19
				• Pemakaian Yang Bertanggungjawab (TPB 12) • Aksi Iklim (TPB 13) • Kehidupan di Darat (TPB 15)	Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	



Penjabaran prioritas dan fokus pembangunan daerah dan program prioritas Kabupaten Grobogan tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Penjabaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Kedalam Program RKPD Tahun 2022**

No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengentasan kemiskinan, dan Penanaman nilai-nilai keimanan dan budaya	
a.	Pemerataan pendidikan yang berkualitas melalui pendidikan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, penerapan teknologi dalam sistem pembelajaran jarak jauh yang efektif dan efisien, serta akreditasi sekolah pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan PNF.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 5. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
b.	Peningkatan validitas data, penjangkauan dan pendampingan, dan serta fasilitasi anak usia sekolah yang tidak sekolah agar dapat mengakses pendidikan, dan pemberian beasiswa pendidikan.	
c.	Peningkatan budaya literasi melalui pengembangan perpustakaan digital dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan	1. Program Pembinaan Perpustakaan 2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
d.	Peningkatan kesehatan ibu dan anak untuk	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
	mengurangi angka kematian ibu, bayi dan balita	Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
e.	Pengurangan dan penanganan balita stunting (pendek dan sangat pendek) dan balita kurang gizi dalam rangka peningkatan status gizi masyarakat.	
f.	Penguatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas didukung tenaga kesehatan yang berkompeten, sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang memadai, dan sistem manajemen pengelolaan yang baik.	
g.	Penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular, termasuk Covid-19.	
h.	Peningkatan partisipasi Keluarga Berencana, dan optimalisasi kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 2. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) 3. Program Pendaftaran Penduduk 4. Program Pencatatan Sipil 5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 6. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 7. Program Pengendalian Penduduk



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
i.	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta rehabilitasi sosial dasar diluar panti bagi balita dan lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Penanganan Bencana 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
j.	Sinkronisasi pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 6. Program Pengembangan UMKM 7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 8. Program Penyuluhan Pertanian 9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 10. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
k.	Penguatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Penempatan Tenaga Kerja 4. Program Hubungan Industrial
l.	Peningkatan pemenuhan hak perempuan dan anak	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
	dan perbaikan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak.	Perempuan
m.	Pencegahan perkawinan usia anak	2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 6. Program Perlindungan Khusus Anak
n.	Peningkatan kualitas pemuda, peningkatan prestasi olahraga serta pembudayaan olahraga dikalangan masyarakat	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
o.	Peningkatan nilai-nilai keimanan dan kerukunan antar umat beragama melalui fasilitasi forum-forum keagamaan dan forum kerukunan antara umat beragama, serta peningkatan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
p.	Pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan nilai-nilai budaya jawa dalam kehidupan masyarakat	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
q.	Pengembangan seni budaya daerah sebagai daya	3. Program Pembinaan Sejarah



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
	tarik pariwisata daerah	4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 5. Program Pengelolaan Permuseuman
2	<b>Penerapan reformasi birokrasi, perbaikan kualitas pelayanan publik dan penciptaan kondusifitas wilayah.</b>	
a.	Penyederhanaan birokrasi, perbaikan budaya kerja dan kedisiplinan ASN, pengembangan kompetensi ASN, dan penerapan pola karir berbasis merit system.	1. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
b.	Penguatan implementasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terintegrasi dan akuntabel, dan perencanaan pembangunan berbasis spasial	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia 3. Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam 4. Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan 5. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
c.	Peningkatan partisipasi publik dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi.	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Aplikasi Informatika
d.	Peningkatan penerapan e-Arsip terintegrasi pada	1. Program Pengelolaan Arsip



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
	perangkat daerah	2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 3. Program Perijinan Penggunaan Arsip
e.	Pengembangan satu data Kabupaten Grobogan dalam rangka penyediaan data tunggal terintegrasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
f.	Penguatan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
g.	Peningkatan kualitas layanan kepada kepala daerah dan DPRD.	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perekonomian Dan Pembangunan 3. Program Administrasi Umum 4. Program Layanan Dan Administrasi Keuangan 5. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
h.	Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
i.	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2. Program Kebakaran
3	<b>Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup</b>	
a.	Perluasan akses sanitasi (air limbah dan sampah)	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
	dan air bersih yang layak dan aman	Minum 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
b.	Penanganan kawasan kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 3. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
c.	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, penataan drainase, pedestrian, dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 2. Program Pengembangan Permukiman 3. Program Penataan Bangunan Gedung 4. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 5. Program Penyelenggaraan Jalan 6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
d.	Peningkatan fungsi jaringan irigasi dan bangunan penampung air untuk menunjang produktivitas pertanian.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
e.	Peningkatan kualitas pelayanan transportasi dan peningkatan sarana keselamatan LLAJ, serta peningkatan integrasi angkutan umum dalam konstelasi wilayah Kedungsepur untuk	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah	
f.	Penyediaan tanah untuk pembangunan daerah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
g.	Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, melalui pengembangan desa tangguh bencana, penyediaan rencana penanggulangan bencana dan penguatan kerjasama dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana
h.	Peningkatan cakupan layanan dan kualitas pengelolaan dan pengurangan sampah di wilayah perkotaan.	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
i.	Peningkatan kualitas tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup kualitas lingkungan hidup.	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
		7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
4	Pengembangan potensi unggulan daerah dan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 19	
a.	Peningkatan realisasi investasi daerah didukung penyediaan informasi potensi dan peluang investasi berbasis produk unggulan daerah, iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan insentif bagi investor	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pelayanan Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
b.	Pengembangan koperasi dan UMKM didukung penguatan kompetensi kewirausahaan, kemampuan manajemen usaha, diversifikasi usaha, dan peningkatan kualitas produk.	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 7. Program Pengembangan UMKM
c.	Pengembangan industri kecil, usaha perdagangan dan ekonomi kreatif melalui diversifikasi produk,	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
	inovasi teknologi dan peningkatan kompetensi pemasaran melalui e-commerce.	3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 7. Program Pengembangan Ekspor 8. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 9. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
d.	Pemulihan pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penataan manajemen pengelolaan, peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata, dan sinergi kerjasama dengan stakeholder pariwisata.	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
e.	Optimalisasi perikanan tangkap dan pengembangan budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan 4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
f.	Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyedia sarana dan prasarana produksi dan pemberdayaan petani, serta pengendalian penyakit hewan.	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
		4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 5. Program Perizinan Usaha Pertanian 6. Program Penyuluhan Pertanian
g.	Peningkatan ketahanan pangan melalui pengendalian pasokan dan stabilitas harga pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengendalian mutu dan keamanan pangan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
i.	Peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.	1. Program Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat



#### **4.3. Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Daerah**

Pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Grobogan difokuskan pada beberapa sektor ekonomi Kabupaten Grobogan, meliputi:

##### **1. Pertanian**

Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 pada sektor pertanian diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana produksi, pengendalian hama terpadu, dan pemberdayaan petani.
- b. Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pemberdayaan kelompok tani dalam pengolahan dan pemasaran produk pertanian dan peternakan.
- c. Pemberdayaan peternak dan peningkatan pengendalian penyakit hewan.

##### **2. Koperasi dan UMKM**

Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 pada sektor koperasi dan UMKM diarahkan pada pengembangan koperasi dan UMKM melalui:

- a. Penguatan kompetensi kewirausahaan dan peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- b. kemampuan manajemen usaha, diversifikasi usaha, inovasi teknologi dan peningkatan kualitas produk.
- c. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar.
- d. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- e. Peningkatan kompetensi pemasaran produk melalui e-commerce.

##### **3. Perindustrian**

Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 pada sektor perindustrian diarahkan pada Peningkatan realisasi investasi daerah di bidang



perindustrian dan Pengembangan industri kecil untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri melalui:

- a. Penyediaan informasi potensi dan peluang investasi berbasis produk unggulan daerah, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan insentif bagi investor.
- b. Diversifikasi produk, inovasi teknologi industri kecil dan peningkatan kompetensi pemasaran produk melalui e-commerce.
- c. Peningkatan kemampuan manajemen usaha, diversifikasi usaha, inovasi teknologi dan peningkatan kualitas produk industri.

#### **4. Perdagangan**

Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 pada sektor perdagangan diarahkan pada Pengembangan usaha perdagangan melalui:

- a. Pemberdayaan usaha perdagangan dan peningkatan kompetensi pemasaran melalui e-commerce.
- b. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor.
- c. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor.

#### **5. Pariwisata**

Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 pada sektor pariwisata diarahkan pada pemulihan pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan agar mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisata melalui:

- a. Peningkatan akses ke kawasan wisata dan penyediaan sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan.
- b. Penataan manajemen pengelolaan dan peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata.
- c. Peningkatan sinergi kerjasama dengan stakeholder pariwisata.

#### **6. Perikanan**



Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 pada sektor pariwisata diarahkan pada:

- a. Optimalisasi perikanan tangkap dan pengembangan budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan.
- b. Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk perikanan.
- c. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha perikanan skala kecil.





## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

#### **5.1 Program Pendukung Pencapaian Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan**

Program yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1**

**Program Pendukung Pencapaian Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2022</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Program</b>
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengentasan kemiskinan, dan Penanaman nilai-nilai keimanan dan budaya	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;</li><li>• Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.</li><li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.</li><li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.</li><li>• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.</li><li>• Program Pengendalian Penduduk.</li><li>• Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb).</li><li>• Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).</li><li>• Program Penanganan Warga</li></ul>



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2022	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Program
				<p>Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pemberdayaan Sosial.</li><li>• Program Rehabilitasi Sosial.</li><li>• Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.</li><li>• Program Penanganan Bencana.</li><li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li><li>• Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</li><li>• Program Pembinaan Perpustakaan</li><li>• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.</li><li>• Program Penempatan Tenaga Kerja.</li><li>• Program Hubungan Industrial.</li><li>• Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.</li><li>• Program Perlindungan Perempuan.</li><li>• Program Peningkatan Kualitas Keluarga.</li><li>• Program Pemenuhan Hak Anak</li><li>• Program Perlindungan Khusus Anak.</li><li>• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.</li></ul>



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2022	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Program
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</li><li>• Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.</li><li>• Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.</li><li>• Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.</li><li>• Program Keningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.</li><li>• Program Pengembangan Kebudayaan.</li><li>• Program Pengembangan Kesenian Tradisional.</li><li>• Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.</li></ul>
2.	Penguatan Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien guna mendukung pelayanan publik	7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Kepegawaian Daerah</li><li>• Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li><li>• Program Informasi Dan Komunikasi Publik.</li><li>• Program Aplikasi Informatika.</li><li>• Program Penyelenggaraan Pengawasan</li></ul>



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2022	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Program
	dan kinerja pembangunan daerah “ASN yang Smart dan Birokrasi yang Melayani		penguatan kapasitas fiskal daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</li> <li>• Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li> <li>• Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam</li> <li>• Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia</li> <li>• Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan</li> <li>• Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</li> <li>• Program Pengelolaan Arsip</li> <li>• Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip</li> <li>• Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>• Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>• Program Administrasi Umum</li> <li>• Program Pendaftaran Penduduk</li> <li>• Program Pencatatan Sipil</li> <li>• Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> </ul>
3.	Peningkatan kualitas infrastruktur	2. Mengembangkan Wilayah untuk	Penguatan kapasitas dan daya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.</li> <li>• Program Pengembangan</li> </ul>



## Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2022	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Program
	wilayah dan pelestarian lingkungan hidup	Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;	<p>Perumahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.</li> <li>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.</li> <li>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.</li> <li>• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</li> <li>• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).</li> <li>• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).</li> <li>• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.</li> <li>• Program Penanggulangan Bencana.</li> <li>• Program Penanggulangan Kebakaran.</li> <li>• Program Pengelolaan Persampahan.</li> <li>• Program Penyelenggaraan Jalan.</li> <li>• Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.</li> <li>• Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin</li> </ul>



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2022	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Program
				Lingkungan Dan Pengelolaan Hidup (PPLH). <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.</li></ul>
4.	Pengembangan potensi unggulan daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li><li>• Program Pelayanan Penanaman Modal</li><li>• Program Promosi Penanaman Modal</li><li>• Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</li><li>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)</li><li>• Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</li><li>• Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</li><li>• Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</li><li>• Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi</li><li>• Program Pengembangan Ekspor</li><li>• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li><li>• Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</li><li>• Program Pemasaran Pariwisata.</li><li>• Program Peningkatan Daya</li></ul>



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2022	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Program
				<p>Tarik Destinasi Pariwisata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.</li><li>• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.</li><li>• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.</li><li>• Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.</li><li>• Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.</li><li>• Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.</li><li>• Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.</li><li>• Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.</li><li>• Program Penyuluhan Pertanian</li><li>• Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.</li><li>• Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.</li><li>• Program Penanganan Kerawanan Pangan.</li></ul>



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2022	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Program
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengawasan Keamanan Pangan.</li><li>• Program Administrasi Pemerintahan Desa.</li><li>• Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.</li></ul>

### **5.2 Program Pendukung Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Program yang mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Program Pendukung Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022**

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Target	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
1.	<b>Pendidikan</b>			
	a. Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Program Pengelolaan Pendidikan
	b. Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Program Pengelolaan Pendidikan





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Target	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	c. Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5–6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Program Pengelolaan Pendidikan
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>			
	a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	d. Pelayanan Kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif,	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Target	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
	a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	100 %	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Target	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi.	100 %	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4.	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>			
	a. Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase rumah tangga penerima rehabilitasi rumah yang layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan.	100 %	Program Pengembangan Perumahan
	b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persentase rumah tangga penerima fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan.	100 %	Program Pengembangan Perumahan
5.	<b>Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			
	a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Target	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	b. Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	100 %	Program Penanggulangan Bencana
	c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Program Penanggulangan Bencana
	d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Program Penanggulangan Bencana
	e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Program Penanggulangan Kebakaran
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>			
	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	Program Rehabilitasi Sosial
	b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	Program Rehabilitasi Sosial
	c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	Program Rehabilitasi Sosial
	d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	Persentase gelandangan dan pengemis terlantar yang	100 %	Program Rehabilitasi Sosial



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Target	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
	e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	Program Rehabilitasi Sosial



### 5.3 Program Pendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)

Program yang mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Program Pendukung Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) Tahun 2022**

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
1. <b>Tidak Ada Kemiskinan:</b> Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.	a. Program Pemberdayaan Sosial. b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. c. Program Rehabilitasi Sosial. d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial. e. Program Penanganan Bencana. f. Program Pengelolaan Pendidikan. g. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. h. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi. i. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi. j. Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian. k. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi. l. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM). m. Program Pengembangan UMKM. n. Program Penempatan Tenaga Kerja.
2. <b>Menghapuskan Kelaparan:</b> Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang	a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan. b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. c. Program Penanganan Kerawanan Pangan. d. Program Pengawasan Keamanan Pangan. e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian. f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>Tujuan SDGs</b>	<b>Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs</b>
berkelanjutan	Pertanian. g. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian. h. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. i. Program Penyuluhan Pertanian
<b>3. Kesehatan Yang Baik:</b> Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.
<b>4. Pendidikan Berkualitas:</b> Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.	a. Program Pengelolaan Pendidikan b. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
<b>5. Kesetaraan Gender:</b> Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.	a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan. b. Program Perlindungan Perempuan. c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. d. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha). e. Program Perlindungan Khusus Anak.
<b>6. Air Bersih dan Sanitasi:</b> Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.	a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
<b>7. Energi Terbarukan:</b> Memastikan akses ke	



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>Tujuan SDGs</b>	<b>Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs</b>
energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.	
<b>8. Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi:</b> Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.	a. Program Penempatan Tenaga Kerja. b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. c. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal d. Program Pelayanan Penanaman Modal e. Program Promosi Penanaman Modal
<b>9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur:</b> Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.	a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
<b>10. Berkurangnya Ketidaksetaraan:</b> Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.	a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan. b. Program Perlindungan Perempuan.
<b>11. Kota dan Masyarakat Berkelanjutan:</b> Membangun kota dan permukiman warga yang inklusif, aman dan	a. Program Pengembangan Perumahan. b. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh. c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>Tujuan SDGs</b>	<b>Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs</b>
kukuh.	
<b>12. Pemakaian Yang Bertanggungjawab:</b> Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.	a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
<b>13. Aksi Iklim:</b> Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
<b>14. Kehidupan di Bawah Air:</b> Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	–
<b>15. Kehidupan di Darat :</b> Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>Tujuan SDGs</b>	<b>Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs</b>
menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.	
<b>16. Perdamaian dan Keadilan:</b> Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
<b>17. Kemitraan:</b> Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.	-

### **5.5 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Program dan kegiatan perangkat daerah merupakan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam menjalankan kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

#### **1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**b. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

- 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

**c. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**

- 1) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

**d. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

- 1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Pogram Pengelolaan Pendidikan	Rasio Satuan Pendidikan (PAUD, SD, SMP, PNF) terakreditasi minimal B	%	100
Progam Pengembangan Kurikulum	Rasio satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100
Progam Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio Ketersediaan PTK yang kompeten	%	100



## **2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 8) Penataan Organisasi
  - 9) Peningkatan Pelayanan BLUD
- b. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
  - 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
  - 1) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
  - 2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
  - 2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
  - 3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
  - 4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
  - 5) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- e. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
Program layanan UKM dan UKP rujukan	Prosentase Baduta Stunting	%	



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	IKS (indek Keluarga sehat) Persentase tingkat ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan	% %	0 100
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang berPHBS	%	83
Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase tingkat ketersediaan alat kesehatan, makanan dan minuman	%	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	% Puskesmas Akreditasi Paripurna	%	100

### **3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

#### **a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **b. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**

- 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
  - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
  - 1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- e. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
  - 1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- f. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
  - 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
  - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- g. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
  - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- h. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
  - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- i. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
  - 1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022
-------------------	---------------------------	--------	-------------



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>Pembangunan</b>	<b>(Outcome)</b>		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	54,37
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	%	85,65
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap air limbah domestik	%	73,95
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	85,8
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase kondisi baik	%	45,6
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/teknisi/analisis yang tersertifikasi	%	75
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	% Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL	%	0
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan	%	0





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022
	dan Lingkungannya		
Program Penataan Bangunan Gedung	bangunan gedung yang memiliki IMB	%	71

#### **4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

**a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**b. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

- 1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 3) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
- 4) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- 5) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
- 6) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

**c. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

- 1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

### **d. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

#### **1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100
	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100,00
	Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan	%	0,21
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	0,166
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	0,66
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	%	0,21
Program Pengelolaan dan	Jumlah Warga Negara yang	%	85,65



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>Program Prioritas</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	73,95
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan	%	100
	Persentase SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan	%	100
Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persentase kawasan/ lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	0

### **5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  - 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
  - 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
  - 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase cakupan patroli petugas satpol pp	%	74
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	75
Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana menerima bantuan sosial	%	100



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

	selama masa tanggap darurat		
--	--------------------------------	--	--

### **6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

**a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**b. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

- 1) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

**c. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK  
KEKERASAN**

- 1) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

**d. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

**e. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

**f. PROGRAM PENANGANAN BENCANA**



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

**g. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga neara migran korban tindak kekerasan yang ditangan	%	75
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	1,79
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	83
Program Penanganan Bencana	Persentase PSKS Korban Bencana yang Tertangani	%	0
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	%	0
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana prasarana makam Pahlawan yang memenuhi standart	%	0



## **7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

**a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**b. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- 2) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
  - 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
  - 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

**c. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**

- 1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- 4) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

**d. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,  
Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	100
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan ( dalam dan Luar Negeri ) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	%	77,38
Program Hubungan Industrial	Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	%	18,99

### **8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

---

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
- 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
- 1) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
- 1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- e. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
- 1) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- f. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
-



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan gender	%	82
Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	%	65
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	%	100
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya ketersediaan data pilah gender	%	100
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prosentase Lembaga yang aktif dalam PHA	%	64



## **9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - b. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
    - 1) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - c. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
    - 1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
    - 2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
    - 3) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
  - d. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
    - 1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
    - 2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - e. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
    - 1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
-



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	%	100
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Energi dan protein Terhadap Standar	%	100
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan desa rentan pangan (Prioritas I dan II) naik tingkat	%	10
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Kenaikan Produk Pangan Segar yang Aman	%	30

### **10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

- a. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
  - 1) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
  - 1) Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 1) Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	%	100
Program penatagunaan tanah	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	%	14,29
Program Redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase dokumen inventarisasi obyek redistribusi tanah yang tersusun	%	5,26

### **11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - b. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
    - 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
    - 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
  - c. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
    - 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
    - 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
    - 3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - d. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
    - 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
  - e. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
    - 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
    - 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - f. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
    - 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - g. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
    - 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - h. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
-



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- i. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
  - 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- j. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
  - 1) Pengelolaan Sampah

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup yang berkualitas	%	71,4
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	57,14
	Cakupan pemantauan kualitas udara	%	75,00
	Presentase kampung iklim yang terbentuk	%	100,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase RTH dalam kondisi baik	%	76
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase rekomendasi izin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	%	15
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha	%	75



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>Program Prioritas</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup		
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	%	30
	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten	%	15
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah adiwiyata tingkat kabupaten	%	62
	Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah / Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	orang/ kelompok	1
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100
Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan sampah yang ditangani	%	20,2
	Persentase cakupan area pelayanan persampahan		67

### **12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

---

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
  - 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - 2) Penataan Pendaftaran Penduduk
  - 3) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
  - 4) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- c. PROGRAM PENCATATAN SIPIL
  - 1) Pelayanan Pencatatan Sipil
  - 2) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
  - 3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- d. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
  - 1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
  - 2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 3) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- e. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
  - 1) Penyusunan Profil Kependudukan



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Perekaman KTP		99
	Rasio Kepemilikan KTP		99
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga		100
	Rasio Kepemilikan KIA		80
Program Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan akta kelahiran 0-5 Tahun	%	99
	Rasio Kepemilikan akta kelahiran (Seluruh Umur)	%	42
	Rasio Kepemilikan akta 0-18 tahun	%	95
	Rasio kepemilikan akta 0 - 17 tahun	%	95
	Presentase kepemilikan akta kematian	%	100
	Presentase kepemilikan akta perkawinaan	%	100
	prosentase kepemilikan akta perceraian	%	100
	Prosentase kepemilikan Akta Pengakuan Anak	%	100
	Prosentase kepemilikan Akta Pengesahan Anak	%	100
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	presentase OPD/ lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	%	60
	Persentase database yang	%	99



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022
	valid dan update		
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan	dokumen	1

### **13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

#### **a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **b. PROGRAM PENATAAN DESA**

- 1) Penyelenggaraan Penataan Desa

#### **c. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**

- 1) Fasilitasi Kerja sama antar Desa

#### **d. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

#### **e. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

- 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	44,69
	Persentase Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	31,12
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	%	71,43
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	%	100
	Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu	%	100
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan	Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Level	Tinggi
	Persentase BUMDes yang	%	1,83



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Masyarakat Hukum Adat	Mampu Meningkatkan Omset Usaha		
-----------------------	--------------------------------	--	--

### **14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

#### **a. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**

- 1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- 2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

#### **b. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

- 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- 3) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

#### **c. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**

- 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
--------------------------	----------------------------------	---------------	--------------------



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>Pembangunan</b>	<b>(Outcome)</b>		
Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya angka kelahiran	%	26
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	%	77,5
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KB)	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS	%	88

### **15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

#### **a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **b. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

- 1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- 3) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- 4) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- 5) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 7) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- 8) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- 9) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	68
	Prosentase angkutan umum yang berkualitas baik	%	94

### **16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**c. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**

- 1) Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	% masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	%	82
Program Aplikasi Informatika	% Jaring komunikasi (aplikasi) yang terintegrasi	%	8,85

### **17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

**a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
  - 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- c. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
  - 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
  - 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
  - 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- f. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
  - 1) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- g. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
  - 1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
Program Pengawasan	Prosentase pengawasan	%	19



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Dan Pemeriksaan Koperasi	dan Pemeriksaan		
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase KSP/USP Sehat		35
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan		17
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang dapat diberdayakan	%	30
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase Pemberdayaan Usaha Mikro	%	0,4
Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1

### **18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

**a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**b. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
  - 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
  - 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- e. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
  - 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- f. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
  - 1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	%	80
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase potensi investasi yang siap ditawarkan	%	100
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi	%	94,44
Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pelayanan	%	82



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

	perijinan dan non perijinan		
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase ketersediaan data untuk masing-masing perijinan	%	100

### **19. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

**a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**b. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**

- 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**c. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
- 4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
- d. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
  - 1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (yang pernah mengikuti pelatihan)	%	30,00
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan.	%	100,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	%	25,00

### **20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
  - 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	%	100

### **21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

#### **a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

- 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
<i>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i>	<i>% Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait</i>	<i>%</i>	<i>100</i>

### **22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

#### **a. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
  - 1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
  - 1) Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
  - 1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
  - 2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kotaa
- e. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
  - 1) Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	80
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan gelar seni budaya	%	100
Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	60
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	%	21,28



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Jumlah Pengunjung Museum	%	100
------------------------------------	--	---	-----

### **23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

- 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	3,01
Program Pelestarian	Persentase koleksi nasional	%	70





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	dan naskah kuno yang dilestarikan		
----------------------------------	-----------------------------------	--	--

### **24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

#### **a. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**

- 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

#### **b. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**

- 1) Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
- 2) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
- 3) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- 4) Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
- 5) Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

#### **c. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**

- 1) Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Pengelolaan Arsip	Prosentase pengolahan arsip secara baku	%	86



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Presentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	%	100
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Presentase peningkatan pengguna arsip atau pengunjung arsip	%	68

### **25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

#### **d. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

- 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- 2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

#### **e. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**

- 1) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- 2) Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

#### **f. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

- 1) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Pengelolaan	Jumlah produksi perikanan	ton	1262



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Perikanan Tangkap	tangkap		
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	2730,17
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi produk olahan ikan	ton	304,26

### **26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
  - 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
  - 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
  - 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
  - 4) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
  - 1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
  - 1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- d. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
  - 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
  - 2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Peningkatan	Persentase penambahan	%	9,6



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>Program Prioritas</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Daya Tarik Destinasi Pariwisata	destinasi wisata		
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%	20
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	%	2,5
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	2,5

### **27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
  - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
  - 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota



- 3) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 4) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 5) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
- c. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
- 1) Pembangunan Prasarana Pertanian
- d. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
- 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- f. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
- 1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
- g. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
- 1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan	%	100
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	%	100
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian tertangani	%	12
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peizinan usaha pertanian yang diberikan	%	100
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani naik kelas	%	48

### **28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

#### **a. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

- 1) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
- 2) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
- 3) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

#### **b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**

- 1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- c. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
  - 1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  - 2) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
  - 3) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 4) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
  - 1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- e. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
  - 1) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	%	11,00
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	89,70



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>Program Prioritas</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	Rupiah	1.246.969.568.429
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	%	80,00

### **29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
  - 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
  - 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
  - 2) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK ( PMDN 18/2017 )	%	62,5
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	15,49
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase IKM masuk dalam SIika	%	19,07
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (SHP, SIP)	%	60,00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	%	60,00

### **30. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

### **a. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

- 1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	%	100

### **31. Sekretariat Daerah**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

#### **a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9) Penataan Organisasi
- 10) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

#### **b. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- 1) Administrasi Tata Pemerintahan



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 2) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
  - 3) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
  - 4) Fasilitasi Kerjasama Daerah
- c. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- 1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
  - 2) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
  - 3) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - 4) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	Nilai	B
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Status Kinerja LPPD	Nilai	-
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pertumbuhan Usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan	%	5
	Persentase BLUD yang mendapatkan pembinaan teknis	%	100

### **32. Sekretariat DPRD**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

**b. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**

- 1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran
- 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- 4) Peningkatan Kapasitas DPRD
- 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- 6) Fasilitasi Tugas DPRD

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

<b>Program Prioritas Pembangunan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	%	100

### **33. Perencanaan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**b. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

**c. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	100
Program Koordinasi Dan	Persentase capaian kinerja	%	89



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RPJMD bidang perekonomian dan SDA		
---	-----------------------------------	--	--

### **34. Keuangan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
  - 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
  - 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
  - 1) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
-------------------------------	-------------------------------------	--------	-------------



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD mengumpulkan Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD melaporkan Inventarisasi Aset baru Tepat Waktu	%	100
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	10

### **35.Kepegawaian**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
  - 1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
  - 2) Mutasi dan Promosi ASN
  - 3) Pengembangan Kompetensi ASN
  - 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- c. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
  - 1) Pengembangan Kompetensi Teknis
  - 2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
Program Kepegawaian Daerah	Persentase cakupan layanan ASN	%	100
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase terlaksananya pengembangan sumber daya manusia kompetensi ASN	%	100

### **36. Penelitian Dan Pengembangan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

#### **a. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

- 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- 4) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- 5) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- 6) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	%	100

### **37. Pengawasan (Inspektorat Daerah)**





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
  - 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- c. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
  - 2) Pendampingan dan Asistensi

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan pemeriksaan dan aduan yang selesai di tindak lanjuti	%	70
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai PMPRB Tim Penilai Internal	Nilai	75



### **38. Kewilayahan (Kecamatan)**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    - 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
    - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
    - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - d. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
    - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - e. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
    - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - f. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
-



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	%	100
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100

### **39. Kesatuan Bangsa Dan Politik**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- c. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- d. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- e. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- f. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022
-------------------	---------------------------	--------	-------------



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>Pembangunan</b>	<b>(Outcome)</b>		
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	80
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase keterlibatan perempuan dalam kepengurusan organisasi partai politik	%	70
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan		70
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	%	80
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Prosentase potensi konflik sosial yang tertangani	%	90

Selanjutnya rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2022 secara lengkap terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 ini.



## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2022. Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) memberikan gambaran pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

**Tabel 6.1**

**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Kinerja 2022</b>
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,93
2.	Indeks pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,49
3.	Tingkat pembangunan infrastruktur daerah	%	75,75
4.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	80,4
5.	Indeks risiko bencana	Indeks	Tinggi
6.	Pertumbuhan ekonomi	%	4 $\pm$ 1
7.	Angka Kemiskinan	%	$\leq$ 11



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Tabel 6.2

Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan  
Urusan Pemerintahan Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Tahun 2022
<b>A</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,93
2	Indeks pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,49
3	Tingkat pembangunan infrastruktur daerah	%	75,75
4	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	80,4
5	Indeks risiko bencana	Indeks	Tinggi
6	Pertumbuhan ekonomi	%	4 $\pm$ 1
7	Angka Kemiskinan	%	$\leq$ 11
8	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	80
9	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran Perda/Perkada	%	86,5
<b>B</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>		
	<b>Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar</b>		
	<b>Urusan Pendidikan</b>		
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,49
11	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7,23
	<b>Urusan Kesehatan</b>		
12	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,92



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Tahun 2022
	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
13	persentase infrastruktur jalan dan sumberdaya air kondisi baik	%	84,74
14	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	92,06
15	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	%	86,65
16	Cakupan pelayanan air limbah domestik	%	75,95
	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>		
17	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	68,04
	<b>Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;</b>		
18	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di kabupaten	%	73
19	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,60
	<b>Urusan Sosial</b>		
20	Persentase PPKS Tertangani	%	60
	<b>Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar</b>		
	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>		
21	TPT	%	4,4
	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</b>		
22	Indeks PUG	Indeks	0,7725 – 0,9074
	<b>Urusan Pangan</b>		
23	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,5
	<b>Urusan Pertanahan</b>		
24	Persentase lahan bersertifikat (milik pemda)	%	8
	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>		





## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Tahun 2022
25	Indeks Kualitas Air	Indeks	79,45
26	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,57
27	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	62,15
	<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		
28	Rasio Kepemilikan KTP	rasio	99
29	Rasio Kepemilikan akta kelahiran (Seluruh Umur)	%	42
	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		
30	indeks desa membangun	Indeks	0,68
	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>		
31	Cakupan peserta KB Aktif	%	77
	<b>Urusan Perhubungan</b>		
32	Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B
	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>		
33	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,1
	<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>		
34	Prosentase KSP/USP Sehat	%	35
	<b>Urusan Penanaman Modal</b>		
35	nilai investasi di daerah	Juta rp	1.168.644
	<b>Urusan Kepemudaan dan Olah Raga</b>		
36	Persentase prestasi pemuda yang diperoleh di tingkat kabupaten, karesidenan, provinsi, nasional	%	65,69
37	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	80
	<b>Urusan Statistik</b>		
38	Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	%	100
	<b>Urusan Persandian</b>		
39	% Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi	%	100



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Tahun 2022
	dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait		
	<b>Urusan Kebudayaan</b>		
40	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	80
	<b>Urusan Perpustakaan</b>		
41	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat		37,40
42	Indek pembangunan literasi masyarakat		13,6
	<b>Urusan Kearsipan</b>		
43	Prosentase pengolahan arsip secara baku	%	86
	<b>Urusan Pilihan</b>		
	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>		
44	Pertumbuhan produksi perikanan		5,25
	<b>Urusan Pariwisata</b>		
45	Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	5,25
	<b>Urusan Pertanian</b>		
46	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,23
47	Persentase Pertumbuhan Populasi ternak unggulan	%	2,4
	<b>Urusan Perdagangan</b>		
48	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	0,50
	<b>Urusan Perindustrian</b>		
49	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%	1,83
	<b>Urusan Transmigrasi</b>		
50	Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	%	100
	<b>Penunjang Urusan</b>		
	<b>Sekretariat Daerah</b>		
51	Nilai SAKIP	Nilai	B (65)



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Tahun 2022
52	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	B (68)
	<b>Sekretariat DPRD</b>		
53	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	82
	<b>Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		
54	Status kinerja pembangunan daerah	Nilai	75
	<b>Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan</b>		
55	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif
	<b>Penunjang Urusan Keuangan Daerah</b>		
56	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WTP
	<b>Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>		
57	Indeks merit sistem	Indeks	Kategori II (180)
	<b>Penunjang Urusan Pengawasan</b>		
58	Opini BPK	Opini	WTP
59	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3
60	Indeks Manajemen Resiko	Indeks	Level 3
	<b>Penunjang Urusan Kewilayahan/Kecamatan</b>		
61	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	75
	<b>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		
62	Persentase Konflik SARA tertangani	%	100
63	Prosentase toleransi umat beragama	%	100
C.	<b>Aspek Daya Saing</b>		
64	Indek Daya Saing Daerah	Indeks	3



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

---



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pembangunan daerah pada tahun 2022 diarahkan pada tema ***“Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Didukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”***. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 menjadi tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021–2026 dengan Visi jangka menengah daerah tahun 2021–2026 *yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Grobogan Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman Dan Berbudaya”*. Tema pembangunan tersebut dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta pendanaan RKPD tahun 2022.

Guna memastikan rencana pembangunan yang telah tercantum dalam RKPD tahun 2022 terlaksana dengan baik, maka perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan RKPD sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar berpedoman pada dokumen RKPD Tahun 2022.
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Tahun Anggaran 2022 yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Grobogan tahun 2022 agar berpedoman pada dokumen RKPD Tahun 2022.
3. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
4. Seluruh *stakeholders* (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2022.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2022 untuk memastikan penjabaran dan pelaksanaan RKPD tahun 2022 berjalan dengan baik, dan menjadi input kebijakan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.



6. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 2022;
  - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022 diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar secara bertahap dapat mengarah pada pencapaian Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 yaitu: ***“Terwujudnya Grobogan Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman Dan Berbudaya”***.

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI



